

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI
ANTARWILAYAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

MELA APRIANI DAMAYANTI

NPM : 1551010232

Jurusan : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019M**

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI
ANTARWILAYAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

MELA APRIANI DAMAYANTI

NPM : 1551010232

Jurusan : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Madnasir, S.E., M.Si

Pembimbing II : M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019M**

ABSTRAK

Ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah merupakan permasalahan utama yang sering terjadi pada saat proses pembangunan ekonomi di suatu daerah. Meskipun ketimpangan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang diukur menggunakan Indeks Williamson menunjukkan tingkat ketimpangan yang tergolong rendah selama masa penelitian mulai tahun 2013-2017. Namun, kondisi PDRB per kapita dan investasi yang meningkat setiap tahunnya belum bisa menjamin kesejahteraan masyarakat, dan terjadinya aglomerasi yang cukup tinggi di wilayah tertentu menyebabkan ketimpangan pembangunan ekonomi semakin tinggi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada tahun 2013-2017 secara parsial maupun simultan?, serta bagaimana ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder dalam periode pengamatan 2013-2017. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk data PDRB per kapita, investasi, dan aglomerasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Penanaman Modal daerah (BPMD) Provinsi Lampung. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linier berganda yang diolah dengan program Eviews 9.

Secara keseluruhan hasil analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis disimpulkan bahwa dalam penelitian ini secara simultan PDRB per kapita, investasi, dan aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Dan berdasarkan nilai R-squared sebesar 84,41% mampu dijelaskan ketiga variabel independen dalam penelitian ini terhadap variabel dependen. Sedangkan secara parsial PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Kemudian investasi secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Dan aglomerasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.

Dalam Ekonomi Islam buruknya pendistribusian kekayaan atau harta di tengah masyarakat menyebabkan adanya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Maka dari itu Ekonomi Islam melarang adanya ketimpangan pembangunan wilayah. Pendistribusian Ekonomi Islam yaitu untuk mewujudkan keadilan distributif serta mekanisme distribusi yang baik dalam Islam sebagai solusi menuju keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Ketimpangan Pembangunan Wilayah, PDRB per kapita, Investasi, Aglomerasi, Ekonomi Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka skripsi saudara:

Nama : Mela Apriani Damayanti
Npm : 1551010232
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR WILAYAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017)

MENYETUJUI

untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 11 April 2019

Pembimbing I

Madnasir, S.E., M.Si
NIP.19750424 200212 1 001

Pembimbing II

M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy
NIP. 19860517 201503 1 005

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.Si
NIP.19750424 200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017)” disusun oleh Nama: **Mela Apriani Damayanti, Npm. 1551010232, Jurusan Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: **Rabu, 29 Mei 2019.**

TIM MUNAQASYAH

Ketua sidang

: Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A

Sekretaris

: Ersi Sisdianto, S.E.I., M.Ak

Penguji I

: Hj. Mardhiyah Hayati, SP., M.S.I

Penguji II

: M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung**

Dr. Moh Bahrudin, M.A

NIP.195808241 98903 1 003

MOTTO

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا عَلَيْكُمْ
أَلَّا تَتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

QS. Al-Hasyr : 7)

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Haramain (Al-Quran dan Terjemahannya)*, Semarang:CV Toha Putra, 2007. h. 1072.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat-Nya yang telah memberikan penulis kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan dari lubuk hati penulis yang paling dalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya, Ayahanda Dasi dan Ibunda Susi Harti. Yang sangat saya cintai, hormati dan saya banggakan. Terimakasih yang tiada terhingga telah senantiasa memberikan saya kasih sayang, doa yang tulus dan ikhlas, serta memberikan saya segala dukungan selama ini baik *support* moril maupun *support* materil. Sehingga bisa membangkitkan rasa semangat saya agar selalu kuat, tabah dan pantang menyerah dalam menuntut ilmu dan menggapai cita-cita yang saya impikan. Semoga Allah SWT memuliakan Ayahanda dan Ibunda baik di dunia maupun di akhirat.
2. Kedua adik saya, Chindi Aprilia dan Hafiza Khumaira. Yang sangat saya sayangi. Terimakasih telah senantiasa memberikan saya semangat dan mendoakan kesuksesan saya dalam menuntut ilmu dan menggapai cita-cita.
3. Almamater tercinta yaitu UIN Raden Intan Lampung. Khususnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah tempat saya menuntut ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Mela Apriani Damayanti, dilahirkan di kota Pringsewu Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu pada tanggal 17 April 1997. Penulis merupakan anak Pertama dari pasangan Bapak Dasi dan Ibu Susi Harti.

Pendidikan Formal yang pernah di tempuh oleh penulis anataralain:

1. Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Margorejo
2. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Adiluwih
3. Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Adiluwih
4. Pada tahun 2015, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syari'ah, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 11 April 2019

Yang Membuat,

Mela Apriani Damayanti

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil Alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat-Nya berupa nikmat iman, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, nikmat ilmu pengetahuan dan segala kenikmatan yang tiada henti sehingga skripsi dengan judul **“AnalisisKetimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017)”** dapat penulis selesaikan dengan benar dan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang di nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Ekonomi Syari’ah. Dan dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, atas segala bantuan semua pihak yang berkontribusi pada proses penyelesaian skripsi ini. Kemudian secara rinci ungkapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamUniversitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

2. Madnasir, S.E., M. Si selaku Ketua Jurusan dan Deki Fermansyah, M.Siselaku sekretaris jurusan Ekonomi Syari'ah yang selalu sabar dalam memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis.
3. Madnasir, S.E., M. Si selaku pembimbing I dan M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan benar dan baik, semoga ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan. Serta seluruh staff akademik dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga penulis bisa mendapatkan informasi serta sumber referensi-referensi dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh karyawan BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Lampung yang telah membantu penulis dalam memperoleh data-data penelitian guna terselesainya skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat terbaik saya yang sudah seperti saudara, Perempuan tangguh (Marsella, Yeni Khorunnisa, Ayu Lutfi Azizah), Jomblo Squad (Siti Komariah, Enda Santri, dan Muslimatun Anisa Fitri). Sahabat SMA saya (Rina Muji Rahayu, Amd.P).

7. Teman-Teman seperjuangan Ekonomi Syaria'h. EIA angkatan 2015, Teman KKN Talang Jawa (Afrilia dan Ulumuddin), Dan semua teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga ilmu yang kita semua dapatkan dibangku kuliah bisa bermanfaat bagi semua orang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran sangat diharapkan penulis agar dapat membangun penyempurnaan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT meridhoi skripsi ini sehingga nikmat keberkahan tersebut bisa bermanfaat, khususnya bagi penulis, masyarakat, dan semua pihak untuk jadikan referensi dan ilmu pengetahuan dalam penelitian selanjutnya. Dan semoga setiap ilmu yang bermanfaat, yang kita dapatkan di nilai oleh Allah SWT sebagai ibadah. Amin Allahuma amin.

Bandar Lampung, 11 April 2019
Penulis,

Mela Apriani Damayanti
1551010232

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Identifikasi Masalah	20
E. Batasan Masalah.....	20
F. Rumusan Masalah	21
G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	21

BAB II LANDASAN TEORI	
------------------------------------	--

A. Tinjauan Pembangunan Ekonomi	23
1. Definisi Pembangunan Ekonomi.....	23
2. Pembangunan Ekonomi Daerah.....	25
3. Teori-Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Wilayah.....	29
a. Teori Ibnu Khaldun	29
b. Teori Yusuf Al-Qardhawi	30
c. Model Pertumbuhan Neo-Klasik.....	32
d. Hipotesis Kuznets.....	35
B. Tinjauan Ketimpangan Pembangunan Wilayah.....	39
1. Ketimpangan Pembangunan Wilayah	39
2. Penyebab Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah	41
3. Indikator Ketimpangan Pembangunan Wilayah	44
a. Konsep PDRB per kapita Relatif	45
b. Indeks Williamson	46
c. Indeks EntropiTheil.....	48
4. Ketimpangan Pembangunan Dalam Ekonomi Islam	49
C. Tinjauan PDRB Perkapita.....	53
1. Definisi PDRB Perkapita	53
2. Metode PerhitunganPDRB Perkapita.....	55
3. Manfaat Perhitungan PDRB Perkapita.....	57
4. Hubungan PDRB Perkapita dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	58
5. PDRB Perkapita Dalam Ekonomi Islam	59
D. Tinjauan Investasi	62
1. Definisi Investasi.....	62
2. Macam-Macam Investasi	63
3. Tujuan Investasi	66
4. Teori-Teori Investasi.....	65
5. Hubungan Investasi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	72
6. Investasi Dalam Ekonomi Islam	74
E. Tinjauan Aglomerasi.....	77

1. Definisi Industri	77
2. Definisi Aglomerasi	77
3. Teori-Teori Aglomerasi	88
4. Keuntungan Aglomerasi.....	86
5. Hubungan Aglomerasi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah.....	88
6. Aglomerasi Dalam Ekonomi Islam.....	90
F. Penelitian Terdahulu	94
G. Kerangka Penelitian	98
H. Hipotesis.....	101

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Penelitian	107
1. Jenis dan Sifat Penelitian	107
a. Jenis Penelitian.....	107
b. Sifat Penelitian	108
B. Jenis Dan Sumber Data	108
C. Teknik Pengumpulan Data.....	109
1. Dokumentasi	109
2. Studi Pustaka.....	110
D. Populasi Dan Sampel	110
E. Definisi Operasional Variabel.....	111
1. Variabel Terikat	111
2. Variabel Bebas	112
F. Metode Analisis Data.....	113
1. Uji Asumsi Klasik	114
a. Uji Normalitas.....	114
b. Uji Multikolinieritas.....	115
c. Uji Autokorelasi	115
d. Uji Heteroskedastisitas	116
2. Analisis Data Panel	116
3. Uji Hipotesis.....	118

a. Uji t (Parsial)	118
b. Uji F (Simultan).....	119
c. Koefisien Determinasi (R ²).....	119

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....

A. Hasil Penelitian.....	120
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	120
a. Gambaran Umum Provinsi lampung	120
b. Sejarah Provinsi Lampung.....	121
c. Geografi Provinsi Lampung	122
d. Sektor Ekonomi Provinsi Lampung	123
2. Gambaran Hasil Penelitian	124
a. Ketimpangan Pembangunan Wilayah.....	125
b. PDRB Perkapita.....	127
c. Investasi	130
d. Aglomerasi.....	133
B. Hasil Analisis Data	135
1. Analisis Uji Asumsi Klasik	135
2. Analisis Data Panel.....	140
3. Analisis Hipotesis	142
4. Pembahasan	145
a. Pengaruh Secara Parsial PDRB Per Kapita, Investasi, Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017.....	145
1) Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017	155
2) Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017	150

3) Pengaruh Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017	152
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

b. Pengaruh Secara Simultan PDRB Per Kapita, Investasi, Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017.....	155
c. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017	157

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	166
B. Saran	168

DAFTAR PUSTAKA	
-----------------------------	--

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
--------------------------	--



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PDB Indonesia ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (dalam persen).....	6
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Regional Kab/Kota Provinsi Lampung Menurut Kelompok Laju Pertumbuhan 2017.....	7
Tabel 1.3	PDRB Kab/Kota di Provinsi Lampung ADHK Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha tahun 2013-2017 (dalam desimal).....	8
Tabel 1.4	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2013-2017 (dalam persen)	10
Tabel 1.5	Indeks Ketimpangan Wilayah Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2007-20011 (dalam desimal).....	12
Tabel 1.6	Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Lampung Tahun 2008-2012 (dalam desimal).....	15
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	94
Tabel 3.1	Daftar Operasional Variabel.....	113
Tabel 4.1	Indeks Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 (dalam desimal)	126
Tabel 4.2	PDRB Per Kapita di Kab/Kota Provinsi Lampung ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (dalam desimal)	128
Tabel 4.3	Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 (dalam desimal)	131
Tabel 4.4	Aglomerasi di Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 (dalam desimal)	134
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinieritas.....	137
Tabel 4.6	Hasil Uji Autokorelasi.....	138

Tabel 4.7	Hasil Uji Park	139
Tabel 4.8	Hasil Regresi Fixed Effect Model	140
Tabel 4.9	Hasil Uji t-Statistik	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Kurva Kuznetz Keterbukaan Sebelum Krisis Ekonomi di Indonesia Tahun 1983-1997	37
Gambar 2.2	Kerangka Penelitian.....	100
Gambar 4.1	Hasil Uji Jarque Bera.....	136
Gambar 4.2	Rta-Rata PDRB Per Kapita dan Indeks Williamsom di Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017	147



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013
Lampiran 2	Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2014
Lampiran 3	Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2015
Lampiran 4	Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2016
Lampiran 5	Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2017
Lampiran 6	Perhitungan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (dalam desimal)
Lampiran 7	Perhitungan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten/Kota diProvinsi Lampung Tahun 2013 (dalam desimal)
Lampiran 8	Perhitungan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten/Kota diProvinsi Lampung Tahun 2014 (dalam desimal)
Lampiran 9	Perhitungan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten/Kota diProvinsi Lampung Tahun 2015 (dalam desimal)
Lampiran 10	Perhitungan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten/Kota diProvinsi Lampung Tahun 2016 (dalam desimal)
Lampiran 11	Perhitungan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten/Kota diProvinsi Lampung Tahun 2017 (dalam desimal)
Lampiran 12	Perhitungan Nilai Aglomerasi (Ag) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 (dalam desimal)

Lampiran 13	Data Penelitian <i>Eviews 9</i>
Lampiran 14	Hasil Reggesion <i>Eviews 9</i>
Lampiran 15	Tabel t-tabel
Lampiran 16	Tabel F-tabel
Lampiran 17	Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
Lampiran 18	SK Pembimbing
Lampiran 19	Kartu Konsultasi Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam rangka mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi “**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR WILAYAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017)**”. Dengan adanya penjelasan yang terkandung dalam istilah judul skripsi tersebut maka diharapkan dapat menghilangkan kesalahpahaman pembaca dalam menentukan bahan kajian selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut:

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²
2. **Ketimpangan** adalah tidak seimbang, berat sebelah, atau kesenjangan.³
3. **Pembangunan Ekonomi** adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan berbagai aspek dalam kegiatan ekonomi.⁴

¹ Hamzah Ahmad dan Nanda Santoso, *Kamus Pintar Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 1996), h. 21.

³ Syafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan Edisi kedua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h. 110.

4. **Antarwilayah** adalah adanya kaitan wilayah yang satu dan wilayah yang lain.⁵
5. **Perspektif** adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan dalam suatu situasi tertentu atau sudut pandang dalam memilih suatu opini.⁶
6. **Ekonomi Islam** adalah suatu aplikasi, petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber potensial agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT dan masyarakat.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah tentang kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam. Dalam hal ini terkait dengan ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi di Provinsi Lampung yaitu ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/Kota dalam kurun waktu 2013-2017 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam.

⁴Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Edisi 2, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 10.

⁵Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), cet.8, h. 79.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-empat*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1062.

⁷Aziz Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 23.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan.
- b. PDRB perkapita akan menggambarkan tentang baik tidaknya perkembangan struktur perekonomian antarwilayah dari waktu ke waktu di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
- c. Alokasi Investasi antarwilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang tidak merata pada setiap daerah menyebabkan kelangkaan modal dan kemajuan di wilayah tertentu saja.
- d. Aglomerasi yang diterapkan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung menyebabkan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

2. Alasan Subyektif

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang bagaimana ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah itu bisa terjadi, Faktor-faktor apa dan pandangan Islam dalam mengatasi ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

- b. Judul yang peneliti ajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis pelajari saat ini yaitu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
- c. Peneliti optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini didukung oleh ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai dalam data-data yang dibutuhkan untuk penelitian sebagai referensi.

C. Latar Belakang Masalah

Pada setiap pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah di suatu wilayah, yaitu bertujuan untuk membawa pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah menjadi lebih maju dan pertumbuhan ekonominya berkembang dengan baik. Menurut Sadono Sukirno pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi.⁸ Istilah-istilah dalam pembangunan ekonomi bisa diartikan secara berbeda-beda oleh para ahli-ahli ekonomi, namun pada dasarnya setiap tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daerah atau wilayah yang dikatakan perekonomiannya berhasil, apabila masyarakatnya sudah dapat menikmati kehidupan yang sejahtera. Dimana kesejahteraan tersebut sebagai wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat

⁸Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*..., h. 3.

secara lahir dan batin maupun secara adil dan merata. Maka dari itu pembangunan ekonomi agar bisa menghasilkan dampak yang positif perlu adanya pengawasan baik itu dalam proses pelaksanaan maupun berlangsungnya pembangunan ekonomi, sehingga terjadinyaperkembangan kemajuan dan tujuan pembangunan bisa tercapai. Keberhasilanya pembangunan ekonomi juga bisa dilihat dari seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi berkaitandengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaryang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan lajupertumbuhannya atas dasar harga konstan. Faktor utama yangmenentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasadari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaandaerah karena dapat menciptakan peluang kerja di daerah.⁹Pembangunan ekonomi di suatu daerah itu juga berkaitan erat dengan perkembangan perekonomian secara keseluruhan pada negara tersebut.

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara Sedang Berkembang (NSB). Permasalahan dalam pembangunan ekonomi di Negara Sedang Berkembang (NSB) adalah peningkatan GrossDomestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) dalam pengurangan kesenjangan pendapatan dan penghapuskemiskinan.¹⁰Tetapi kadang menjadi sebuah dilema antara mementingkanpertumbuhan ekonomi atau mengurangi kesenjangan pendapatan

⁹Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No 4: Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta :1990), h. 40.

¹⁰Mulyadi Sudarmono, *Analisis Transformasi Struktural, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antardaerah di Wilayah Pembangunan 1 Jateng*, Tesis, Program Studi Megister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro : 2006.

dimana pertumbuhan yang tinggi belum tentu memberi jaminan bahwa kesenjangan pendapatan akan rendah. Perkembangan pertumbuhan PDB di Indonesia bisa dilihat dari data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia
Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha 2013-2017 (dalam persen)

Tahun	PDB Indonesia (%)
2013	5,56
2014	5,02
2015	4,79
2016	5,02
2017	5,07

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018)

Perkembangan PDB di Indonesia atau pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2017 mencapai 5,07%. Angka tersebut, menurut berita yang diterbitkan oleh koran kompas.com merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2014 silam. Meskipun demikian, angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 tersebut lebih rendah dari target yang dipasang pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni 5,2%.¹¹ Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari besarnya kontribusi PDRB perkapita dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dan laju pertumbuhan provinsi-provinsi tersebut.

¹¹Sakina Rakhma Diah Setiawan, *Ekonomi Indonesia 2017*. Kompas, Senin 11 Januari 2019, h. 23.

Salah satunya adalah provinsi Lampung, Pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tercermin dari besarnya persentase peningkatan atau penurunan PDRB atas dasar harga konstan konstan terhadap PDRB atas dasar harga konstan tahun sebelumnya. Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh perubahan tingkat harga barang dan jasa. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi wilayah menggambarkan tingkat perkembangan riil atau perkembangan volume produksi barang dan jasa di wilayah bersangkutan. Dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya, pada tahun 2017 tercatat sepuluh kabupaten/kota memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Provinsi Lampung 5,17% yaitu Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi di Kabupaten Lampung Timur 4,64%.¹² Maka jika klasifikasikan menurut kelompok laju pertumbuhannya Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2017 terlihat pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Regional Kabupaten/Kota
menurut Kelompok Laju Pertumbuhan 2017

Laju Pertumbuhan (%)	Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota
(1)	(2)	(3)
2,0 - 4,9	Lampung Timur	1
5,0 - 5,9	Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang	13

¹²Katalog BPS, *Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Produk 2017*, h. 10. (On-line) tersedia di: <https://lampung.bps.go.id/publication/2018.html> (15 januari 2019).

	Bawang, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesisir Barat, Metro	
6,0-6,9	Bandar Lampung	1

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018)

Selengkapnya perkembangan pembangunan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung salah satunya bisa diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 dalam periode 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.3:

Tabel 1.3
PDRB Kabupaten/kota di Provinsi Lampung
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
2013-2017 (dalam desimal)

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1. Lampung Barat	0,3677	0,3881	0,0041	0,0042	0,0045
2. Tanggamus	0,0797	0,0844	0,0089	0,0093	0,0098
3. Lampung Selatan	0,2211	0,2339	0,0246	0,0259	0,0273
4. Lampung Timur	0,2337	0,2404	0,0251	0,0262	0,0274
5. Lampung Tengah	0,3481	0,3679	0,0387	0,0409	0,0431
6. Lampung Utara	0,1206	0,1276	0,0134	0,0141	0,0148
7. Way Kanan	0,0704	0,0744	0,0078	0,0082	0,0086
8. Tulang Bawang	0,1155	0,1219	0,0128	0,0135	0,0142
9. Pesawaran	0,0844	0,0892	0,0093	0,0098	0,0103
10. Pringsewu	0,0571	0,0604	0,0063	0,0066	0,0072
11. Mesuji	0,0513	0,0543	0,0057	0,0061	0,0063
12. Tulang Bawang Barat	0,0573	0,0604	0,0063	0,0067	0,0071
13. Pesisir Barat	0,0222	0,0241	0,0025	0,0026	0,0027
14. Bandar Lampung	0,2712	0,2903	0,0308	0,0328	0,0349
15. Metro	0,0307	0,0326	0,0034	0,0036	0,0038
Total Kab/kota	0,2131	0,1901	0,2003	0,2111	0,2224
Provinsi Lampung	1,8062	1,8978	1,9953	2,0981	2,2065

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018)

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 1.3, perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung memiliki persentasi pertumbuhan yang berfluktuatif. Akan tetapi, Provinsi Lampung jika dilihat pada setiap tahunnya memiliki tingkat PDRB per kapita yang terus meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel diatas yaitu pada tahun 2013 PDRB Provinsi Lampung sebesar 1,8062, dan selalu mengalami peningkatan hingga tahun 2017 yaitu sebesar 2,2065. Dimana hal ini Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan masyarakatnya, guna membantu meningkatkan pembangunan daerah.¹³ Namun, potensi sumber daya yang melimpah tidak selalu merata di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sehingga menyebabkan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Penyebab ketimpangan antar wilayah di Provinsi Lampung diantaranya adalah perbedaan kandungan sumber daya alam, sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja, investasi yang berbeda-beda antar wilayah, mobilitas barang dan jasa, alokasi dan bantuan pembangunan antar wilayah, dan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah.¹⁴

Sedangkan pada umumnya pembangunan daerah akan difokuskan pada pembangunan ekonomi. Dalam rangka memajukan pembangunan ekonomi diperlukannya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diikuti dengan membaiknya taraf hidup sasaran yang

¹³Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar....*, h. 47.

¹⁴Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan....*, h. 48.

dicapai pada umumnya adalah untuk mencapai tingkat pertumbuhan PDRB jauh lebih tinggi dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk.¹⁵

Melihat keadaan tersebut menandakan terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi terjadi di Provinsi Lampung maupun di tingkat Nasional. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung sejak tahun 2013-2017 terlihat sangat baik, bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung selalu berada diatas capaian nasional, dengan pertumbuhan rata-rata selama 2013-2017 sebesar 26,30%, sementara capaian nasional hanya sebesar 25,46%. Untuk melihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dibandingkan dengan capaian nasional dapat terlihat pada tabel 1.4 di bawah ini :

Tabel 1.4
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung
dan Nasional Tahun 2013-2017 (dalam persen)

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi					Rata-Rata (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	
Provinsi Lampung	5,77	5,08	5,13	5,15	5,17	26,30
Nasional (Indonesia)	5,56	5,02	4,79	5,02	5,07	25,46

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018 (diolah)

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan yang tinggi di suatu wilayah tidak mencerminkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat wilayah tersebut juga meningkat. Menurut kebijakan yang diatur dalam PERPRES No.

¹⁵Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional*....., h. 82.

131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019.¹⁶ PERPRES No. 131 tahun 2015 menetapkan kebijakan bahwa adanya pemusatan percepatan pembangunan di daerah atau wilayah yang tertinggal. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi didalam wilayah tersebut.¹⁷ Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional merupakan suatu proses perubahan yang terencana dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didalamnya melibatkan seluruh kegiatan yang ada, melalui dukungan masyarakat di berbagai sektor.

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan dan menyebabkan ketimpangan pembangunan

¹⁶Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2015 Tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019 pasal (1) dan (2).

¹⁷Lincoln Arsyad, *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah edisi kesatu*, (BPFE Yogyakarta : 1999), h. 108.

wilayah. Ketimpangan wilayah (*regional disparity*) timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi.¹⁸

Provinsi Lampung terdiri atas 15 Kabupaten/Kota memiliki latar belakang perbedaan antarwilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda di setiap Kabupaten/Kota. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan, dimana seharusnya kekayaan alam menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan pada nilai tambah tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar (*spread effect*). Hanya saja kekayaan alam ini tidak dimiliki oleh seluruh wilayah di Provinsi Lampung secara merata. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar daerah.¹⁹ Menurut Resti Melina (2017) mengemukakan salah satu permasalahan ketimpangan yang menonjol di Lampung adalah kesenjangan antar daerah, sebagai konsekuensi dari terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di Wilayah yang berdekatan dengan Ibukota Provinsi.²⁰

Tabel 1.5
Indeks Ketimpangan Wilayah Antar Provinsi di Indonesia
Tahun 2007-2011 (dalam desimal)

Provinsi	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011

¹⁸Ferry Kurniawan Lubis, *Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1990 – 2013*, Tesis, Ekonomi Pembangunan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2016, h. 3.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Resti Meliana Sari, Janthy Trilusianty Hidayat, M.Yogie, *Analisis Ketimpangan wilayah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung*, Jurnal Ekonomi, Vol.01.No.4, 2017, h. 5.

Aceh	0.84	0.81	0.72	0.68	0.65
Sumatera Utara	0.66	0.68	0.71	0.78	0.72
Sumatera Barat	0.38	0.38	0.35	0.35	0.34
Riau	0.68	0.69	0.57	0.60	0.66
Jambi	0.40	0.46	0.48	0.48	0.47
Sumatera Selatan	0.80	0.81	0.77	0.78	0.74
Bengkulu	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40
Lampung	0.30	0.35	0.37	0.35	0.43
Kep. Bangka Belitung	0.27	0.29	0.29	0.28	0.28
Kepulauan Riau	0.52	0.41	0.43	0.38	0.38
DKI Jakarta	0.50	0.52	0.53	0.53	0.53
Jawa Barat	0.58	0.61	0.56	0.56	0.60
Jawa Tengah	1.04	1.10	1.07	1.05	1.05
D I Yogyakarta	0.47	0.48	0.48	0.49	0.49
Jawa Timur	1.11	1.10	1.10	1.10	1.11
Banten	0.57	0.63	0.72	0.65	0.64
Bali	0.33	0.33	0.35	0.34	0.35
Kalimantan Barat	0.36	0.36	0.38	0.39	0.38
Kalimantan Tengah	0.19	0.17	0.17	0.17	0.18
Kalimantan Selatan	0.44	0.43	0.43	0.45	0.46
Kalimantan Timur	1.18	1.20	1.07	1.00	1.01
Sulawesi Utara	0.44	0.43	0.45	0.45	0.44
Sulawesi Tengah	0.22	0.22	0.22	0.22	0.34
Sulawesi Selatan	0.63	0.58	0.53	0.54	0.54
Sulawesi Tenggara	0.40	0.37	0.33	0.34	0.35
Gorontalo	0.25	0.22	0.18	0.19	0.20
Sulawesi Barat	0.15	0.17	0.16	0.16	0.16
Nusa Tenggara Barat	1.13	1.03	1.17	1.17	0.97
Nusa Tenggara Timur	0.52	0.53	0.53	0.54	0.55
Maluku	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25
Maluku Utara	0.22	0.23	0.25	0.26	0.27
Papua Barat	0.69	0.77	0.91	1.17	1.43
Papua	3.02	2.81	3.54	3.62	2.77

(Sumber:., Data BPS Tahun 2012, Diolah Bappenas 2012)

Berkembangnya provinsi-provinsi baru sejak 2001 dan desentralisasi diduga akan mendorong kesenjangan antar daerah yang lebih lebar. Pada tingkat Provinsi, masih terjadi ketimpangan selama tahun 2007 sampai 2011.

Selama tahun 2007-2011 masih terjadi ketimpangan wilayah pada provinsi-provinsi di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan PDRB per kapita relatif.

Hasil Indeks Williamson untuk ketimpangan pembangunan secara nasional menunjukkan, bahwa ketimpangan pembangunan sangat tinggi atau pembangunan antar provinsi tidak merata dengan Indeks Williamson dari tahun 2002-2012 rata-rata > 1 .²¹ Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya, guna meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial, dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi, pada umumnya dipandang tidak adil.²²

Ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung ini disebabkan oleh banyak faktor. Seperti pada teori Myrdal, ketimpangan wilayah berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah yang lainnya tetap terlantar. Menurut Myrdal, ketidakmerataan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan ini disebabkan karena adanya dampak balik (*backwash effect*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan dampak sebar (*spread effect*). Faktor-faktor

²¹Ferry Kurniawan Lubis, *Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah....*, h. 6.

²²*Ibid*, h. 7.

yang menyebabkan terjadinya dampak balik pada suatu wilayah salah satunya investasi.²³

Investasi merupakan perpindahan modal dimana cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya.²⁴ Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang. Kelangkaan modal ini akan menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dengan wilayah terbelakang. Untuk menjelaskan kelangkaan modal yang telah terjadi pada tahun 2008-2012 di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, yang menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dengan wilayah terbelakang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Lampung
Tahun 2008-2012 (dalam desimal)

Tahun	Investasi	
	PMA	PMDN
2008	0,1273	0,8799
2009	0,4167	0,1948
2010	0,1431	0,8575
2011	0,7318	0,6991

²³Yuki Angelia, *Analisis ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008*, Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomi, (Universitas Diponegoro: Semarang 2010).

²⁴*Ibid*, h. 10.

2012	0,1125	0,3024
------	--------	--------

Sumber: BPMD provinsi Lampung, 2008-2012

Tabel 1.6 menunjukkan nilai investasi swasta Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Lampung tahun 2008-2012. Selama tahun 2008-2012 terlihat bahwa investasi swasta yang masuk baik dari asing maupun dalam negeri jumlahnya fluktuatif dan cenderung tinggi. Investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah setempat, namun investasi yang tidak merata pada setiap daerah menyebabkan kelangkaan modal yang mengakibatkan ketidakmarataan pembangunan.²⁵

Selain Investasi, terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah.²⁶ Konsentrasi kegiatan ekonomi yang belakangan banyak diterapkan oleh berbagai wilayah termasuk Provinsi Lampung yaitu aglomerasi. Aglomerasi menurut Marshall muncul ketika sebuah industri memilih lokasi untuk kegiatan produksinya yang memungkinkan dapat berlangsung dalam jangka panjang sehingga masyarakat akan banyak memperoleh keuntungan apabila mengikuti tindakan mendirikan usaha disekitar lokasi tersebut.²⁷

Aglomerasi yang cukup tinggi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah cenderung tumbuh lebih cepat. Kondisi tersebut akan mendorong

²⁵Ibid, h. 11.

²⁶Sjafrizal, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. (Baduose: Media. Padang Sumatera Barat, 2008), h. 34.

²⁷Sutarno dan Mudrajat Kuncoro, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang, 2003.

proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.²⁸ Akan tetapi bagi daerah yang memiliki tingkat aglomerasi rendah akan membuat daerah tersebut semakin terbelakang.

Riset terkait yang meneliti tentang ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah sudah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan Yeniwati pada tahun 2013 menemukan bahwa adanya ketimpangan ekonomi antar provinsi yang terjadi di Sumatera selama kurun waktu 2005-2010 dikarenakan potensi sumberdaya yang dimiliki antara provinsi satu dengan provinsi yang lainnya tidak merata dan tidak seragam, oleh karena itu pertumbuhannya pun berbeda. Untuk dapat tumbuh secara cepat, suatu daerah perlu memilih satu atau lebih pusat-pusat pertumbuhan regional yang memiliki potensi paling kuat.²⁹ Sedangkan dalam penelitian Kartika Dorcas Andhiani, Erfit, Adi Bhakti pada tahun 2018 menemukan bahwa secara simultan, investasi, belanja pemerintah, aglomerasi, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatera. Namun demikian, secara parsial hanya variabel investasi yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Sebaliknya variabel-variabel lainnya yaitu belanja pemerintah, dan aglomerasi dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan.³⁰ Ketimpangan pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat

²⁸Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*...., h. 30.

²⁹Yeniwati, *Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi Di Sumatera*, Jurnal Kajian Ekonomi, Juli 2013, Vol. II, No.03, h. 12.

³⁰Kartika Dorcas Andhiani, Erfit, Adi Bhaktiar, *Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Wilayah Sumatera 2011-2015*, e-

dari sudut pandang konvensional namun secara Ekonomi Islam juga membahas tentang ketimpangan pembangunan Syariah.

Dalam Ekonomi Islam, juga membahas sebuah konsep pembangunan Syari'ah dimana konsep tersebut diartikan sebagai konsep yang mempelajari dan menganalisis proses pembangunan, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.³¹ Pembangunan ekonomi disuatu daerah atau wilayah diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan.

Pandangan Ekonomi Islam mengenai situasi perekonomian yang dibentuk oleh nilai-nilai dan prinsip Islam, yaitu perekonomian harus menciptakan keadilan dan harmonis.³² Keadaan ini bisa dicerminkan dengan adanya kesempatan pada setiap individu untuk mendapatkan hak-haknya secara penuh dan proposional dan adanya iklim yang sinergis antar anggota masyarakat untuk saling mendukung (harmonis) agar terciptanya kesejahteraan (*falah*). Maka dari itu, pembangunan ekonomi bisa berhasil dengan adanya kerja keras dari berbagai pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana tentang anjuran untuk bekerja dalam kegiatan perekonomian disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 105):

Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 7. No.1, Januari-April 2018, h. 29.

³¹Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. edisi revisi, (jakarta: Rajawali Pers. 2016).

³²*Ibid*, h. 73.

مَا فِئْتِكُمْ وَالشَّهَادَةُ الْغَيْبِ عَلِمَ إِلَى وَسْتَرْدُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسِيرَى أَعْمَلُوا وَقُلِ
تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ

Artinya: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."³³

Dalam Ayat diatas, memerintah kepada semua orang mukmin dan setiap orang untuk berusaha, termasuk usaha ekonomi. Dimana setiap kegiatan ekonomi tersebut pasti akan diketahui oleh Allah SWT, Rasulullah, dan orang-orang beriman secara keseluruhan. Dalam setiap usaha ekonomi yang kita lakukan pasti akan ada balasannya atau hasilnya dan yang berhak memberikan pembalasan atau imbalan itu adalah Allah SWT, Dzat yang maha mengetahui hal-hal yang ghaib disamping hal-hal yang tampak. Dan Allah SWT akan memperlihatkan atau menampilkan setiap perbuatan seseorang baik maupun buruk di akhirat kelak.³⁴ Maka lakukanlah usaha kegiatan ekonomi secara syariah yaitu menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Sejalan dengan latar belakang diatas, maka permasalahan ketimpangan pembangunan ekonomi menjadi permasalahan yang sering terjadi antarwilayah pada saat proses pembangunan ekonomi. Dan adanya kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi akan mewujudkan

³³Departemen Agama RI, *Al-Haramain (Al-Quran dan Terjemahannya)*, Semarang:CV Toha Putra, 2007, h. 152.

³⁴Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta : AMRAH, 2015). h. 60.

tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat meningkat. Serta dalam hal ini perlu adanya penelitian mendalam tentang faktor-faktor yang terkait dalam ketimpangan pembangunan agar pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketimpangan pembangunan ekonomi tersebut. Maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung dengan judul penelitian **“Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2017).”**



D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat tiga variabel yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten/Kota di provinsi Lampung pada tahun 2013-2017 yaitu PDRB per kapita, Investasi, dan Aglomerasi.
2. Total PDRB Provinsi Lampung masih tertinggal dari PDRB Provinsi-Provinsi Lain di Pulau Sumatera pada tahun 2013-2017.
3. Nilai Investasi di Provinsi Lampung yang berjumlah besar namun belum merata di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

4. Terjadinya Aglomerasi secara regional di beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

E. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, terarah, dan tidak meluas makaterdapat batasan masalah yaitu hanya berkaitan ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu PDRB perkapita, Investasi dan Aglomerasi, dalam kurun waktu yang digunakan tahun 2013-2017. Faktor-faktor PDRB perkapita, Investasi dan Aglomerasi dipilih karena ketiga variabel ini paling signifikanpengaruhnya terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung.



F. Rumusan Masalah

1. Apakah PDRB per kapita, Investasi dan Aglomerasi secara parsialberpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017?
2. Apakah PDRB per kapita, Investasi dan Aglomerasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunanwilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017?
3. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap ketimpangan pembangunanwilayah di Provinsi Lampung tahun 2013-2017?

G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dikemukakan adalah:

- a. Menjelaskan pengaruh PDRB per kapita, Investasi dan Aglomerasi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017 secara parsial.
- b. Menjelaskan pengaruh PDRB per kapita, Investasi dan Aglomerasi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017 secara simultan.
- c. Mendeskripsikan pandangan Ekonomi Islam terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Lampung tahun 2013-2017.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Memberikan hasil penelitian mengenai pengaruh PDRB per kapita, Investasi dan Aglomerasi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017 secara parsial.
- b. Memberikan hasil penelitian mengenai pengaruh PDRB per kapita, Investasi dan Aglomerasi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017 secara simultan.

- c. Memberikan gambaran pandangan Ekonomi Islam terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Lampung tahun 2013-2017 berdasarkan hasil penelitian.



A. Tinjauan Pembangunan Ekonomi

1. Definisi Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang sangat luas. Menurut akademis ilmu ekonomi, secara tradisional pembangunan dipandang sebagai suatu fenomena ekonomi diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perspektif mengenai tujuan dan makna pembangunan kemudian berkembang menjadi lebih luas lagi. Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total

suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual, maupun kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kehidupan yang serba lebih baik secara materil dan spritual.³⁵

Sedangkan menurut Sadono Sukirno, walaupun kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya, kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai sebagian dari usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat, Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha sesuatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Dengan adanya pembatasan diatas maka pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk sesuatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.³⁶

Jhingan, mengajukan beberapa persyaratan pembangunan ekonomi yaitu:³⁷

- a. Pembangunan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri atau daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari masyarakat.

³⁵Rama Nurhuda, M. R. Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo, *Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No.4, 2012, h. 110.

³⁶Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*....., h. 6.

³⁷Jhingan, ML *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*., (Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2010), h. 34.

- b. Dapat menghilangkan kesempurnaan pasar. Ketidake sempurnaan pasar menyebabkan mobilitas faktor terganggu dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan.
- c. Perubahan struktural, artinya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi industri yang ditandai oleh meluasnya sektor sekunder dan tersier serta menyempitnya sektor primer.
- d. Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi.
- e. Kriteria investasi yang tepat, memiliki tujuan untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat, tetapi tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian.
- f. Persyaratan sosial-budaya. Wawasan sosial-budaya serta organisasi harus dimodifikasi, sehingga selaras dengan pembangunan.
- g. Administrasi. Alat untuk perlengkapan administratif untuk perencanaan.

Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai dengan perubahan struktural yakni perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Pada umumnya pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Pada tingkat permulaan, pembangunan ekonomi dibarengi pula dengan pertumbuhan dan sebaliknya.³⁸

³⁸Rama Nurhuda, M. R. Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo. *Analisis Ketimpangan....*, h. 112.

Dari definisi pembangunan ekonomi dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu perubahan keseluruhan secara ekonomi dan sosial di suatu wilayah yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah. Dimana Suatu peningkatan pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan distribusi pembangunan yang merata agar terciptanya suatu tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan masyarakat.

2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di daerah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*Added Value*) yang terjadi di daerah tersebut. Pertambahan tersebut diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Berkaitan dengan pembangunan daerah pula ada tiga pengertian tentang definisi daerah yaitu:

- a. Pengertian pertama daerah homogeny (*homogenous region*) yaitu menganggap suatu daerah sebagai space atau ruang dimana kegiatan ekonomi berlaku dan diberbagai pelosok ruang tersebut sifat-sifatnya sama. Misalnya dari aspek geografis, etnik, ataupun aspek ekonomi.
- b. Pengertian kedua adalah daerah modal yaitu daerah sebagai ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.

- c. Pengertian ketiga daerah administrasi yaitu daerah yang memiliki dan memberikan batasan suatu daerahnya dengan batasan administrasi.³⁹

Sedangkan pembangunan ekonomi daerah itu berorientasi pada proses. Suatu proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan transformasi pengetahuan.⁴⁰ Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah memasuki babak baru sejalan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian direvisi kembali menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014. Adapun tujuan dari adanya otonomi daerah berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu:⁴¹

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

³⁹Rosalendro Eddy Nugroho, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten*, Journal of Industrial Engineering and Management Systems Vol. 10, No. 1, February 2017, h. 46.

⁴⁰Lincoln Arsyad, *Pengantar perencanaan....*, h. 67.

⁴¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 31 ayat (2).

- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah.
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴²

Adanya peraturan UU tersebut dimana memberikan otonomi ke daerah otonom kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka harapannya pembangunan ekonomi daerah bisa lebih efektif dan efisien sehingga setiap wilayah bisa mengoptimalkan pembangunan daerahnya masing-masing.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.⁴³

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan

⁴²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2).

⁴³Denny Iswanto, *Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ekonomi, Signifikan Vol. 4 No. 1 April 2015, h. 42.

daerah yang bersangkutan(*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia,kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah).Dampak darikebijakan-kebijakanpembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah adalah terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi.⁴⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, pembangunan ekonomi daerah dikatakan berhasil apabila masyarakat dan pemerintah melakukan kerjasama untuk mengelola seluruhpotensi sumberdaya yang ada diwilayah tersebut secara optimal. Bentuk perhatian pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi daerah yaitu dengan mengeluarkan kebijakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sehingga setiap wilayah bisa menjalankan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien. Dimana harapannya kebijakan tersebut diberlakukan untuk merangsang perkembangankegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut agar lebih maju.

3. Teori-Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Wilayah

a. Teori Ibnu Khaldun

Pembangunan ekonomi sangat penting karena kecendrungan normal dalam masyarakat tidak ingin mandeg, mereka harus terus maju atau mereka akan mengalami kemunduran.Pembangunan ekonomi dalam islam di dalam model Ibnu Khaldun tidak mengacu hanya kepada pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan (g) meliputi semua aspek pembangunan manusia sehingga masing-masing variabel memperkaya variabel lain seperti Pemerintah (G), Syariah (S), Masyarakat (N), Kekayaan (W), Keadilan (j), dan pada akhirnya

⁴⁴Ferry Kurniawan Lubis, *Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah.....*, h. 25.

akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan atau kebahagiaan hakiki manusia, dan menjamin tidak saja kelangsungan hidup melainkan juga kemajuan dalam peradaban.⁴⁵

Pembangunan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa keadilan (j) yang disini tidak dipandang dalam arti ekonomi yang sempit tetapi dalam arti yang lebih komprehensif yaitu keadilan dalam semua sektor kehidupan manusia. Keadilan dalam pengertian yang komprehensif ini tidak akan dapat diwujudkan tanpa menciptakan suatu masyarakat yang peduli lewat persaudaraan dan persamaan sosial, dan menjamin keamanan kehidupan, hak-hak milik dan penghormatan kepada martabat orang, pemenuhan secara jujur kewajiban politik, dan sosial ekonomi, upah yang adil bagi siapa saja yang telah bekerja dan pencegahan kezaliman kepada siapapun dalam bentuk apa pun.⁴⁶

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa, pembangunan ekonomi dalam pandangan ekonomi islam menurut Ibnu Khaldun didasarkan atas dasar beberapa aspek yaitu meliputi semua aspek pembangunan manusia sehingga masing-masing variabel memperkaya variabel lain seperti Pemerintah (G), Syariah (S), Masyarakat (N), Kekayaan (W), Keadilan (j) sehingga bisa terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat antar wilayah yang satu dengan

⁴⁵Omy FirlianyHanafiah, *Pengaruh Variabel-Variabel Dalam Model Dinamika Ibnu Khaldun Terhadap Tingkat Kemiskinan di Beberapa negara Muslim Tahun 200-2004*, Tesis, Program Pascasarjana UI, 2009, h. 45.

⁴⁶*Ibid.*

yang lainnya dan dengan adanya kesejahteraan masyarakat yang meningkat maka akan mengurangi tingkat ketimpangan di suatu wilayah tersebut.

b. Teori Yusuf Al-Qardhawi

Pertumbuhan ekonomi dalam pandangan ekonomi islam menurut Yusuf Qardhawi adalah untuk mewujudkan kehidupan yang baik (*Al-hayat at-taiyibah*). Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghandaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi *kebebasan* dan *keadilan kepemilikan*. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Al-Qur'an agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.⁴⁷

Sistem ekonomi islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke

⁴⁷Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 7.

penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang dikutuk. Al-Qur'an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, sadaqaah, hibah, wasiat dan sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan baik. Karena akibatnya kekayaan yang hanya beredar di orang tertentu saja akan menyebabkan ketimpangan pendapatan masyarakat yang hal ini sekaligus dapat menyebabkan pula ketimpangan pembangunan antar wilayah semakin tinggi.⁴⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pendistribusian yang baik adil dan merata di masyarakat dengan jalan secara syariah yaitu zakat, sadaqaah, hibah, wasiat dan sebagainya, akan mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi di masyarakat maupun dalam cangkupan antar wilayah.

c. Model Pertumbuhan Neo-Klasik

Robert Solow dan Trevor Swan secara sendiri-sendiri mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sekarang sering disebut dengan nama Model Pertumbuhan Neo-Klasik. Model Solow-Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dalam model Neo-Klasik Solow-Swan dipergunakan suatu bentuk fungsi produksi yang lebih umum, yang bisa menampung berbagai kemungkinan substitusi antar kapital (K) dan tenaga kerja (L).⁴⁹

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*...., h. 263.

Model Neo-Klasik dipelopori oleh George H. Bort (1960) dengan mendasarkan analisisnya pada Teori Ekonomi Neo-Klasik. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah. Karena kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah peningkatan kegiatan produksi, maka mengikuti Richardson (1978), model Neo-Klasik ini dapat diformulasikan mulai dari fungsi produksi. Dengan menganggap bahwa fungsi produksi adalah dalam bentuk Cobb-Douglas, maka dapat ditulis:⁵⁰

$$Y = A K^\alpha L^\beta, \alpha + \beta = 1 \dots\dots\dots (1.1)$$

dimana Y melambangkan PDRB, K dan L melambangkan modal dan tenaga kerja. Karena analisa munculkan pertumbuhan maka semua variabel adalah fungsi waktu (t). Dengan mengambil turunan matematika persamaan (1.1) terhadap variabel (t) diperoleh :

$$y = a + \alpha k + (1 - \alpha) l \dots\dots\dots (1.2)$$

dimana $y = dY/dt$ menunjukkan peningkatan PDRB (pertumbuhan ekonomi), $a = dA/dt$ menunjukkan perubahan teknologi produksi (secara netral), $k = dK/dt$ menunjukkan penambahan modal (investasi) dan $l = dL/dt$ penambahan jumlah dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

⁵⁰Syafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*...., h. 108.

Selanjutnya, bila aspek daerah dimasukkan ke dalam analisa ini, maka peningkatan modal di suatu daerah tidak hanya berasal dari tabungan di daerah itu saja, tetapi berasal juga dari modal yang masuk dari luar daerah. Kenyataan ini dapat diformulasikan sebagai berikut:⁵¹

$$k_i = \left(\frac{S_i}{V_i}\right) + \sum_{j=1}^n K_{ji} \dots\dots\dots(1.3)$$

dimana S_i adalah Marginal Propensity to Save (MPS) di daerah i , V_i adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR) daerah i . Sedangkan k_{ji} adalah jumlah modal yang masuk dari daerah lain ke daerah i .

Sama halnya dengan modal, peningkatan jumlah tenaga kerja pada daerah i tidak saja disebabkan karena pertambahan penduduk daerah yang bersangkutan saja, tetapi juga karena arus perpindahan penduduk masuk (immigration) ke daerah yang bersangkutan. Kenyataan ini dapat diformulasikan sebagai berikut :⁵²

$$I_i = n_i + \sum_{j=1}^n m_{ji} \dots\dots\dots(1.4)$$

dimana n_i merupakan pertambahan penduduk daerah yang bersangkutan, m_{ji} adalah penduduk yang masuk (immigration) ke daerah i yang datang dari daerah lainnya j .

Perpindahan modal (k_{ji}) dari daerah j ke daerah i terutama oleh tingkat pengembalian modal, r , yang tinggi di daerah i dibandingkan dengan daerah j . Demikian juga dengan perpindahan penduduk yang terjadi karena ada perbedaan tingkat upah, w . Berdasarkan hal ini maka dapat ditulis:

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid*, h. 110-112.

$$k_{ji} = f_k (r_i - r_j) \dots\dots\dots(1.5)$$

$$m_{ji} = f_l (w_i - w_j) \dots\dots\dots(1.6)$$

Penganut Model Neo-Klasik, beranggapan bahwa mobilitas faktorproduksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Akibatnya, pada saat itu modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan regional cenderung melebar (*divergence*). Akan tetapi bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Dengan demikian, nantinya setelah negara yang bersangkutan telah maju maka ketimpangan pembangunan regional akan berkurang (*convergence*).⁵³

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah disuatu wilayah tercermin dari peningkatankegiatan produksi diwilayah tersebut. Namun, tidak akan terealisasi secara optimal jika wilayah tersebut hanya melakukan peningkatan produksi dengan mengelola sumberdaya yang ada diwilayah tersebut tanpa dibarengi dengan prasarana dan fasilitas komunikasi yang baik sehingga mobilitas modal dan tenaga kerja diwilayah tersebut semakin lancar. Dengan adanya peningkatan produksi yang dibarengi dengan prasarana dan fasilitas komunikasi yang baik pada mobilitas modal dan tenaga kerja maka wilayah tersebut akan berangsur membaik kondisi

⁵³*Ibid*,h.113.

ekonominya dan secara otomatis bisa mengurangi ketimpangan pembangunan di wilayah tersebut.

d. Hipotesis Kuznets

Simon Kuznets mengemukakan hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.⁵⁴

Profesor Kuznets mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut :⁵⁵

- 1) Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
- 2) Tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi.
- 3) Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
- 4) Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.

⁵⁴Michael Todaro, Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Pearson Education Limited. United Kingdom : 2006), h. 45.

⁵⁵*Ibid*, h. 146.

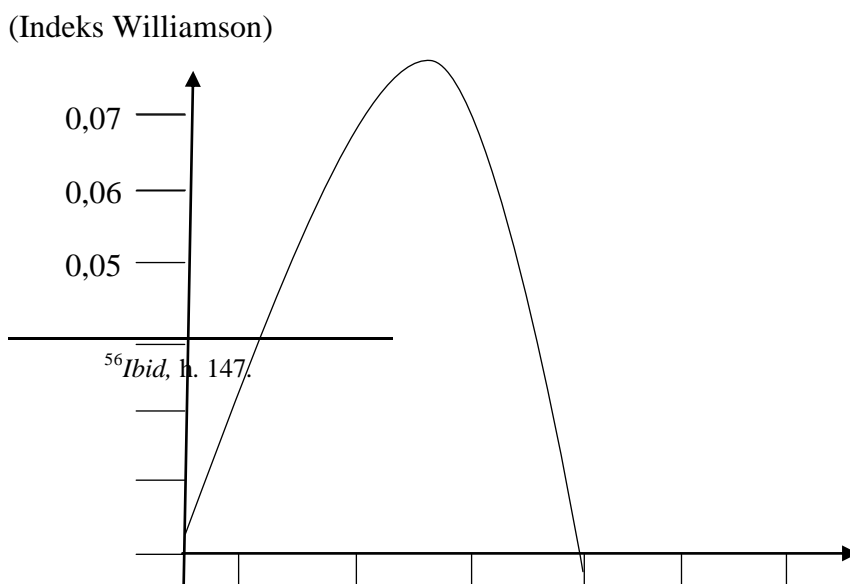
- 5) Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai, atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
- 6) Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

Dua faktor yang pertama lazim disebut sebagai variabel-variabel ekonomi agregat. Sedangkan nomor tiga dan empat biasa disebut variabel-variabel transformasi struktural. Adapun dua faktor yang terakhir disebut sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi penyebaran pertumbuhan ekonomi secara internasional.⁵⁶

Sebelumnya hipotesis Kuznets pernah dibuktikan oleh Hesty Febrianidi Provinsi-Provinsi yang ada di Indonesia. Pada penelitiannya Hesty Febriani (2011) menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur pola hubungan antara ketimpangan pendapatan dan keterbukaan perdagangan berdasarkan kerangka berpikir kurva Kuznets keterbukaan sebelum krisis ekonomi di Indonesia.

Gambar 2.1

Diagram Kurva Kuznets Keterbukaan Sebelum Krisis Ekonomi di Indonesia (1983-1997)



0,04

0,03

0,02

0,01

-64.04-64.03064.0364.04 64.05 (Openness)

Sumber : Hesty Febriani (2011)⁵⁷

Pada estimasi jangka panjang sebelum krisis ekonomi di Indonesia (1983-1997) ditemukan hubungan berbentuk kurva U-terbalik antarketerbukaan perdagangan dan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan akan naik seiring dengan naiknya keterbukaan perdagangan. Kemudian pada saat keterbukaan perdagangan mencapai titik 64.03 ketimpangan perlahan akan menurun. Pada periode tersebut, variabel keterbukaan perdagangan berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pada taraf signifikansi 0,01.⁵⁸

Pada akhirnya analisis kuznets, menyatakan bahwa pertumbuhan di negara-negara maju tidak menyebabkan negara-negara berkembang ikut tumbuh, hal ini dikarenakan negara berkembang tidak mampu mengikuti pertumbuhan negara-negara maju tersebut, sehingga terjadilah kesenjangan antar negara maju dan negara berkembang dalam pertumbuhan ekonominya. Kritik utama terhadap kurva Kuznets adalah hasil ini sangat sensitif terhadap ukuran *inequality* dan

⁵⁷Hesty Febriani, *Analisis Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan dan Keterbukaan Perdagangan Pasca Krisis Ekonomi (Kerangka Berpikir Kurva Kuznets Keterbukaan)*, Skripsi, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta:2016.

⁵⁸*Ibid*, h. 113.

pemilihan *set* data. Dengan melakukan pemilihan yang berbeda, seseorang bisa mendapat kurva U, kurva U terbalik, atau tidak ada hubungan sama sekali.⁵⁹

Dari diagram kurva Kuznet diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya ketimpangan antarwilayah pada tahap awal proses pembangunan ekonomi disebabkan adanya ketidaksiapan wilayah terbelakang dalam daya saing yang sama jika dibandingkan wilayah yang kondisi ekonominya lebih baik. Namun, dengan adanya campur tangan kebijakan pemerintah dalam distribusi pembangunan ekonomi maka perlahan ketimpangan pembangunan antarwilayah tersebut menurun.



B. Tinjauan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

1. Definisi Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Menurut Syafrizal, ketimpangan pembangunan wilayah adalah perbedaan distribusi pembangunan ekonomi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan ekonomi wilayah.⁶⁰ Disparitas atau ketimpangan wilayah adalah salah satu masalah yang pasti muncul dalam pembangunan wilayah. Ketidaksetaraan menjadi signifikan ketika wilayah dalam suatu negara terjadi pada berbagai potensi sumber daya alam, lokasi geografis, kualitas sumber daya manusia dan hubungan etnis atau politik. Salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan di

⁵⁹Michael Todaro, Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi....*, h. 56.

⁶⁰Syafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan....*, h. 107.

wilayah ini adalah untuk mengatur pembangunan. Tapi pembangunan belum tentu untuk mengurangi ketimpangan daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan konsep pemerataan pembangunan di Indonesia. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pengangguran.⁶¹

Menurut Mudrajat Kuncoro, kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (*endowment factor*). Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. Menurut Hipotesa NeoKlasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun.⁶²

Teori ketimpangan dan disparitas antar wilayah dikemukakan oleh Jeffrey G. Williamson yang menganalisa distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional pada suatu negara, ternyata dijumpai dalam suatu negara

⁶¹Tulus Suryanto, Femei Purnamasari, Mohamad Kurniawan, *Tax Revenue and Disparity: How to Improvement Income Inequality in Islamic Perspectiv*, Asian Journal of Social Sciences and Management Studies, Vol. 5, No. 2, 65-71, 2018. h. 69.

⁶²Dewi Febri Astuti, *Analisis Faktot-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Jawa*, Jurnal Ekonomi, Vol.1, No. 03, 2013.

terdapat suatu wilayah berpendapatan tinggi yang selalu diikuti sekelompok wilayah berpendapatan menengah dan rendah. Bila perbedaan antara yang berpendapatan per kapita tinggi dan yang rendah sangat besar maka terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi. Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau $0 < IW < 1$.⁶³ Jika Indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi semakin kecil dan jika Indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin tinggi ketimpangan pembangunan ekonomi. Dalam tahapan awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi nampak lebih merata diantara wilayah-wilayah, tetapi dalam tahap lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi antar wilayah menampakkan perbedaan yang semakin bertambah besar, yang berarti disparitas antar wilayah bertambah besar.⁶⁴

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan wilayah adalah adanya perbedaan yang mencolok antar wilayah yang satu dengan wilayah lainnya dalam hal distribusi pembangunan. Dimana ketimpangan pembangunan wilayah merupakan masalah utama yang sering terjadi pada saat proses pembangunan itu berlangsung. Namun ketika pembangunan ekonomi terus dilakukan di wilayah yang terjadi ketimpangan maka ketimpangan wilayah didalam wilayah tersebut akan berangsur menurun.

2. Penyebab Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah

⁶³ Adisasmita Rahardjo, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 76.

⁶⁴ *Ibid*, h. 77.

Menurut Syafrizal, ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Perbedaan kekayaan daerah ini yang pada akhirnya menimbulkan adanya wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*).⁶⁵

Adapun penyebab-penyebab ketimpangan pembangunan ketimpangan antar wilayah menurut Syafrizal yaitu sebagai berikut:

a. Perbedaan Kandungan Sumberdaya Alam

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumberdaya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumberdaya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih rendah.⁶⁶

b. Perbedaan Kondisi Demografis

Faktor lainnya yang juga mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah bilamana terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur

⁶⁵Syafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*...., h. 119.

⁶⁶*Ibid*, h. 120.

kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan.

Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografisnya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relative rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah. Kurangnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah.⁶⁷

c. Ekonomi Konsentrasi Kegiatan Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup

⁶⁷*Ibid.*

besar. Konsentrasi kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, karena adanya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu. *Kedua*, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.⁶⁸

d. Alokasi Dana Pembangunan Antarwilayah

Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Akan tetapi jika sebaliknya di mana sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Alokasi dana pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi dan listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan pada peningkatan

⁶⁸*Ibid*, h. 121.

produktivitas tenaga kerja, pendapatan perkapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut.⁶⁹

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa penyebab ketimpangan pembangunan wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu perbedaan kandungan sumberdaya alam, perbedaan kondisi demografis, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah (aglomerasi), dan alokasi dana pembangunan antar wilayah yang terdapat pada masing-masing wilayah tersebut sehingga dalam proses pembangunan belum tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka terjadilah ketimpangan antarwilayah karena faktor-faktor tersebut terdistribusi secara tidak merata.

3. Indikator Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Indikator atau ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu negara atau suatu daerah bukanlah hal yang mudah, karena hal ini dapat menimbulkan debat yang berkepanjangan. Adakalanya masyarakat berpendapat bahwa ketimpangan suatu daerah cukup tinggi setelah melihat banyak kelompok miskin pada daerah bersangkutan. Akan tetapi ada pula masyarakat merasakan adanya ketimpangan yang cukup tinggi setelah melihat adanya segelintir kelompok kaya di tengah-tengah masyarakat yang umumnya masih miskin. Perlu diingat dipenelitian ini bahwa, berbeda dengan distribusi pendapatan yang melihat ketimpangan antar kelompok masyarakat, ketimpangan pembangunan antar wilayah melihat perbedaan antarwilayah. Hal yang dipersoalkan dipenelitian ini, bukan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, tetapi adalah perbedaan antar

⁶⁹*Ibid*, h. 122.

daerah maju dan daerah terbelakang.⁷⁰ Ketimpangan pembangunan wilayah diukur menggunakan beberapa indikator antaralain:

a. Konsep PDRB per kapita Relatif

Ketimpangan ini diukur menggunakan proksi yang dipakai dalam penelitian Jaime Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran ketimpangan wilayah pada konsep PDRB per kapita relatif dengan rumus:⁷¹

$$RD_{it} = \frac{\text{PDRB per kapita } i_t}{\text{PDB per kapita Nal, } i_t} - 1$$

Keterangan:

RD_{it} : Ketimpangan wilayah Provinsi i , tahun t

PDRB per kapita $y_{i,t}$: PDRB per kapita pada Provinsi i pada tahun t

PDB per kapita Nal,t : PDB per kapita Indonesia pada tahun t

Ukuran ketimpangan wilayah dengan menggunakan Konsep PDRB per kapita Relatif adalah formula dalam bentuk gambaran hubungan PDRB per kapita dengan ketimpangan wilayah. Bentuk hubungan PDRB per kapita dengan ketimpangan wilayah tersebut dinamakan dengan Konsep PDRB per kapita Relatif. Dimana Konsep PDRB per kapita Relatif bisa digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan secara luas baik itu antarnegara maupun antarprovinsi atau kabupaten/kota. Dalam penelitian Jaime Bonet (2006), penggunaan (i) menunjukan wilayah yang akan dianalisis dan (t) tahun atau

⁷⁰*Ibid*, h. 118.

⁷¹Yuki Angelia, *Analisis ketimpangan Pembangunan....*, h. 35.

periode pada rentan waktu pada wilayah analisis. Sedangkan pengurangan pada angka satu (1) dalam proksi menunjukkan pentafsiran hitungan yang stabil.⁷²

b. Indeks Williamson

Ukuran ketimpangan pembangunan antarwilayah yang mula-mula dilakukan adalah *Williamson Index* yang digunakan dalam studi Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966. Secara ilmu statistik, indeks ini sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah *Williamson Index* muncul sebagai penghargaan kepada pengguna awal indeks tersebut dalam mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antarlain sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah.⁷³

Berbeda dengan *Gini Ratio* yang lazim digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan antargolongan masyarakat, *Williamson Index* menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antarwilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan

⁷²Jaime Bonet, *Fiscal Income Desentralization and Regional Income Disparities-Evidence From the Columbian*, Jurnal Internasional, The Annals Of Regional Science: Vol 40, 2006.

⁷³Syafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*...., h. 109.

antarkelompok masyarakat. Dengan demikian, formulasi Indeks Williamson ini secara statistik dapat ditampilkan dengan formula sebagai berikut:⁷⁴

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{N}\right)}}{y} \quad 0 < IW < 1$$

Keterangan :

IW: Indeks Williamson

y_i : PDRB per kapita daerah i

y : PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i : Jumlah penduduk daerah i

N : Jumlah penduduk seluruh daerah

Subskrip w digunakan karena formulasi yang dipakai adalah secara tertimbang (*weighted*) agar indeks tersebut menjadi lebih stabil dan dapat dibandingkan dengan negara atau daerah lainnya. Sedangkan kriteria hasil uji indeks 0 s/d 1 sebagai berikut :⁷⁵

a. Bila IW mendekati 1 berarti sangat timpang.

b. Bila IW mendekati 0 berarti sangat merata.

c. Indeks Entropi Theil

Indeks lainnya yang juga lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah Theil Index. Sebagaimana digunakan oleh Akita dan Alisyahbana (2002) dalam studinya yang dilakukan di Indonesia. Sedangkan data yang diperlukan untuk mengukur indeks ini adalah

⁷⁴*Ibid*, h. 110.

⁷⁵*Ibid*.

sama dengan yang diperlukan untuk menghitung Williamson Index yaitu PDRB per kapita dan jumlah penduduk untuk setiap wilayah. Demikian pula halnya dengan penafsirannya yang juga bila indeks mendekati 1 berarti sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata. Formulasi Indeks Theil sebagai berikut:

$$T_d = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \{y_{ij}/Y\} \log[\{y_{ij}/Y\}/\{n_{ij}/N\}]$$

Keterangan:

T_d : Indeks Theil

y_{ij} : PDRB per kapita Kabupaten i di Provinsi j

Y : Jumlah PDRB per kapita seluruh Provinsi j

n : Jumlah penduduk Kabupaten i di Provinsi j

N : Jumlah penduduk seluruh Kabupaten i di Provinsi j

Namun demikian, penggunaan *Theil Indeks* sebagai ukuran ketimpangan ekonomi antarwilayah mempunyai kelebihan tertentu. Kelebihan penggunaan indeks Theil sebagai ukuran ketimpangan ekonomi antarwilayah adalah:⁷⁶

- 1) Indeks theil dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas. Dalam kasus Indonesia, dengan menggunakan metode indeks theil dapat dihitung ketimpangan dalam provinsi dan kabupaten/kota serta antarprovinsi, kabupaten dan kota.

⁷⁶*Ibid.* h. 112.

2) Menggunakan indeks Theil dapat pula dihitung kontribusi (dalam persentase) masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting.

4. Ketimpangan Pembangunan Dalam Ekonomi Islam

Islam sebagai sistem hidup (*way of life*) dan merupakan agama yang universal sebab memuat segala aspek kehidupan baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Seiring dengan maju pesatnya kajian tentang ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya mendorong kepada terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam. Mustafa E Nasution menjelaskan bahwa berbagai krisis yang melanda perekonomian dunia yang menyangkut sistem ekonomi kapitalis dewasa ini telah memperburuk tingkat kemiskinan serta pola pembagian pendapatan di dalam perekonomian negara-negara yang ada, lebih-lebih lagi keadaan perekonomian di negara-negara Islam.⁷⁷

Sistem ekonomi Islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak. Al-Qur'an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat,

⁷⁷Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*..., h. 46.

sadaqaah, hibah, wasiat dan sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan baik. Ada tiga instrumen dalam mengurangi perbedaan kekayaan masyarakat, yaitu:⁷⁸

- a. Parameter Positif atau wajib (*Positive Measure*) yang terdiri atas zakat dan faraid (waris). Parameter ini untuk menjamin aliran minimal kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang kurang mampu.

Dimana parameter positif adalah parameter yang memerintahkan seorang muslim yang memiliki harta yang lebih untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Meskipun anjuran tersebut ditujukan kepada orang yang kaya akan tetapi tolong menolong kepada orang lain dalam hal kebaikan juga dianjurkan untuk semua muslim. Karena dengan memberikan sebagian harta kita kepada orang lain itu berarti telah membersihkan harta kita dari hal yang tidak baik (bathil).

- b. Parameter Sukarela (*Voluntary Measure*) yang terdiri dari infaq, sedekah dan wakaf. Instrumen ini mampu mendorong lebih terdistribusinya aset dan kekayaan dimasyarakat sehingga (*Voluntary Measure*) bisa menjadi alternatif pendanaan pembangunan daerah.

Maksud dari parameter sukarela adalah ajuran dalam Islam mendistribusikan harta yang kita miliki yaitu dengan cara berinfaq, bersedekah, dan wakaf. Dalam Islam menganjurkan untuk melakukan pendistribusian harta sehingga perputaran harta tersebut tidak hanya pada segelintir orang saja. Adanya pendistribusian tersebut selain kita bisa

⁷⁸ *Ibid*, h 47.

membantu oranglain dengan niat beribadah mencapai ridha Allah SWT, pendistribusian harta juga bisa membantu laju pertumbuhan perekonomian dalam kegiatan pembangunan ekonomi diwilayah tersebut.

- c. Parameter Larangan (*Prohibitive Measure*) yang terdiri dari larangan riba dan kezaliman ekonomi. Instrumen yang masuk dalam kategori ini adalah praktik-praktik kezaliman ekonomi, seperti penipuan, riba dan penimbunan. Instrumen ini dapat menyebabkan distorsi dan ketidak seimbangan pasar, sehingga membahayakan stabilitas perekonomian. Akibatnya, peta kekayaan akan menunjukkan konsentrasi pada golongan tertentu dan menciptakan jurang kesenjangan yang semakin dalam dan melebar.⁷⁹

Islam memang tidak mengharuskan persamaan dalam kepemilikan kekayaan, namun Islam tidak membiarkan buruknya distribusi kekayaan. Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh. Sebagai buktinya, banyak sekali ayat Al-Quran dan al-Hadits yang memerintahkan manusia menginfakkan harta dan memberi makan orang-orang fakir, miskin, dan kekurangan. Islam mencegah berputarnya harta kekayaan hanya di kalangan orang-orang kaya, sementara kelompok lainnya tidak memperoleh bagian.⁸⁰ Allah SWT berfirman dalam (Q.S Al-Hasyr: 7):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَالْأَمْرِ الْمُنْتَهَىٰ وَلِلرَّسُولِ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّارِ عَلَىٰ أَعْقَابِ مَا
يُؤْتِي اللَّهُ مَالَهُ يَتَّقُوا اللَّهَ وَأَتُوا الْوَسِيلَ أَعْنَاهُ نَهَيْكُمْ وَمَا فَخَذُوا الرَّسُولُ أَتَانَكُمْ وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَةٍ يُكُونُ لَا كَ

الْعِقَابِ شَدِيدٍ

⁷⁹Ibid, h. 48.

⁸⁰Ibid.

Artinya: *“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”*.⁸¹

Munthe (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dalam pandangan sistem ekonomi Islam, buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat itulah yang membuat timbulnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.⁸² Isu-isu ketimpangan pendistribusian pendapatan dan kekayaan di Indonesia, kritik terhadap distribusi dalam ekonomi kapitalis dan diakhiri dengan telaah terhadap distribusi ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif serta mekanisme distribusi dalam Islam sebagai solusi menuju keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Kebebasan yang dimaksudkan Munthe (2014) di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan. tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antar suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat (Al-Hasyr: 7) agar harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada

⁸¹Departemen Agama RI, *Al-Haramain (Al-Quran dan Terjemahannya)*, Semarang: CV Toha Putra, 2007, h. 1072.

⁸²Marabon Munthe, *Konsep Distribusi Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah STEI Annisa Pekanbaru, (2014) Vol. 2, No. 1, h. 71-79.

kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah agar kesejahteraan masyarakat pun terpenuhi.⁸³

C. Tinjauan PDRB Perkapita

1. Definisi PDRB Perkapita

Peningkatan nilai tambah dari suatu bahan baku (*input*) menjadi produk (*output*) menunjukkan adanya perkembangan perekonomian suatu wilayah. Dalam statistik neraca nasional, perkembangan nilai tambah yang diciptakan oleh berbagai sektor ekonomi seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan, jasa-jasa dsb, dicatat dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto. Dengan demikian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh nilai tambah (*value added*) produksi barang dan jasa dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan

⁸³Anita Rahmawati, *Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, (2013), h. 7-8.

nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.⁸⁴

Mulai tahun 2015 perhitungan PDRB atas dasar harga konstan yang mula-mula didasarkan pada harga konstan 2000 diubah dengan harga konstan yang didasarkan pada harga-harga pada tahun 2010. Karena menggunakan harga konstan (tetap), maka perkembangan agregat dari tahun ketahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil dari kuantum produksi dan sudah tidak mengandung fluktuasi harga (*inflasi/deflasi*). Dengan penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi riil dapat dihitung.⁸⁵

Menurut Departemen Statistik ekonomi dan Moneter dari Bank Indonesia (2018) definisi PDRB perkapita adalah pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah yang diperoleh dengan caramembagi total PDRB dengan jumlah penduduk di wilayahbersangkutan.PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per satu orang penduduk. Dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Harga berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan. Dan harga konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar. Sedangkan tahun dasar adalah tahun terpilih sebagai

⁸⁴Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Lampung*, 2018, h. 12 (On-line) tersedia di: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/2018.html> (31 januari 2019).

⁸⁵*Ibid.*

referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar perhitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan atau pergerakan yang terjadi. Dan dalam penelitian ini data publikasi yang digunakan adalah harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.⁸⁶

Berdasarkan uraian diatas, pengertian PDRB per kapita adalah pendapatan per kapita penduduk di suatu wilayah yang diperoleh dengan caramembagi total PDRB dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Dimana PDRB per kapita didasarkan pada harga atas harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per satu orang penduduk. Dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

2. Metode Perhitungan PDRB perkapita

Metode perhitungan PDRB per kapitasecara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu sebagai berikut:⁸⁷

a. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, (2) pertambangan dan

⁸⁶*Ibid*, h. 13.

⁸⁷*Ibid*, h. 17.

penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa-jasa pemerintahan).

b. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dari lembaga swasta nirlaba, kemudian yang ke (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik regional bruto, (4) perubahan inventori dan (5) ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).

c. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).⁸⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari peningkatan presentase PDB (nasional) maupun PDRB (kabupaten/provinsi). PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi sedangkan, PDRB

⁸⁸*Ibid.*

atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode. Dalam perhitungannya terdapat tiga pendekatan untuk menghitung angka-angka PDRB yaitu dengan pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran. Apabila terjadi kenaikan presentase nilai PDB/PDRB maka akan mempengaruhi perubahan pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun kabupaten/provinsi.

3. Manfaat Perhitungan PDRB perkapita

Manfaat-manfaat dari hasil perhitungan PDRB adalah sebagai berikut:⁸⁹

- a. Untuk bahan evaluasi pembangunan di masa lalu secara keseluruhan.
- b. Untuk bahan umpan balik terhadap perancangan pembangunan yang telah dilaksanakan.
- c. Untuk dasar pembuatan proyeksi perkembangan perekonomian di masa yang akan datang.
- d. Untuk memantau perkembangan inflasi berdasarkan perubahan harga.
- e. Untuk membandingkan peranan masing-masing sektor di wilayah.
- f. Jika perhitungan PDRB dihubungkan dengan banyak tenaga kerja, maka dapat mencerminkan produktivitas tenaga kerja masing-masing sektor.
- g. Untuk bahan perencanaan investasi di masa yang akan datang.

4. Hubungan PDRB Perkapita dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

⁸⁹*Ibid*, h. 18.

Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dengan kenaikan dari PDRB per kapita tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertambahan penduduk.⁹⁰ Menurut Todaro, laju pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memperburuk distribusi pendapatan. Di dalam bukunya Todaro mengemukakan karakter pertumbuhan ekonomi (*character of economic growth*) yaitu bagaimana cara mencapainya, siapa yang berperan serta, sektor-sektor mana saja yang mendapat prioritas, lembaga-lembaga apa yang menyusun dan yang mengatur, dan sebagainya. Karakter pertumbuhan ekonomi ini yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin atau tidak. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk.⁹¹

Mengikuti Hipotesa Neo-Klasik variabel yang dapat digunakan sebagai variabel independen adalah pendapatan perkapita (PDRB perkapita) yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut, apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan masyarakat sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah menurun. Harapan

⁹⁰Lincoln Arsyad, *Pengantar perencanaan....*, h. 67.

⁹¹*Ibid*, h. 80.

pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Ketika pendapatan per kapita meningkat dan merata maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta dan ketimpangan wilayah akan berkurang. Ada teori yang mengatakan bahwa ada *trade off* antara ketidakmerataan dan pembangunan wilayah. Namun kenyataan membuktikan ketidakmerataan di Negara Sedang Berkembang (NSB) dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah, sehingga di banyak NSB tidak ada *trade off* antara pembangunan ekonomi wilayah dan ketidakmerataan.⁹²

Secara keseluruhan total PDRB per kapita yang meningkat di suatu wilayah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pula di wilayah tersebut sehingga ketimpangan pembangunan antarwilayah akan menurun.

5. PDRB Per Kapita Dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan di suatu wilayah bisa dilihat dari suatu indikator yang disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita. Kesejahteraan di suatu wilayah akan meningkat apabila tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut juga tinggi. PDRB Perkapita atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Banyak ahli ekonomi yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja. Selain dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas

⁹²Sutarno dan Mudrajat Kuncoro, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan....*, h. 57.

menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhandan kemajuan sisi material dan spiritual manusia.⁹³

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaandan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Ekonomi Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.⁹⁴ Allah SWT berfirman dalam (QS. Nuh: 10-12):



وَبَيْنَ بَأْمَالٍ وَيُمْدِدْكُمْ ۖ مَدْرَارًا عَلَيْكُمْ السَّمَاءُ يُرْسِلُ ۖ غَفَارًا كَانَ ۖ إِنَّهُ رَبُّكُمْ أَسْتَغْفِرُ وَأَقُولُ
أَنَّهُ رَبُّكُمْ وَتَجْعَلُ جَنَّتْ لَكُمْ وَتَجْعَلُ

Artinya: “Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun,niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,dan membanyakkan harta dan

⁹³Dio Syahrullah, *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten tahun 2009-2012*, Skripsi, Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2014, h. 18.

⁹⁴*Ibid.*

anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.”⁹⁵

Dijelaskan pula dalam firman Allah (QS. Al-A'raaf :96):

مَا فَاخَذْنَاهُمْ كَذِبًا وَلَكِنَّ الْأَرْضَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَاتِ عَلَيْنَا لَفَتَحْنَا وَاتَّقُوا أَمْنُوا الْقُرَى أَهْلَ أَنْ وَلَوْ
يَكْسِبُونَ كَانُوا بِمِ

Artinya: “Dan Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), Maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.”⁹⁶

Dari uraian tersebut dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita dapatkan selama kita istiqomah dalam melakukan istighfar (meminta ampunan kepada Allah SWT). Allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut mau untuk menjauhi segala larangan-Nya (kemaksiatan) dan menjalani segala apa yang diperintahkan-Nya (ketakwaan dan keimanan). Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat tidak taat kepada Allah SWT, maka tidak akan diperoleh ketenangan dan stabilitas kehidupan. Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang terus-menerus dari faktor-faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan.⁹⁷ Dalam Islam, kesejahteraan tersebut dapat

⁹⁵Departemen Agama RI, *Al-Haramain (Al-Quran dan Terjemahan)*, Semarang: CV Toha Putra, 2007, h. 1145.

⁹⁶Departemen Agama RI, *Al-Haramain (Al-Quran dan Terjemahan)*, Semarang: CV Toha Putra, 2007, h. 231.

⁹⁷Dio Syahrullah, *Analisis Pengaruh (PDRB)....*, h. 22.

dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi dapat dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk.

D. Tinjauan Investasi

1. Definisi Investasi

Investasi menurut Sadono Sukirno adalah pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.⁹⁸ Manurung mendefinisikan investasisebagai pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal (*capital stock*).⁹⁹ Sedangkan menurut Sayekti investasi adalah sebagai pengeluaran pengeluaran untuk membeli barang-barang dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.¹⁰⁰

Investasi merupakan salah satu faktor yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi di semua sektor ekonomi. Untuk

⁹⁸Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*...., h. 121.

⁹⁹Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikroekonomi & Makroekonomi Edisi Ketiga*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 270.

¹⁰⁰Sayekti Suindyah, *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur*, Jurnal Ekonomi, Vol.15No.4, Desember 2011, h. 477.

keperluan tersebut maka dibangun pabrik-pabrik, perkantoran, alat-alat produksi dan infrastruktur yang dibiayai melalui investasi baik berasal dari pemerintah maupun swasta. Sedangkan, Investasi yang dimaksudkan disini dapat berbentuk investasi swasta, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Luar Negeri (PMA), maupun investasi pemerintah yang disalurkan melalui anggaran pembangunan nasional dan daerah.¹⁰¹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dengan tujuan untuk mengganti, meningkatkan stock dan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa. Investasi berasal dari pemerintah maupun swasta dalam bentuk PMDN dan PMA, dan dimana investasi disini merupakan salah satu faktor untuk mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara atau wilayah.

2. Macam-macam Investasi

Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal dibagi menjadi 2 yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Penjelasan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah sebagai berikut:

a. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh

¹⁰¹Syafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*...., h. 125.

penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹⁰²

Investasi Asing merupakan investasi yang dilaksanakan oleh pemilik modal asing di dalam negeri kita untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usaha yang dilaksanakan itu. Investasi asing ini dapat berupa investasi langsung (*foreign direct investment*) atau investasi portofolio yaitu melalui pembelian saham perusahaan di dalam negeri (Indonesia). Keuntungan dari adanya investasi asing bagi kita ialah akan berupa diolahnya sumber daya alam kita, meningkatnya lapangan kerja dan terjadinya nilai tambah (*added value*), meningkatnya penerimaan negara dari sumber pajak, serta adanya alih teknologi.¹⁰³ Bagi pemilik modal asing, keuntungan mereka berupa aliran dividen dari hasil usaha itu dari negeri di mana modal itu ditanamkan ke negara dari mana modal itu berasal.

b. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Investasi dalam negeri biasa dikenal dengan istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Definisi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri

¹⁰²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 Ayat (1).

¹⁰³Irawan Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta : BPFE, 2002), h.142.

dengan menggunakan modal dalam negeri.¹⁰⁴ Modal dari dalam negeri ini bisa didapat dari pihak swasta ataupun dari pemerintah.

Menurut Harjono, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau asing yang berdomisili di Indonesia yang disediakan atau disisihkan guna menjalankan usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.¹⁰⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian PMA adalah investasi Asing yang dilakukan oleh pemilik-pemilik modal asing di Indonesia melalui pembelian saham perusahaan yang ada di Indonesia. Sedangkan PMDN adalah investasi yang dilakukan oleh penanam modal dengan menggunakan modal didalam negeri yaitu Indonesia. Dimana adanya investasi PMA dan PMDN bisa mendorong kegiatan pembangunan ekonomi disuatu wilayah dengan melakukan pemerataan alokasi investasi sehingga bisa mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

3. Tujuan Investasi

¹⁰⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 Ayat (2).

¹⁰⁵Harjono, D.K, *Hukum Penanaman Modal*, (PT.Raja Grafindo persada: Jakarta,2007), h. 178.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tujuan investasi (penanaman modal) adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika mengacu pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia, maka negara diwajibkan untuk menjamin ketersediaan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Pada dasarnya jaminan ketersediaan lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan mengulirkan program-program investasi yang padat karya yang secara langsung dapat menyerap tenaga kerja. Bukan lebih berpihak pada pengembangan investasi di sektor (jasa) yang padat modal dan

¹⁰⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (2).

minim tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi yang seharusnya diikutidengan menurunnya pengangguran tidak terjadi.¹⁰⁷

Dari tujuan-tujuan investasi diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan utama investasi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga bisa mengatasi penganguran, kemiskinan, dan cara pemanfaatan yang optimal dalam pengelolaan sumberdaya yang ada disuatu wilayah tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.

4. Teori-Teori Investasi

a. Teori Gunnar Myrdal Mengenai Dampak Balik

Pada pertengahan tahun 1950-an Gunnar Myrdal melontarkan tesis keterbelakangan di negara-negara berkembang. Tesis ini dikenal sebagai tesis aneka sebab (*cumulative causation*). Myrdal mengemukakan bahwa hubungan ekonomi antara negara-negara maju dengan negara-negara yang belum maju telah menimbulkan ketimpangan internasional dalam pendapatan per kapita dan kemiskinan di negara-negara yang belum maju. Faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ini adalah kemajuan ilmu dan teknologi, kehadiran pasaran yang luas dan konsentrasi modal keuangan di negara-negara maju. Sebaliknya, rakyat di negara-negara berkembang mempunyai pendapatan per kapita yang rendah, tabungan yang rendah, pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat keterampilan yang rendah, kesehatan penduduk yang buruk dan tidak berkembangnya industri-industri rakyat akibat rendahnya harga barang-barang

¹⁰⁷Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*,(Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2013), h.220.

manufaktur yang diimpor. Dengan perkataan lain, hubungan ekonomi antara negara-negara maju dengan negara miskin menimbulkan efek gelombang surut (*backwash effect*) terhadap negara-negara miskin.¹⁰⁸

Menurut Myrdal, upaya untuk memberantas kemiskinan di negara-negara berkembang harus dilakukan melalui campur tangan pemerintah, terutama dalam mempengaruhi kekuatan pasar bebas. Dalam konteks internasional, Myrdal berpendapat bahwa teori keunggulan komparatif yang digunakan oleh pemikir-pemikir neo-klasik tidak dapat dijadikan petunjuk untuk proses alokasi sumber-sumber ekonomi. Harus ada perlindungan atas industri-industri rakyat yang belum berkembang dari persaingan dengan luar negeri. Sebagai tambahan terhadap tesis *cumulative causation* dan *backwash effect*, Myrdal juga mengemukakan pemikirannya mengenai prakondisi-prakondisi struktural yang harus dimiliki oleh negara-negara sedang berkembang dalam melaksanakan proses pembangunan. Argumentasi Myrdal dalam kaitan ini dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁰⁹

- 1) Sebagian besar rakyat di negara berkembang berada dalam situasi kekurangan gizi yang parah dan berada dalam kondisi yang menyedihkan baik dalam tingkat kesehatan, fasilitas pendidikan, perumahan dan sanitasi. Kondisi ini menghambat peningkatan produktivitas dan produksi nasional.
- 2) Adanya *social inequality* dalam kehidupan sosial-ekonomi yang mengakibatkan *social mobility* menjadi rendah. Terdapat situasi *free*

¹⁰⁸Pheni Chalid, *Teori dan Isu Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: CIDES, 2013), h. 28.

¹⁰⁹*Ibid*, h. 29.

competition yang kejam dan mematikan golongan penduduk yang lemah. Kondisi ini harus diubah sehingga menimbulkan *economic equality* agar social mobility menjadi lebih lancar dan sifat kompetisi menjadi lebih beradab dan wajar.

- 3) Adanya struktur sosial yang pincang sehingga alokasi sumber-sumber ekonomi yang produktif sangat banyak untuk keperluan memproduksi barang-barang konsumsi mewah (*conspicuous consumption*). Sementara itu golongan kaya yang menguasai sumber-sumber ekonomi cenderung untuk melarikan modal ke luar negeri karena merasa tidak aman di dalam negeri.

Dalam hal ini, Myrdal menganggap perlu dilaksanakan terlebih dahulu reformasi sosial untuk mengoreksi kondisi-kondisi tersebut. Myrdal berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses, sebab menyebabkan sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effect*) cenderung membesar dan dampak sebar (*spread effect*) semakin mengecil. Semakin kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di negara-negara terbelakang.¹¹⁰

Myrdal mendefinisikan dampak balik (*backwash effect*) sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi suatu ekonomi di suatu tempat, karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dalam istilah ini Myrdal memasukkan

¹¹⁰Jhingan ML, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*...., h. 40.

dampak migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab-musabab sirkuler antar faktor-faktor baik non ekonomi maupun ekonomi. Dampak sebar (*spread effect*) menunjuk pada momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Sebab utama ketimpangan regional menurut Myrdal adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara terbelakang.¹¹¹

Berdasarkan penjelasan teori Myrdal di atas, ketimpangan pembangunan bisa terjadi adanya faktor utama yaitu dampak balik dari wilayah-wilayah yang memonopoli keadaan pasar sehingga investasi terjadi pada wilayah yang kondisi ekonomi sudah baik sehingga alokasi investasi tidak merata dan hanya dinikmati beberapa wilayah. Monopoli tersebut dilakukan karena motif untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil investasi yang dilakukan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk mengendalikan keadaan pasar sehingga alokasi investasi bisa berjalan dengan baik dan investasi bisa terdistribusi secara merata sehingga akan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

b. Teori Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu bersamaan oleh Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Diantara mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama

¹¹¹ *Ibid*, h. 45-46.

dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis) sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi:¹¹²

- 1) Perekonomian bersifat tertutup.
- 2) Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan.
- 3) Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*).
- 4) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Teori ini Harrod-Domarmengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes, menitik beratkan pada peranan tabungan dan investasi sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam teori pertumbuhan Harrod-Domar, secara sederhana menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP ($\Delta Y/Y$) ditentukan oleh rasio tabungan nasional neto, s , dan rasio modal output nasional, e secara bersama. Secara lebih spesifik, teori menyatakan bahwa dengan tidak adanya campur tangan pemerintah maka tingkat pertumbuhan pendapatan nasional secara langsung atau positif akan berkaitan dengan rasio tabungan (yaitu, semakin besar bagian PDRB perekonomian yang dapat ditabung dan diinvestasikan, semakin besar pula pertumbuhan PDRB) dan berbanding terbalik atau negatif

¹¹²Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional*...., h. 49.

berkaitan dengan rasio modal output perekonomian (yakni, semakin tinggi c , semakin rendah pula pertumbuhan PDRB).¹¹³

Todaro mengemukakan bahwa terdapat tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang paling penting yaitu:

- a) Akumulasi modal, mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja.
- b) Pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan
- c) Kemajuan teknologi.

Akumulasi modal (*capital accumulation*) akan terjadi jika sebagian tertentu dari pendapatan sekarang ditabung dan diinvestasikan untuk meningkatkan output dan pendapatan di masa depan.¹¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa persyaratan utama pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah adanya akumulasi modal. Akumulasi modal yang dimaksudkan disini yaitu semua keseluruhan yang termasuk dalam bentuk tanah (lahan), peralatan fisik, sumber daya manusia maupun teknologi yang ditabung atau di investasikan untuk memperbesar suatu peningkatan pada PDRB di wilayah tersebut dan pendapatan masyarakat dikemudian hari. Investasi merupakan salah satu penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output, dalam hal ini juga secara otomatis akan meningkatkan input sehingga lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Adanya

¹¹³*Ibid*, h. 50.

¹¹⁴Michael Todaro, Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi*...., h. 170.

kesejahteraan kegiatan produksi yang meningkat seperti meningkatnya lapangan pekerjaan disuatu wilayah maka akan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

c. Model *Interregional Income*

Perluasan dari Model Basis Ekspor dapat dilakukan dengan memasukkan unsur hubungan ekonomi antar wilayah yang dikenal sebagai *Interregional Income Model* yang dikembangkan oleh Harry W. Richardson (1978). Berbeda dengan model basis ekspor yang mengasumsikan ekspor sebagai *exogenous variable*, maka dalam model *Interregional* ini, ekspor diasumsikan sebagai faktor yang berada dalam sistem perekonomian daerah bersangkutan *endogenous variable* yang fluktuasinya ditentukan oleh perkembangan kegiatan perdagangan antarwilayah.¹¹⁵

Selanjutnya, kegiatan perdagangan antardaerah tersebut dibagi atas barang konsumsi dan barang modal. Disamping itu, agar analisis menjadi lebih realistis, maka pada model antarregion ini memasukan pula unsur pemerintah yang ditampilkan dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah serta kegiatan investasi sesuai dengan prinsip teori ekonomi Keynes. Menurut model *interregional income*, pendapatan regional (PDRB) di suatu wilayah diperoleh dari penambahan konsumsi dan investasi dan pengurangan jumlah ekspor dikurangi dengan impor.¹¹⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah dikatakan meningkat jika adanya keseimbangan antara

¹¹⁵*Ibid*, h. 95.

¹¹⁶*Ibid*.

penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Selain itu juga adanya investasi yang disalurkan melalui kegiatan perdagangan antarwilayah yaitu ekspor dan impor sehingga diharapkan kondisi perekonomian di wilayah tersebut menjadi lebih baik.

d. Hubungan Investasi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Investasi berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal ini digambarkan dengan semakin banyaknya investasi yang masuk kedalam suatu wilayah akan meningkatkan output yang dihasilkan dan berakhir pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi semakin banyaknya investasi yang masuk ke suatu wilayah justru akan menyebabkan ketidakmerataan.¹¹⁷

Menurut Myrdal investasi cenderung menambah ketidakmerataan. Di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Selain itu Investasi khususnya investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini, kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah.¹¹⁸ Perbedaan inilah yang akan menyebabkan ketimpangan antar wilayah menjadi semakin lebar.

e. Investasi Dalam Ekonomi Islam

¹¹⁷Syafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*...., h. 87.

¹¹⁸*Ibid*, h. 89.

Konsep investasi dalam ajaran Islam tidak hanya sebagai ilmu pengetahuan tapi juga bernuansa spriritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Konsep investasi syariah diwujudkan dalam bentuk nonfinansial yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat juga menganjurkan untuk berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik maupun aspek keimanan sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas:

- 1) Memiliki akidah yang benar,
- 2) Ibadah dengan cara yang benar,
- 3) Memiliki akhlak yang mulia,
- 4) Intelektualitas yang memadai,
- 5) Mampu untuk bekerja atau mandiri,
- 6) Disiplin atas waktu,
- 7) Bermanfaat bagi oranglain.¹¹⁹

Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi lebih produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, investasi dalam Islam sangat penting bagi kepentingan dunia maupun akhirat.

¹¹⁹Adi Raharjo, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 1982-2003*, Tesis. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Baqarah : 261) :

عَفُوَ اللَّهِ حَبَّةً مِّائَةً سُنْبُلَةٍ كُلِّ فِي سَنَابِلٍ سَبْعَ أُنْبُتٍ حَبَّةٌ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يَشَاءُ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹²⁰

Ayat ini merupakan informasi tentang pentingnya investasi meskipun tidak secara kongkrit berbicara investasi, karena yang termasuk menyampaikan tentang betapa beruntungnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ayat ini jika dibaca dari perspektif ekonomi jelas akan mempengaruhi kehidupan kita di dunia. Bayangkan jika banyak orang yang melakukan infak maka sebenarnya ia menolong ratusan, ribuan, jutaan bahkan milyaran orang miskin di dunia untuk berproduktifitas ke arah yang lebih baik.¹²¹

Dalam melakukan investasi menurut Metwally dalam Khairina Tambunan, seorang muslim boleh memilih tiga alternative atas dananya, yaitu memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas (*midle cash*), memegang tabungannya

¹²⁰Departemen Agama RI, *Al-Haramain (Al-Quran dan Terjemahannya)*, Semarang:CV Toha Putra, 2007, h. 33.

¹²¹Sakinah, *Investasi Dalam Islam*, Iqtishadia, Vol. 1 No. 2 (Desember 2014), h. 252.

dalam bentuk asset tanpa memproduksi seperti deposito, real estate, permata atau menginvestasikan tabungannya seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional.¹²²

Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. Perbedaannya karena investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga, hal ini tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Islam melarang pembayaran bunga pada semua jenis pinjaman (pribadi, komersial, pertanian, industri, dan lainnya) walaupun pinjaman-pinjaman ini dilakukan untuk teman, perusahaan swasta maupun publik, pemerintahan atau entitas lainnya.¹²³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menginvestasikan tabungan yang kita miliki dengan jalan infaq sebagai bentuk ibadah untuk mencari ridha Allah SWT sangat membantu oranglain yang membutuhkan sekaligus juga sangat penting dalam mendorong kegiatan perekonomian yaitu pembangunan ekonomi.

E. Tinjauan Aglomerasi

Pembahasan tentang aglomerasi berkaitan erat dengan industri. Dimana aglomerasi merupakan istilah bagi terjadinya pemusatan kegiatan perekonomian (industri-industri) dalam suatu wilayah.

1. Definisi Industri

¹²²Khairina Tambunan, *Analisis Pengaruh Investasi, Operasi Moneter dan ZIS TerhadapPertumbuhan Ekonomi Indonesia*, At-Tawassuth, Vol. 1, No.1 (2016: 73-94), h. 74.

¹²³*Ibid*, h. 75.

Industri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Sedangkan definisi industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.¹²⁴

Istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur (*manufacturing*). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, industri berarti kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin.¹²⁵ Sedangkan dari sudut pandang teori ekonomi mikro Hasibuan mendefinisikan industri sebagai kumpulan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang homogeny atau barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti yang sangat erat. Namun demikian, dari sisi pembentukan pendapat secara makro, industri diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah.¹²⁶ Proses industri harus dipandang sebagai suatu peningkatan terus-menerus yang dimulai dari sederet siklus yang diawali dengan adanya ide-ide untuk menghasilkan produk, pengembangan produk, proses produksi sampai pada distribusi kepada konsumen.¹²⁷ Dengan demikian, industri merupakan bagian dari proses produksi. Kegiatan proses produksi dalam industri inilah disebut

¹²⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Pasal 1 ayat (2).

¹²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), h. 534

¹²⁶Muhammad Teguh, *Ekonomi Industri*,(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 4.

¹²⁷Akhmad fauzy, *ekonomi industry* (Jakarta: pt. raja grafindo persada, 2013), h. 4.

perindustrian. Industri dapat digolongkan berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri tersebut dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu:¹²⁸

- a. Industri rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang.
- b. Industri kecil dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang.
- c. Industri menengah dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang.
- d. Industri besar dengan jumlah tenaga kerja kerjanya ≥ 100 orang.

Dari pengertian diatas dapat dipahami pengertian industri adalah keseluruhan kegiatan ekonomi yang mengolah sumberdaya industri untuk menghasilkan suatu produk yang bernilai jual sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Penggolongan industri menurut jumlah tenaga kerja disuatu wilayah dikategorikan menjadi beberapa kelompok yaitu industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah dan industri besar.

2. Definisi Aglomerasi

Pertumbuhan ekonomi antar daerah biasanya tidak akan sama. Terdapat daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi akan tetapi disisi lain ada puladaerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya rendah. Perbedaan daerah dilihat dari pendapatan maupun pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada munculnya aglomerasi, yaitu terpusatnya kegiatan-kegiatan ekonomi pada suatu daerah saja dan tidak terjadi persebaran yang merata. Menurut Montgomery, mendefinisikan aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktifitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan

¹²⁸Maninggar praditya, *Analisis Usaha Industri Gula Jawa Skala Rumah Tangga Di Kabupaten Wonogiri*, Skripsi, (Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, 2010), h. 28.

(*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen untuk meminimisasi biaya-biaya seperti biaya transportasi, informasi, dan komunikasi.¹²⁹

Menurut Robinson Tarigan, keuntungan berlokasi pada tempat konsentrasi atau terjadinya aglomerasi disebabkan faktor skala ekonomi (*economic of scale*) dan *economic of agglomeration*. *Economic of scale* adalah keuntungan karena dapat berproduksi berdasarkan spesialisasi sehingga produksi lebih besar dan biaya per unit lebih efisien. Sedangkan *economic of agglomeration* adalah keuntungan karena di tempat itu terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan oleh perusahaan. Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah sebab proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan konsentrasi kegiatan ekonomi rendah proses pembangunan akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, ketidakmerataan ini menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah.¹³⁰

Analisis aglomerasi industri menggunakan Indeks Balassa yaitu semakin tinggi nilai indeks balassa menunjukkan aglomerasi yang sangat kuat. Aglomerasi dikatakan kuat bila angka indeks balassa diatas 4, rata-rata atau sedang bila nilainya antara 2 dan 4, lemah bila nilainya diantara 1 sampai 2, sedangkan nilai 0 sampai 1 berarti tidak terjadi aglomerasi atau wilayah

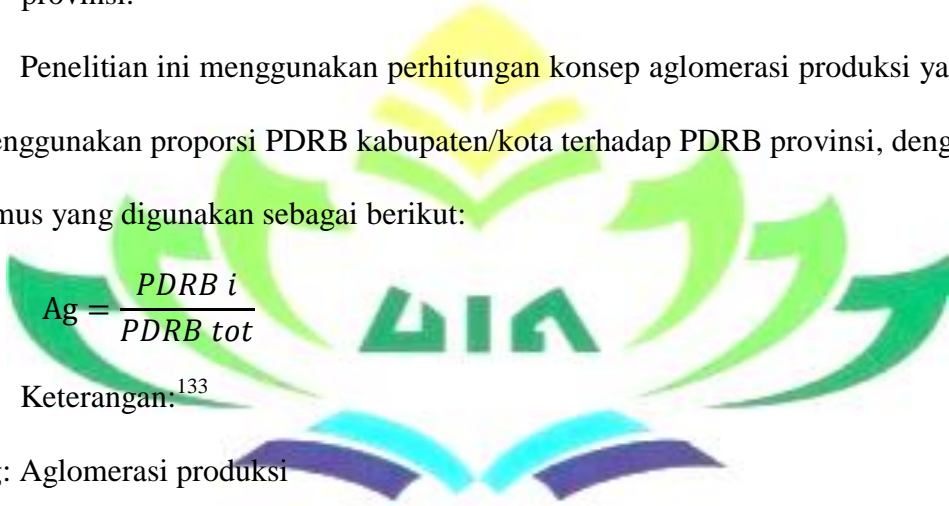
¹²⁹Yuki Angelia, *Analisis ketimpangan Pembangunan....*, h. 25.

¹³⁰Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional....*, h. 54.

tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif untuk terjadinya aglomerasi.¹³¹ Aglomerasi dapat diukur dengan beberapa cara, yaitu:¹³²

- a. Menggunakan proporsi jumlah penduduk perkotaan dalam suatu provinsi terhadap jumlah penduduk tersebut.
- b. Menggunakan konsep aglomerasi produksi yaitu menggunakan proporsi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi.
- c. Menggunakan konsep proporsi jumlah tenaga kerja sektor industri di kabupaten/kota terhadap jumlah tenaga kerja sektor industry dalam suatu provinsi.

Penelitian ini menggunakan perhitungan konsep aglomerasi produksi yaitu menggunakan proporsi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi, dengan rumus yang digunakan sebagai berikut:


$$Ag = \frac{PDRB\ i}{PDRB\ tot}$$

Keterangan:¹³³

Ag: Aglomerasi produksi

PDRBi: PDRB Atas Dasar Harga Konstan di kabupaten/kota i

PDRB_{tot}: Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi i

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian aglomerasi adalah pemusatan kegiatan perekonomian (industri-industri) dalam suatu

¹³¹Purwaningsih, *Tren Konsentrasi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aglomerasi Industri Manufaktur Besar Sedang Di Jawa Barat*, Tesis,(Program Studi Ilmu Ekonomi Di Sekolah Pascasarjana Institute Pertanian Bogor, Bogor, 2011), h. 17.

¹³²*Ibid.*

¹³³Ferry Kurniawan Lubis, *Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah....*, h. 61.

wilayah. Dimana konsentrasi kegiatan ekonomi antarwilayah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antarwilayah hal ini disebabkan sebab karena proses pembangunan wilayah akan lebih cepat pada wilayah-wilayah yang konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi.

3. Teori-Teori Aglomerasi

a. Teori Neo Klasik

Sumbangan terbesar dari teori neo klasik adalah pengenalan terhadap ekonomi aglomerasi dengan argumentasi bahwa aglomerasi muncul dari perilaku para pelaku ekonomi dalam mencari keuntungan aglomerasi berupa ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi. Asumsi yang digunakan oleh teori neo klasik adalah *constant return to scale* dan persaingan sempurna. Alfred Weber dikenal sebagai pendiri teori lokasi modern yang berkenaan dengan tempat, lokasi dan geografi dari kegiatan ekonomi. Minimisasi biaya yang dikombinasikan dengan bobot input-input yang berbeda dari perusahaan dan industri menentukan lokasi optimal bagi suatu perusahaan. Weber secara eksplisit memperkenalkan konsep ekonomi aglomerasi, skala efisien minimum, dan keterkaitan ke depan dan ke belakang. Konsep ini menjadi dasar berkembangnya teori perdagangan regional baru.¹³⁴

Dalam sistem perkotaan teori neo klasik, mengasumsikan adanya persaingan sempurna sehingga kekuatan sentripental aglomerasi disebut

¹³⁴Jamzani Sodik dan Dedi Iskandar, *Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional Di Indonesia*, jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007. h. 119.

sebagai ekonomi eksternal murni. Kekuatan sentripental muncul dari kebutuhan untuk pulang-pergi (*commute*) ke pusatbisnis utama dalam masing-masing kota yang menyebabkan suatu *gradien* sewa tanah dalam masing-masing kota. Menurut Krugman (1998), keterbatasan teori neo klasik diantaranya adalah melihat bahwa ekonomi eksternal yang mendorong adanya aglomerasi masih dianggap sebagai misteri (*blackbox*). Disamping itu sistem perkotaan neo klasik adalah non spasial yang hanya menggambarkan jumlah dan tipe kota tetapi tidak menunjukkan lokasinya.¹³⁵

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa aglomerasi bisa terjadi disuatu wilayah dikarena adanya pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki motif untuk mendapatkan keuntungan dalam kegiatan ekonomi yaitu keuntungan lokalisasi dan keuntungan urbanisasi. Keuntungan lokalisasi itu didapat dalam bentuk keseluruhan biaya produksi yang timbul akibat berlokasi secara terkonsentrasi dengan wilayah terkait lainnya dalam sebuah pusat pertumbuhan. Sedangkan keuntungan urbanisasi yaitu didapat dari keuntungan penggunaan fasilitas dalam sebuah pusat pertumbuhan secara bersamaan yang bisa menunjang kegiatan ekonomi diwilayah tersebut.

b. Teori Eksternalitas

Teori-teori eksternalitas dinamis percaya bahwa kedekatan geografis memudahkan transmisi ide, maka transfer teknologi merupakan hal penting bagi suatu wilayah. Teori eksternalitas dinamis didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Marshall-Arrow-Romer (MAR), Porter dan Jacob. Teori-

¹³⁵ *Ibid.*

teori ini mencoba menjelaskan secara simultan bagaimana membentuk kota dan mengapa kota tumbuh.¹³⁶

Eksternalitas Marshall-Arrow-Romer (MAR) menekankan pada transfer pengetahuan antarperusahaan dalam suatu industri. Menurut MAR monopoli lokal merupakan hal yang lebih dibandingkan dengan kompetisi lokal sebab lokal monopoli menghambat aliran ide dari industri lain dan diinternalisasi oleh innovator. Seperti halnya MAR, Porter mengatakan bahwa dengan transfer pengetahuan tertentu, konsentrasi industri secara geografis akan mendorong pertumbuhan. Berbeda dengan MAR, Porter menyatakan bahwa kompetisi lokal lebih penting untuk mempercepat adopsi inovasi. Tidak seperti MAR dan Porter, Jacob percaya bahwa transfer pengetahuan paling penting adalah berasal dari industri-industri inti. Variasi dan keberagaman industri yang berdekatan secara geografis akan mendukung inovasi dan pertumbuhan dibandingkan dengan spesialisasi secara geografis.¹³⁷

Dalam model eksternalitas teknologi, transfer pengetahuan antarperusahaan memberikan insentif bagi aglomerasi kegiatan ekonomi. Informasi diperlakukan sebagai barang publik dengan kata lain tidak ada persaingan dalam memperolehnya. Difusi informasi ini kemudian menghasilkan manfaat bagi masing-masing perusahaan. Dengan mengasumsikan bahwa masing-masing perusahaan menghasilkan informasi yang berbeda-beda, manfaat interaksi meningkat seiring dengan jumlah perusahaan. Karena interaksi ini informal, perluasan pertukaran informasi menurun dengan meningkatnya

¹³⁶*Ibid.* h. 120.

¹³⁷*Ibid.*

jarak. Hal ini memberikan insentif bagi pengusaha untuk berlokasi dekat dengan perusahaan lain sehingga menghasilkan aglomerasi.¹³⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam aglomerasi pengetahuan teknologi di suatu wilayah berperan penting dalam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada sektor-sektor industri. Dengan adanya teknologi maka masyarakat lebih kreatif dalam melakukan inovasi pada usaha kegiatan ekonominya. Namun hal itu terkadang terhambat adanya monopoli lokal dibandingkan persaingan dalam lokal.

c. Teori Ekonomi Geografi Baru (*The New Economic Geography*)

Teori ekonomi geografi baru berupaya untuk menurunkan efek-efek aglomerasi dari interaksi antara besarnya pasar, biaya transportasi dan *increasing return* dari perusahaan. Dalam hal ini ekonomi aglomerasi tidak diasumsikan tetapi diturunkan dari interaksi ekonomi skala pada tingkat perusahaan, biaya transportasi dan mobilitas faktor produksi. Teori ekonomi geografi baru menekankan pada adanya mekanisme kausalitas sirkular untuk menjelaskan konsentrasi spasial dari kegiatan ekonomi (Krugman dan Venables dalam Martin & Ottaviano: 2001). Dalam model tersebut kekuatan sentripetal berasal dari adanya variasi konsumsi atau beragamnya *intermediate good* pada sisi produksi. Kekuatan sentrifugal berasal dari tekanan yang dimiliki oleh konsentrasi geografis dari pasar input lokal yang menawarkan harga lebih tinggi

¹³⁸Jamzani Sodik, dan Dedi Iskandar. *Agglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi*..., h. 120.

dan menyebarnya permintaan. Jika biaya transportasi cukup rendah maka akan terjadi aglomerasi.¹³⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa aglomerasi bisa terjadi pada suatu wilayah yang disebabkan oleh hasil produksi yang meningkat, adanya sektor ekonomi yang tinggi dan persaingan pasar tidak sempurna. Dimana ketiga faktor tersebut dianggap berperan penting dibandingkan pada pengaruh faktor hasil skala produksi yang konstan, persaingan pasar sempurna, dan keunggulan komperatif dalam perdagangan dan distribusi pada kegiatan perekonomian.

4. Keuntungan Aglomerasi

Keuntungan aglomerasi pada dasarnya merupakan kekuatan utama dari sebuah pusat pertumbuhan. Alasannya adalah karena aglomerasi dapat memberikan keuntungan eksternal baik dalam bentuk penurunan biaya atau peningkatan peluang pasar bagi para pengusaha yang beroperasi dalam pusat tersebut. Karena itu, dapat dikatakan bahwa bilamana keuntungan aglomerasi yang dapat dihasilkan oleh sebuah pusat pertumbuhan cukup besar, maka pusat tersebut akan dapat berkembang dengan pesat. Akan tetapi sebaliknya pusat tersebut akan sulit berkembang bilamana keuntungan aglomerasi yang dapat dihasilkan sangat terbatas atau tidak sama sekali.¹⁴⁰

Keuntungan aglomerasi baru dapat muncul bila terdapat keterkaitan yang erat antara kegiatan ekonomi yang ada pada konsentrasi tersebut baik dalam bentuk keterkaitan dengan *input* atau keterkaitan dengan *output*. Dengan

¹³⁹*Ibid*, h. 121.

¹⁴⁰Syafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*...., h. 147.

adanya keterkaitan ini akan menimbulkan berbagai bentuk keuntungan eksternal bagi para pengusaha, baik dalam bentuk penghematan biaya produksi, ongkos angkut bahan baku dan hasil produksi dan penghematan biaya penggunaan fasilitas karena beban dapat ditanggung bersama. Penghematan tersebut selanjutnya akan dapat menurunkan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha, sehingga daya saingnya menjadi semakin meningkat. Penurunan biaya inilah yang selanjutnya mendorong terjadinya peningkatan efisiensi dan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang berada dalam kawasan pusat pertumbuhan ekonomi tersebut. Menurut Isard, keuntungan aglomerasi meliputi tiga unsur utama, yaitu:¹⁴¹

- a. Keuntungan skala besar, merupakan keuntungan yang diperoleh dalam bentuk penurunan biaya produksi rata-rata per unit, karena produksi dilakukan dalam skala besar. Karena perusahaan berlokasi dalam suatu pusat pertumbuhan dimana didalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang saling terkait satu sama lainnya baik dari segi *input* maupun *output*. Yang kemudian akan menimbulkan daya tarik bagi investor untuk datang dan mengembangkan kegiatan produksi dalam pertumbuhan ekonomi.
- b. Keuntungan lokalisasi, adalah keuntungan dalam bentuk penghematan ongkos angkut, baik untuk bahan baku dan hasil produksi yang timbul karena berlokasi secara terkonsentrasi dengan perusahaan dalam sebuah pusat pertumbuhan. Keuntungan eksternal ini selanjutnya akan menjadi faktor pendorong pengembangan produksi dan sekaligus menjadi daya

¹⁴¹ *Ibid.* h. 148-149.

tarik yang cukup besar bagi industri lain untuk masuk dan berlokasi dalam pusat pertumbuhan ekonomi.

- c. Keuntungan urbanisasi, yaitu keuntungan yang muncul karena penggunaan fasilitas dalam sebuah pusat pertumbuhan secara bersama seperti: listrik, pergudangan, telepon, air minum, dan utilitas lainnya yang menunjang kegiatan operasi perusahaan. Alasan utamanya adalah karena penggunaan fasilitas, secara bersama akan dapat menurunkan biaya karena dapat ditanggung secara bersama.¹⁴²

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa keuntungan aglomerasi adalah terpusatnya kekuatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu saja. Dimana aglomerasi bisa terjadi apabila terdapatnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik keterkaitan *input* maupun *output*. Unsur-unsur dalam aglomerasi yaitu adanya keuntungan skala besar, keuntungan lokalisasi dan keuntungan urbanisasi.

5. Hubungan Aglomerasi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Menurut Sjafrizal, mengemukakan terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Konsentrasi ekonomi ini tercermin dalam kegiatan aglomerasi. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan

¹⁴²*Ibid.* h. 150.

masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bila mana konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.¹⁴³

Dalam model eksternalitas teknologi, transfer pengetahuan antarperusahaan memberikan insentif bagi aglomerasi kegiatan ekonomi. Informasi diperlakukan sebagai barang publik dengan kata lain tidak ada persaingan dalam memperolehnya. Difusi informasi ini kemudian menghasilkan manfaat bagi masing-masing perusahaan. Dengan mengasumsikan bahwa masing-masing perusahaan menghasilkan informasi yang berbeda-beda, manfaat interaksi meningkat seiring dengan jumlah perusahaan. Karena interaksi ini informal, perluasan pertukaran informasi menurun dengan meningkatnya jarak. Hal ini memberikan insentif bagi pengusaha untuk berlokasi dekat dengan perusahaan lain sehingga menghasilkan aglomerasi.¹⁴⁴

Aglomerasi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya. Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut maupun udara juga ikut mempengaruhi konsentrasi ekonomi. Ketiga, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jaime Bonet, dimana Bonet menganalisis pengaruh variabel aglomerasi produksi terhadap ketimpangan pendapatan regional. Hasil

¹⁴³Yuki Angelia, *Analisis ketimpangan Pembangunan....*, h. 88.

¹⁴⁴Jamzani Sodik, dan Dedi Iskandar. *Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi....*, h. 121.

penelitian Bonet menunjukkan bahwa antara aglomerasi produksi dan ketimpangan pendapatan regional terdapat hubungan positif dan signifikan pada $\alpha = 1\%$. Hal itu berarti setiap kenaikan tingkat aglomerasi produksi maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan regional.¹⁴⁵

Berdasarkan uraian diatas hubungan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan yaitu apabila konsentrasi kegiatan ekonomi hanya terjadi pada wilayah tertentu saja sehingga daerah lain akan menjadi daerah yang terbelakang dan hal inilah yang menyebabkan ketimpangan wilayah semakin tinggi. Dan adanya pengetahuan teknologi disuatu wilayah dalam aglomerasi berperan penting untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada sektor-sektor industri. Penyebab aglomerasi itu sendiri yaitu perbedaan sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah dan kondisi geografis.

6. Aglomerasi Dalam Ekonomi Islam

Manusia adalah khalifah dimuka bumi, Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini., Allah SWT memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, akhlak, maupun syariah. Begitupun dalam berekonomi, manusia diperintahkan oleh Allah SWT agar segala kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat membawa masalah baik untuk dirinya maupun oranglain. Didalam industri, proses

¹⁴⁵Jaime Bonet, *Fiscal Income Desentralization....*, h.6.

produksi dalam ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*Utility*) baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Sedangkan tujuan dari produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan mashlahah maksimum bagi konsumen. Tujuan tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya:¹⁴⁶

a. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat

Hal tersebut akan menimbulkan setidaknya dua implikasi, *pertama* produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan (*needs*) meskipun belum tentu merupakan keinginan (*want*) konsumen. *Kedua* kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi yang berlebihan bukan hanya menimbulkan alokasi sumber daya ekonomi dan kemubaziran (*wastage*), tetapi juga menyebabkan terkuras sumber daya ekonomi secara cepat.¹⁴⁷

Menurut Mannan proses produksi usaha kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menghasilkan barang dan jaa bagi kesejahteraan ekonomi mereka. Nilai persaudaraan jika diaplikasikan kedalam lingkungan ekonomi, akan melahirkan lingkungan kerjasama, bukan persaingan, penyebaran lebih luas atau “sosialisasi sarana produksi” bukan konsentrasi maupun eksploitasi sumber daya alam dan manusia lebih lanjut.¹⁴⁸

¹⁴⁶Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 233.

¹⁴⁷*Ibid*, h. 235.

¹⁴⁸Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pt:Rajawali Pers, 2010), h. 30.

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat (Al-Baqarah:22) :

مَزْرَقًا الثَّمَرَاتِ مِنْ بِيْهِ فَاَخْرَجَ مَّاءَ السَّمَاءِ مِنْ وَاَنْزَلَ بِنَاءً وَّالسَّمَاءِ فِرَاشًا لِّلْاَرْضِ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي
تَعْلَمُوْنَ وَاَنْتُمْ اَنْدَادُ اللّٰهِ تَجْعَلُوْا فَلَئِنْ

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.”*¹⁴⁹

Ayat diatas sudah jelas bahwa kita sebagai khalifah di muka bumi ini yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT berupa kekayaan alam yang sangat melimpah untuk dapat dipergunakan sebagai modal berproduksi untuk dapat diolah bagi kemaslahatan bersama.¹⁵⁰

- 1) Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya
- 2) Menyiapkan persediaan barang atau jasa dimasa depan
- 3) Pemenuhan sarana bagi kegiatan ekonomi sosial dan ibadah kepada Allah

Nilai universal lain dari ekonomi Islam tentang produksi adalah perintah untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi produksi dan memproduksi dan memanfaatkan *output* produksi pada jalan kebaikan dan tidak mendzalimi pihak lain dan tidak mengarahkan kepada kerusakan.¹⁵¹

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami secara keseluruhan bahwa pengelolaan sumber daya alam itu menjadi tanggungjawab kita sebagai

¹⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Haramain (Al-Quran dan Terjemahannya)*, Semarang:CV Toha Putra, 2007. h. 7.

¹⁵⁰Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), h. 102.

¹⁵¹*Ibid*, h. 103.

mahluk ciptaan Allah SWT yang ditunjuk sebagai khalifah (pemimpin) dimuka bumi. Pengelolaan sumber daya alam tersebut bisa menjadi modal produksi dalam kegiatan perekonomian disuatu wilayah serta dalam pengelolaan sumber daya alam harus terciptanya kemaslahatan (kesejahteraan) bagi masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan penelitian ini karena untuk memudahkan bagi peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya.¹⁵²

Dari penelitian terdahulu dibawah ini mempunyai persamaan dalam metode penelitiannya yaitu metode kuantitatif, sama-sama membahas tentang Ketimpangan Pembangunan Ekonomi dengan obyek penelitian berbeda. Dan terdapat perbedaan yaitu penelitian terdahulu menggunakan ekonomi konvensional sedangkan penulis dalam perspektif Ekonomi Islam dan menggunakan variabel yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 serta seberapa besar pula pengaruh faktor-faktor dalam ketimpangan pembangunan yaitu PDRB per kapita, Investasi dan Aglomerasi yang ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

¹⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta: 2016), h. 10.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Budiantoro Hartono	Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 1981-2005	Kuantitatif	Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Jawa Tengah dihitung menggunakan indeks Williamson selama periode 1981-2005 menunjukkan ketimpangan semakin melebar. Nilai investasi swasta perkapita, rasio angkatan kerja dan alokasi bantuan pembangunan daerah perkapita berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan perkapita ekonomi di Provinsi Jawa Tengah baik secara parsial maupun simultan. Peningkatan nilai investasi swasta yang berarti peningkatan kegiatan penanaman modal akan mengakibatkan kegiatan ekonomi dan peningkatan kemakmuran

				penduduk sehingga ketimpangan akan menurun.
2	Nurhayani, Siti Hodijah; Adi Bhakti	Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi danHubungannya Dengan Investasi di Provinsi Jambi tahun 2002 – 2014	Kuantitatif	Hasil penelitiannya berdasarkan Indeks Williamson,diketahui Provinsi Jambi pemerataan pembangunan berada antara 0,341 – 0,566,dan ketimpangan di Jambi tergolong menengah. Berdasarkan hasil uji korelasiPerson menunjukkan hubungan yang cukup lemah antara variabel disparitas denganPMDN, dengan arah positif, peningkatan PMA menyebabkan peningkatan disparitaspembangunan ekonomi di Provinsi Jambi, berdasarkan nilai signifikansi hasilnya tidak ada korelasi antara PMDN dan PMA.
3	Liolyta Damayanti	Analisis Dampak Aglomerasi terhadap Ketimpangan regional Pulau Jawa tahun 2009- 2013.	Kuantitatif	Hasil Studi penelitian menemukan bahwa berdasarkan hasil estimasi regresi data panel secara parsial mengindikasikan adanya hubungan negatif dan signifikan

				<p>yaitu peningkatan aglomerasi industri mampu memperbaiki ketimpangan regional di pulau Jawa (<i>spred effect</i>). Bentuk <i>spred effect</i> salah satunya adalah migrasi penduduk ke Kota-Kota besar (urbanisasi) dapat mengabsorsikan tenaga kerja yang terampil dan mengurangi pengangguran di wilayah terbelakang.</p>
4	<p>Kartika Dorcas Andini, Erfit, dan Edi Bhaktiar.</p>	<p>Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera tahun 2011-2015.</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Penelitiannya menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di di wilayah Sumatera cenderung mengalami penurunan, sedangkan ketimpangan pembangunan berkisar antara IW 0,406-0,446. Tingkat ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2012 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,876 dan terendah terjadi tahun 2014 di Provinsi lampung dengan angka 0,103. Dan hasil regresi data panel diketahui bahwa secara simultan</p>

				<p>investasi, belanja pemerintah, aglomerasi, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian, secara parsial investasi, belanja pemerintah, aglomerasi, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan.</p>
5	<p>Ferry Kurniawan Lubis</p>	<p>Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1990 – 2013</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menggunakan pendekatan PDRB per kapita relatif tingkat ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara selama 1990-2013 masih rendah. Sedangkan Hipotesis Kuznets belum berbentuk “U” terbalik pada wilayah ini. Berdasarkan hasil regresi, variabel PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi berpengaruh negative dan signifikan, variabel dummy desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh pada terhadap ketimpangan</p>

				<p>pembangunan wilayah di Sumatera Utara. Nilai Fhitung, disimpulkan bahwa keempat variabel independen yaitu PDRB perkapita, investasi, aglomerasi, dan dummy desentralisasi fiskal secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Utara.</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Kerangka Penelitian

Masalah ketimpangan merupakan permasalahan yang banyak dihadapi di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Salah satunya terdapat di wilayah Provinsi Lampung. Pembangunan ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah yang bersangkutan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan meningkatkan PDRB khususnya PDRB per kapita pada suatu wilayah. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Ketika pendapatan per kapita meningkat dan merata maka diharapkan terciptanya masyarakat yang sejahtera dan mengurangi ketimpangan. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah

pendapatan perkapita pada suatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan masyarakat.

Investasi merupakan salah satu yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin berkembang suatu daerah akan menarik investasi khususnya investasi swasta untuk masuk. Dalam teori Myrdal ketimpangan regional erat kaitannya dengan sistem kapitalis yang mementingkan motif laba. Dimana wilayah yang memiliki harapan laba tinggi akan lebih berkembang pesat karena mendorong banyaknya investasi yang masuk. Hal ini secara tidak langsung merugikan wilayah-wilayah terbelakang. Perbedaan yang terjadi ini akan semakin memperlebar ketimpangan antar wilayah.¹⁵³

Konsentrasi kegiatan ekonomi berupa aglomerasi belakngan ini banyak diterapkan oleh wilayah-wilayah termasuk Provinsi Lampung. Adanya aglomerasi diharapkan dapat menghemat biaya produksi sehingga akan memaksimalkan keuntungan yang didapat. Akan tetapi aglomerasi memiliki dampak yang kurang baik bagi ketimpangan wilayah. Dimana wilayah yang memiliki tingkat aglomerasi rendah akan semakin terbelakang. Oleh karena itu, aglomerasi cenderung meningkatkan ketimpangan wilayah.¹⁵⁴

Dalam sudut pandang Ekonomi Islam ketimpangan pembangunan yang terjadi pada suatu daerah dapat terjadi karena distribusi yang tidak seimbang, pemerataan pembangunan dan tingkat pertumbuhan tinggi tidak diimbangi dengan pengalokasian tenaga kerja hal tersebut dapat berimbas pada kemiskinan suatu

¹⁵³Yuki Angelia, *Analisis ketimpangan Pembangunan....*, h. 46.

¹⁵⁴*Ibid.*

daerah dan terjadinya kesenjangan pada daerah tersebut.¹⁵⁵ Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran maka hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel (terikat) dapat ditetapkan bahwa Ketimpangan Pembangunan Wilayah merupakan variabel (Y), dan PDRB per kapita sebagai variabel (X1), Investasi (PMA dan PMDN) sebagai variabel (X2), dan Aglomerasi sebagai variabel (X3). Dalam hal ini variabel PDRB per kapita, Investasi dan Aglomerasi yang akan di uji apakah berpengaruh terhadap variabel Ketimpangan Pembangunan Ekonomi menggunakan regresi berganda. Maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran teori dapat dilihat pada gambar 2.2:



H2

ANALISIS DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM BERDASARKAN
AL-QURAN

H3

H. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu dugaan jawaban yang paling memungkinkan walaupun masih harus dibuktikan dengan penelitian. Dugaan jawaban sementara ini pada prinsipnya bermanfaat membantu mahasiswa agar proses penelitiannya lebih terarah. Hipotesis dirumuskan dalam kalimat pertanyaan.¹⁵⁶ Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh PDRB per kapita, Investasi dan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 Secara Parsial.

¹⁵⁶Hariwijaya dan Triton, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008), h. 50.

Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di suatu wilayah oleh pemerintah dimana bertujuan untuk membawa pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah tersebut menjadi meningkat lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan ekonomi dapat dilihat dari seberapa besar pertumbuhan yang dicapai pada wilayah tersebut.

Mengikuti Hipotesa Neo-Klasik variabel yang dapat digunakan sebagai variabel independen adalah PDRB per kapita yang meunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut, apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik.¹⁵⁷ Akan tetapi masalah utama dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak terdistribusi secara merata yang menyebabkan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiantoro Hartono dengan judul “Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 1981-2005”. Hasil dalam penelitiannya menemukan bahwa analisis hasil regresi secara parsial lokasi bantuan pembangunan daerah perkapita berpengaruh positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Tengah.¹⁵⁸

¹⁵⁷Lincoln Arsyad, *Pengantar perencanaan.....*, h.67.

¹⁵⁸Budiantoro Hartono, *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jateng tahun 1981-2005*, Tesis, Megister Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan, 2008. h. 71.

Mengikuti teori Myrdal, teori ini mengemukakan bahwa ketidakmerataan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan wilayah disebabkan karena adanya dampak balik (*backwash effect*). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dampak balik pada suatu wilayah salah satunya adalah investasi.¹⁵⁹ Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurhayani, Siti Hodijah, dan Adi Bhakti yang berjudul “Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Investasi di Provinsi Jambi tahun 2002-2014”. Hasil yang diperoleh dalam penelitiannya adalah hasil uji korelasi secara parsial menunjukkan hubungan yang cukup lemah antara variabel disparitas dengan PMDN, dengan adanya arah positif, peningkatan PMA menyebabkan peningkatan disparitas pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi, namun, berdasarkan nilai signifikansi hasilnya tidak ada korelasi antara PMDN dan PMA di Provinsi Jambi.¹⁶⁰

Selanjutnya, konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi juga akan mempengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dalam teori Neo Klasik mengatakan aglomerasi terjadi akibat munculnya para pelaku-pelaku ekonomi dalam mencari keuntungan aglomerasi berupa ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi.¹⁶¹ Penelitian yang dilakukan oleh Liolyta Damayanti yang berjudul “Analisis Dampak Aglomerasi terhadap Ketimpangan regional Pulau Jawa tahun 2009-2013”. Hasil studi penelitian menemukan bahwa secara parsial

¹⁵⁹Yuki Angelia, *Analisis ketimpangan Pembangunan....*, h. 9.

¹⁶⁰Nurhayani, Siti Hodijah, Adi Bhakti, *Analisis disparitas Pembangunan Ekonomi dan Investasi di Jambi tahun 2002-2014*, Jurnal, Paradigma Ekonomika. Vol. 10. No. 2. Oktober 2015. h. 145.

¹⁶¹Jamzani Sodik, dan Dedi Iskandar. *Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi....*, h. 120.

mengindikasikan adanya peningkatan aglomerasi industri yang berpengaruh negatif dan signifikan dalam memperbaiki ketimpangan regional di pulau Jawa (*spread effect*).¹⁶²

Sehingga dari penjelasan teori dan penelitian terdahulu di atas tentang hubungan antara PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi secara masing-masing (parsial) terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah, maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Ho1: PDRB Perkapita, Investasi, dan Aglomerasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017 secara parsial.
- b. H1: PDRB Perkapita, Investasi, dan Aglomerasi berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017 secara parsial.
2. Pengaruh PDRB per kapita, Investasi dan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 Secara Simultan.

Menurut Syafrizal, ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, ekonomi konsentrasi kegiatan wilayah, alokasi dana pembangunan antarwilayah, sehingga kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Perbedaan kekayaan

¹⁶²Liolyta Damayanti, *Analisis Dampak Aglomerasi terhadap Ketimpangan regional Pulau Jawa tahun 2009-2013*, Jurnal, Ekonomi dan dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Vol. 5. No. 2, 2016, h. 2.

daerah ini yang pada akhirnya menimbulkan adanya wilayah maju (*developregion*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*).¹⁶³

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika Dorcas Andini, Erfit, dan Edi Bhaktiar, yang berjudul “Analisis dan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera tahun 2011-2015”. Hasil penelitiannya menemukan, berdasarkan hasil regresi data panel diketahui secara simultan investasi, belanja pemerintah, aglomerasi, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di wilayah Sumatera.¹⁶⁴

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ferry Kurniawan Lubis dengan judul, “Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1990-2013”. Hasil penelitiannya juga menjelaskan variabel PDRB per kapita, aglomerasi, investasi, dan dummy desentralisasi fiskal secara simultan berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.¹⁶⁵

Berdasarkan dari penjelasan teori dan penelitian terdahulu di atas tentang hubungan antara PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi secara bersama-sama (simultan) terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah, maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Ho2: PDRB PerKapita, Investasi, dan Aglomerasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017 secara simultan.

¹⁶³Syafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*...., h. 119.

¹⁶⁴Kartika Dorcas Andhiani, Erfit, Adi Bhaktiar. *Analisis pertumbuhan ekonomi*...., h. 32.

¹⁶⁵Ferry Kurniawan Lubis, *Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah*...., h. 24.

- b. H2: PDRB PerKapita, Investasi, dan Aglomerasi berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017 secara simultan.
3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017.

Pembangunan ekonomi dalam pandangan ekonomi islam menurut Ibnu Khaldun didasarkan atas dasar beberapa aspek yaitu meliputi semua aspek pembangunan manusia sehingga masing-masing variabel memperkaya variabel lain seperti Pemerintah (G), Syariah (S), Masyarakat (N), Kekayaan (W), Keadilan (j) sehingga bisa terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat antar wilayah yang satu dengan yang lainnya dan dengan adanya kesejahteraan masyarakat yang meningkat maka akan mengurangi tingkat ketimpangan di suatu wilayah tersebut.¹⁶⁶

Sedangkan menurut teori Yusuf Al-Qardhawi adanya pendistribusian yang baik adil dan merata di masyarakat dengan jalan secara syariah yaitu zakat, sadaqaah, hibah, wasiat dan sebagainya, akan mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi di masyarakat maupun dalam cangkupan antar wilayah.¹⁶⁷

Berdasarkan dari penjelasan teori di atas tentang pandangan Ekonomi Islam ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah, maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁶⁶ Omy Firliany Hanafiah, *Pengaruh Variabel-Variabel.....*, h. 45.

¹⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika.....*, h. 7.

- a. Ho3: Pandangan Ekonomi Islam tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017.
- b. H3: Pandangan Ekonomi Islam berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017.



A. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁶⁸ Adapun jenis dan sifat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

¹⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*...., h. 2.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu mengenai ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah.¹⁶⁹ Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara kuantitatif, data kuantitatif adalah informasi yang dinyatakan berupa satuan angka (numerik), bersifat diskrit (utuh) atau kontinyu (pecahan/interval).¹⁷⁰ Penelitian ini menggali data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2013-2017, yang terdiri dari data PDRB per kapita, Investasi, Aglomerasi, dan ketimpangan Pembangunan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Menggunakan metode data panel yaitu penggabungan data *time series* selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2013-2017 dengan data *cross section* yaitu 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.¹⁷¹ Karena dalam penelitian ini

¹⁶⁹Sumdi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 22.

¹⁷⁰*Ibid.*

¹⁷¹Moh. Prabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h.10.

memberikan gambaran tentang pengaruh dari PDRB per kapita, Investasi, dan Aglomerasi, terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah di Provinsi Lampung.

B. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan bersifat siap pakai.¹⁷² Data sekunder disini merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data PDB Indonesia atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2013-2017.
2. Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2013-2017.
3. Data Indeks Ketimpangan Antar Provinsi di Indonesia tahun 2007-2011.
4. Data Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Lampung tahun 2008-2012.
5. Data PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017.
6. Data Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017.
7. Data Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017.

¹⁷²*Ibid.*

8. Data PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk menghimpun secara selektif bahan-bahan yang dipergunakan didalam kerangka atau landasan teori, dan penyusunan hipotesis secara tajam.¹⁷³ Dokumentasi yaitu pengumpulan data dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian dari berbagai sumber antara lain buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini data dokumen yang di dapat penulis yaitu data-data ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Provinsi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung periode 2013-2017 dan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Lampung.

2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang digunakan selain menggunakan dokumentasi juga menggunakan kepustakaan. Teknik kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

¹⁷³Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2007), h. 191.

Penelitian kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini yaitu tentang penggunaan teori-teori yang ada untuk menganalisis data.¹⁷⁴

D. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷⁵ Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh laporan data PDRB per kapita, investasi, aglomerasi dan ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.¹⁷⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan sampel lima tahun yaitu dari tahun 2013-2017.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.¹⁷⁷ Adapun alasan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah data yang diterbitkan dari BPS Provinsi Lampung Periode 2013-2017.

E. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian, sedangkan operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu

¹⁷⁴Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Buana Press, 2015), h. 157.

¹⁷⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*..., h. 174.

¹⁷⁶Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*..., h. 81.

¹⁷⁷*Ibid.*

yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur(mengoperasionalkan) construct menjadi variabel penelitian yang dapatdituju. Sehingga memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukanreflikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama, atau mencobamengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik.¹⁷⁸Dalam penelitian ini digunakan dua jenis variabel penelitian, yaitu variabel terikat (*dependent variabel*) dan variabel bebas (*independent variabel*).

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel terikat adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain. Besarnya efek tersebut dilihat dari ada tidaknya, timbul-hilangnya, membesar-mengecilnya atau berubahnya variasi yang tampak akibat perubahan dari variabel lain.¹⁷⁹ Variabel dependen dalam penelitian ini adalah:

a. Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Y)

Ketimpangan pembangunan wilayah adalah perbedaan distribusi pembangunan ekonomi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan ekonomi wilayah.

2. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Dapat pula dikatakan variabel bebas adalah variabel yang

¹⁷⁸Husein Umar, *Metode Riset Bisnis panduan mahasiswa untuk melakukan riset*dilengkapi contoh proposal dan hasil riset bidang manajemen dan akuntansi Cetakan ke II, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2010), h. 233.

¹⁷⁹Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.62.

pengaruhnya terhadap variabel lain yang ingin diketahui.¹⁸⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas antara lain:

a. PDRB Per Kapita (X1)

PDRB per kapita adalah pendapatan per kapita (per orang) penduduk disuatu wilayah yang diperoleh dengan cara membagi total PDRB dengan jumlah penduduk di wilayah yang bersangkutan. Dimana yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010.

b. Investasi (X2)

Investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dengan tujuan untuk mengganti, meningkatkan stock dan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa. Investasi berasal dari pemerintah maupun swasta dalam bentuk PMDN dan PMA.

c. Aglomerasi (X3)

Aglomerasi adalah pemusatan kegiatan perekonomian (industri-industri) dalam suatu wilayah.

Tabel 3.1
Daftar Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Rumus	Skala Pengukuran Variabel	Referensi
PDRB per kapita (X1)	Total PDRB Kabuapten/Kota di Provinsi Lampung ADHK 2010	$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB } i}{\text{Jumlah Penduduk } i}$	Rasio (Rp)	BPS

¹⁸⁰ *Ibid*, h.63.

Investasi (X2)	Total Realisasi nilai Investasi PMA dan PMDN	Hasil penjumlahan Investasi PMA ditambah dengan PMDN	Rasio (Rp)	BPMD
Aglomerasi (X3)	Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung ADHK 2010	$Ag = \frac{PDRB\ i}{PDRB\ tot}$	Rasio (Rp)	BPS
Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Y)	Total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung ADHK 2010	$IW = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}{\bar{y}}}$	Rasio (Rp)	BPS

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Analisis regresi berganda biasa berupa garis lurus (linier) dan non linier. Sementara analisis regresi pada penelitian ini adalah regresi linier berganda yaitu regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen (X) yaitu PDRB per kapita, Investasi (PMA dan PMDN) dan Aglomerasi dan hanya satu variabel dependen (Y) yaitu Ketimpangan Pembangunan Wilayah.

1. Uji Asumsi Klasik

Alat yang digunakan adalah uji asumsi Klasik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah dalam data regresi. Uji asumsi Klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Ada empat pengujian dalam uji asumsi Klasik yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang berdistribusi normal. Metode yang baik yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kolmogrovmirnov* untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Uji *kolmogrovmirnov* adalah uji beda antara data yang di uji normalitasnya dengan data normal baku. Dengan pengambilan keputusan:

- 1) Jika $Sig > 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- 2) Jika $Sig < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.¹⁸¹

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas ditemukan oleh Ragner Frish tahun 1934. Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila terjadi multikolinieritas atau hubungan linier yang sempurna (*perfect*) atau pasti (*exact*) di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi, maka akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. Hasil output *Eviews* dapat dinyatakan dengan melihat *Contered VIF*, apabila nilai VIF

¹⁸¹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian....*, h. 52.

tidak lebih besar dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.¹⁸²

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (data *cross section*). Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu waktu atau ruang sebelumnya. Jika data tidak memiliki masalah autokorelasi maka persamaan tersebut baik atau layak. Jika $Obs*R-squared < 0,05$ maka asumsi ditolak, tapi jika $Obs*R-squared > 0,05$ maka asumsi diterima dan tidak ada autokorelasi.¹⁸³

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan pada periode pengamatan lainnya. Menurut Gujarati masalah heteroskedastisitas biasanya terjadi dalam data *cross section* dibandingkan dengan data *time series*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji *park* untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Uji *park* pada prinsipnya meregres *residual* yang dikuadratkan dengan variable bebas pada model, dengan ketentuan:¹⁸⁴

¹⁸²Mansuri, *Modul Pratikum Eviews 9*, (Jakarta: Universitas Borobudur, 2016), h. 31.

¹⁸³*Ibid*, h. 62.

¹⁸⁴Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 64.

- 1) Jika $t\text{-statistik} > t\text{-tabel}$ atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka ada heteroskedastisitas.
- 2) Jika $t\text{-statistik} < t\text{-tabel}$ atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak ada heteroskedastisitas.

e. Analisis Data Panel

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel dengan menggunakan program *Eviews 9*. Analisis data panel merupakan analisis data yang berstruktururut waktu (*time series*) sekaligus kerat lintang (*cross section*).¹⁸⁵ Menurut Wanner regresi panel merupakan sekumpulan teknik untuk memodelkan pengaruh peubah penjelas terhadap peubah respon pada data panel. Data panel dapat menjelaskan dua macam informasi yaitu: informasi *cross section* pada perbedaan antar subjek, dan informasi *time series* yang merefleksikan perubahan pada waktu. Maka jika kedua data tersebut tersedia maka data panel dapat digunakan. Keuntungan menggunakan analisis data panel antara lain:

- 1) Memberikan jumlah pengamatan yang besar pada penelitian, meningkatkan *degree of freedom* (derajat kebebasan), data memiliki variabelitas yang besar, mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas.
- 2) Dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan jika hanya menggunakan data *time series* atau *cross section* saja.

¹⁸⁵Moch. Dody Ariefianto, *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan E-Views*. (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 148.

- 3) Data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis jika dibandingkan dengan *cross section*.

Dalam model panel data, persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis dengan:¹⁸⁶

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 + \epsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N \dots$$

Dimana : N adalah banyaknya data *cross section*

Sedangkan persamaan model dengan *time series* adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \epsilon_i ; t = 1, 2, \dots, T \dots$$

Dimana : T adalah banyaknya data *time series*

Data panel merupakan gabungan dari *time series* dan *cross section* maka dapat diambil model yaitu:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \epsilon_i ; t \dots$$

$$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana :

N : banyaknya observasi

T : banyaknya waktu

N x T : banyaknya data panel

Secara umum terdapat dua model pendekatan dalam data panel yaitu model tanpa pengaruh (*common effect*) dan model dengan pengaruh (*fixed effect* dan *random effect*). Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM) karena jumlah N besar sedangkan T kecil.

¹⁸⁶ *Ibid.*

Selain itu data *cross section* dalam penelitian ini tidak dapat diambil secara acak oleh karena itu harus menggunakan asumsi *Fixed Effect Model*.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing-masing variabel independen yang terdiri atas PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah yang merupakan variabel dependennya. Uji t yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil dengan kriteria uji :

- 1) Jika $\text{sig} > 0,05$ maka H_0 diterima
- 2) Jika $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak¹⁸⁷

b. Uji F (Simultan)

Nilai statistik F adalah untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksudkan dalam persamaan regresi secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.¹⁸⁸

¹⁸⁷*Ibid*, h. 51.

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.¹⁸⁹

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Provinsi Lampung

Lampung adalah sebuah Provinsi Paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia, ibukotanya terletak di Bandar Lampung. Sebelah utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda, Sebelah Timur Laut Jawa dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Provinsi Lampung memiliki pelabuhan nelayan seperti pasar ikan di (Teluk Betung) Tarahan dan Kalinda di Teluk Betung. Sedangkan di Teluk Selaka adalah Kota Agung (Kabupaten Tanggamus), dan

¹⁸⁸Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian....*, h. 162.

¹⁸⁹*Ibid*, h. 45.

di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Pelabuhan Meringgai dan Ketapang. Di samping itu, Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudera Indonesia terdapat Pelabuhan Krui.¹⁹⁰

Adapun Visi Provinsi Lampung adalah: (Lampung Maju dan Sejahtera).

Sedangkan Misi Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
- 2) Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat, dan toleransi kehidupan beragama.
- 4) Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5) Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN.¹⁹¹

b. Sejarah Provinsi Lampung

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung

¹⁹⁰Badan Pusat Statistik, *Publikasi Lampung Dalam Angka 2017* (On-line), tersedia di: <http://www.bps.go.id.html> (diakses pada 5 maret 2019), h. 1.

¹⁹¹*Ibid*, h. 5.

merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara ini. Oleh karena itu pada zaman VOC daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda.¹⁹²

Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kota kembar Tanjungkarang dan Telukbetung. Provinsi Lampung memiliki populasi penduduk di tahun 2010 sebanyak 7.608.405 jiwa. Secara administrasi Provinsi Lampung memiliki limabelas Kabupaten/Kota, yang kemudian terbagi kepada beberapakecamatan. Dan secara umum adat masyarakat Lampung dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat adat Saibatin dan adat Pepadun.

c. Geografi Provinsi Lampung

Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dengan Bandar Udara utama adalah “Raden Inten II”, yaitu nama baru dari “Branti”, 28 Km dari Ibukota melalui jalan Negara Menuju Kota Bumi dan Lapangan Terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra. Secara geografi Provinsi Lampung terletak pada kedudukan di antara 105°45’-103° 48’ BT dan 3°45’-6°45’ LS. Daerah ini disebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah Timur dengan Laut Jawa.

¹⁹²*Ibid*, h. 7-8.

Kawasan bagian barat Provinsi Lampung merupakan daerah pegunungan sebagai rangkaian dari Bukit Barisan. Terdapat tiga buah Gunung yang tingginya lebih dari 2.000m diatas permukaan laut, yaitu Gunung Pesagi di Kabupaten Lampung Barat dengan ketinggian 2.239m, Gunung Tanggamus dengan tinggi 2.102m terletak di Kabupaten Tanggamus dan Gunung Tangkit Tebak dengan tinggi 2.115m terletak di Kabupaten Lampung Utara.¹⁹³

Secara topografi Daerah Lampung dapat dibagi dalam lima unit topografi yaitu: daerah topografis berbukit sampai bergunung, daerah topografis berombak sampai bergelombang, daerah dataran alluvial, daerah dataran rawa pasang surut, daerah river basin. Punggung sebelah barat Lampung adalah bagian dari bukit barisan yang merupakan geantiklinal dengan sinklinal yang terdapat di sebelah timurnya.

Hutan-hutan besar di dataran rendah dapat dikatakan sudah habis dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan pertanian, untuk para transmigran yang terus menerus memasuki daerah ini. Kayu-kayu hasil hutan di ekspor ke luar negeri. Dari literatur dan Peta Geologi Lampung dapat diketahui adanya bahan-bahan tambang (endapan mineral) diantaranya:¹⁹⁴

- 1) Minyak bumi
- 2) Uranium
- 3) Batu Bara Muda (Brown Coal)

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ Katalog BPS, *Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Produk 2016*, h. 5. (On-line) tersedia di: <https://lampung.bps.go.id/publication/2018.html> (4 Maret 2019).

- 4) Mineral Besi
- 5) Emas dan Perak
- 6) Marmer
- 7) Sumber Air Panas dan Gas Bumi

Lampung terletak di bawah 83 katulistiwa 5° Lintang Selatan beriklim tropis humid dengan angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya.

d. Sektor Ekonomi Provinsi Lampung

Masyarakat pesisir Lampung kebanyakan nelayan, dan bercocok tanam. Sedangkan masyarakat tengah kebanyakan berkebun seperti lada, kopi, cengkeh, kayu manis, dan masih banyak lagi. Provinsi Lampung fokus pada pengembangan lahan bagi perkebunan besar seperti kelapa sawit, karet, padi, singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, tebu, dan masih banyak lagi. Dan beberapa di daerah pesisir, komoditas perikanan seperti tambak udang lebih menonjol, bahkan untuk tingkat nasional dan internasional.

Selain dari hasil bumi, Provinsi Lampung juga merupakan kota pelabuhan karena Lampung merupakan sebagai pintu gerbang untuk masuk ke Pulau Sumatera. Dari hasil bumi yang melimpah tumbuhlah banyak industri-industri seperti di daerah Pesisir Panjang, daerah Natar, Tanjung Bintang, Bandar Jaya, dan Lain-lainya. Dari semua potensi-potensi yang dimiliki tersebut dapat mempengaruhi perekonomian salah satunya adalah dengan

cara meningkatkan iklim untuk dilakukanya investasi tidak hanya pada hasil bumi tapi juga dari sektor-sektor industri yang ada.¹⁹⁵

2. Gambaran Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh PDRB per kapita, investasi, dan aglomerasiterhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rentangwaktu mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (*software*) komputer *Eviews 9* dengan metode analisis *fixed effect model*. Oleh karenaitu, perlu dilihat bagaimana gambaran tentang perkembangan secara umum dari ketimpangan pembangunan wilayah, PDRB per kapita, investasi, dan aglomerasi yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

a. Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Dalam pembangunan wilayah salah satu masalah yang sering muncul adalah ketimpangan pembangunan wilayah. Ketimpangan wilayah ini terjadi dikarenakan perbedaan karakteristik antar wilayah yang menyebabkan satu atau beberapa wilayah yang lebih unggul atau maju dibandingkan wilayah lainnya.

Dalam pembahasan ini akan diperhatikan perkembangan rendah atau tingginya suatu ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Lampung dari tahun 2013-2017. Data yang digunakan untuk melihat ketimpangan pembangunan wilayah adalah data PDRB per kapita Kabupaten/Kota di

¹⁹⁵ *Ibid*, h. 9-10.

Provinsi Lampung atas dasar harga konstan tahun dasar 2010 dan jumlah penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil perhitungan ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung dengan menggunakan Indeks Williamson (IW) diperoleh Indeks ketimpangan Pembangunan di Provinsi Lampung tahun 2013-2017 sebagai berikut:



Tabel 4.1
Indeks Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Lampung
Tahun 2013-2017 (dalam desimal)

Tahun	Ketimpangan
2013	0.0009
2014	0.0009
2015	0.0005
2016	0.0002
2017	0.0002
Rata-Rata	0.0005

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah 2019

Ketimpangan pembangunan digunakan untuk menganalisis seberapa besar tingkat kesenjangan di provinsi Lampung yaitu dengan menggunakan perhitungan Indeks Williamson (IW), nilai angka Indeks yang semakin kecil atau makin merata dan bila semakin jauh dari angka nol menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar.

Kriteria untuk mengetahui tingkat ketimpangan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketimpangan tinggi jika $IW > 0,5$
- 2) Ketimpangan sedang jika $IW = 0,35-0,5$
- 3) Ketimpangan rendah jika $IW < 0,35$

Berdasarkan tabel 4.1 hasil dari perhitungan ketimpangan pembangunan di Provinsi Lampung menggunakan Indeks Williamson, pada tahun 2013 dan 2014 ketimpangan terjadi sebesar 0,0009 dimana ketimpangan tersebut tergolong pada ketimpangan rendah, sedangkan pada tahun 2015, 2016, dan 2017 ketimpangan yang terjadi relatif stabil berada pada angka dibawah 0,0010 yang tergolong masuk kepada ketimpangan rendah. Rata-rata ketimpangan pembangunan di Provinsi Lampung dari tahun 2013-2017 sebesar 0,0005 termasuk kedalam ketimpangan rendah menuju ketimpangan sedang.

Maka diperoleh gambaran umum ketimpangan pembangunan di Provinsi Lampung yang terjadi di Provinsi Lampung dari tahun 2013-2017 terus mengalami penurunan yang dikategorikan dalam ketimpangan rendah. Bahkan penurunan ketimpangan pembangunan di Provinsi Lampung setiap tahunnya terjadi relatif stabil dan hal ini menunjukan arah yang positif selama kurun

waktu 5 tahun, rata-rata ketimpangan pembangunan di Provinsi Lampung sebesar 0.0005 pertahun. Ini memberikan indikasi besarnya pengaruh ketimpangan pembangunan ekonomi terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

b. PDRB Perkapita

Tingkat kesejahteraan secara umum bisa ditunjukkan dari meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan perkapita di suatu wilayah menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan perkapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Apabila PDRB suatu daerah di bagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar konstan menunjukkan nilai pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah pada periode ke periode.

Adapun data PDRB per kapita di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013-2017 (dalam desimal)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Lampung Barat	0,1278	0,1336	0,1394	0,1451	0,1511
2. Tanggamus	0,1423	0,1489	0,1552	0,1614	0,1680
3. Lampung Selatan	0,2325	0,2432	0,2534	0,2639	0,2755
4. Lampung Timur	0,2365	0,2408	0,2493	0,2573	0,2669

5. Lampung Tengah	0,2866	0,2998	0,3129	0,3274	0,3417
6. Lampung Utara	0,2014	0,2117	0,2220	0,2321	0,2431
7. Way Kanan	0,1663	0,1737	0,1809	0,1881	0,1958
8. Tulang Bawang	0,2766	0,2879	0,2982	0,3103	0,3233
9. Pesawaran	0,2028	0,2116	0,2197	0,2282	0,2373
10. Pringsewu	0,1506	0,1576	0,1643	0,1709	0,1779
11. Mesuji	0,2666	0,2796	0,2921	0,3051	0,3190
12. Tulang Bawang Barat	0,2207	0,2305	0,2406	0,2511	0,2631
13. Pesisir Barat	0,1555	0,1618	0,1681	0,1754	0,1833
14. Bandar Lampung	0,2879	0,3022	0,3152	0,3293	0,3437
15. Metro	0,2002	0,2091	0,2180	0,2275	0,2371

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah 2019

Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada tahun 2013-2017 selalu mengalami peningkatan. Meskipun angka per kapita ini bersifat global tanpa melihat nilai tersebut benar-benar secara merata diterima oleh setiap individu di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, namun dengan melihat perkembangannya dapat diketahui adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung secara umum di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. PDRB per kapita di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada tahun 2015 tertinggi terdapat di Kota Bandar Lampung yaitu sebesar 0,2879. Dan terendah PDRB Per Kapita di tahun 2015 terdapat di kabupaten Lampung Barat sebesar 0,1278. Begitu dengan tahun-tahun selanjutnya yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 perkembangan PDRB per kapita terjadi secara fluktuatif yang menunjukkan perkembangan yang positif dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Selama periode tahun 2013-2017, PDRB per kapita Kabupaten/Kota masih berada di bawah PDRB per kapita Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa secara makro, rata-rata pendapatan penduduk Kabupaten/Kota masih di bawah rata-rata Provinsi Lampung. Akan tetapi perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan per kapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dalam upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah apakah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha yang bisa memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Meskipun demikian, dengan segala keterbatasan indikator PDRB Per kapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro dan tolak ukur tingkat kemakmuran suatu wilayah.

c. Investasi

Alokasi investasi merupakan faktor penting, Investasi yang masuk baik dari pemerintah maupun pihak swasta dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah. Investasi disini terdiri dari investasi swasta berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif meningkat selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan akan menarik para investor, khususnya pihak swasta untuk berinvestasi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Seperti pada kesimpulan inti dari teori yang dikemukakan oleh Myrdal, dimana di wilayah maju permintaan yang meningkat akan merangsang investasi sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Namun, adanya motif laba yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat pada wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba yang tinggi, sehingga menyebabkan wilayah-wilayah yang lainnya menjadi terbelakang (terlantar). Maka dari itu ketimpangan pembangunan wilayah berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Berikut ini tabel realisasi investasi PMDN dan PMA di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017:



Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi PMA dan PMDN				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Lampung Barat	0,0268	0,0269	0,0268	0,0268	0,0270
2. Tanggamus	0,0411	0,0413	0,0416	0,0417	0,0419
3. Lampung Selatan	0,0814	0,0815	0,0815	0,0825	0,0827
4. Lampung Timur	0,0835	0,0841	0,0840	0,0844	0,0846
5. Lampung Tengah	0,1145	0,1146	0,1147	0,1149	0,1152
6. Lampung Utara	0,0593	0,0593	0,0594	0,0596	0,0596
7. Way Kanan	0,0392	0,0395	0,0395	0,0396	0,0399

8. Tulang Bawang	0,0491	0,0493	0,0495	0,0495	0,0499
9. Pesawaran	0,0456	0,0456	0,0457	0,0460	0,0461
10. Pringsewu	0,0297	0,0298	0,0298	0,0298	0,0299
11. Mesuji	0,0311	0,0231	0,0312	0,0315	0,0317
12. Tulang Bawang Barat	0,0349	0,0349	0,0350	0,0351	0,0352
13. Pesisir Barat	0,0143	0,0143	0,0143	0,0144	0,0144
14. Bandar Lampung	0,1118	0,1118	0,1119	0,1120	0,1125
15. Metro	0,0202	0,0205	0,0206	0,0208	0,0208
Total Kab/Kota	0,7825	0,7765	0,7855	0,7886	0,7914

Sumber: BPMD Provinsi Lampung, diolah 2019

Dari tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan, Selama tahun 2013-2017 jumlah investasi swasta baik yang berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung mengalami perkembangan *trend* naik turun sesuai dengan minat investor dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 yang semula investasi PMA dan PMDN ditargetkan sebesar 1,2074 hanya terealisasi sebesar 0,7825 hingga tahun 2017 target investasi di tahun 2013 pun belum tercapai dan terealisasi sebesar 0,7914.¹⁹⁶

Investasi yang mengalami penurunan terjadi pada 3Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yaitu Lampung Barat, Lampung Timur, dan Mesuji. Kabupaten Lampung Baratdi tahun 2015 mengalami penurunan investasi, dimana pada tahun 2014 sebesar 0,0269 di tahun 2015 menjadi 0,0268 dan meskipun ada kenaikan nilai investasi di tahun 2016 namun mengalami penurunan kembali di tahun 2017.Pada Kabupaten Lampung Timur berturut-

¹⁹⁶Sakina Rakhma Diah Setiawan, *Ekonomi Indonesia.....*, h.14.

turut mengalami penurunan investasi pada tahun 2014-2016 tetapi mengalami kenaikan yang tinggi di tahun 2017 yaitu sebesar 0.0846. Sedangkan Kabupaten Mesuji mengalami penurunan investasi yang drastis pada tahun 2014.

Kabupaten/kota yang jumlah nilai realisasi investasinya tetap dalam dua tahun berturut-turut adalah Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Pesawaran dan Pringsewu. Sedangkan Kabupaten/Kota yang rata-rata mengalami kenaikan investasi dalam setiap tahunnya yaitu pada tahun 2013-2017. Kabupaten/Kota tersebut antara lain Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Pesawaran, Tulang Bawang Barat, Pringsewu, Pesisir Barat, Bandar Lampung, dan Metro.

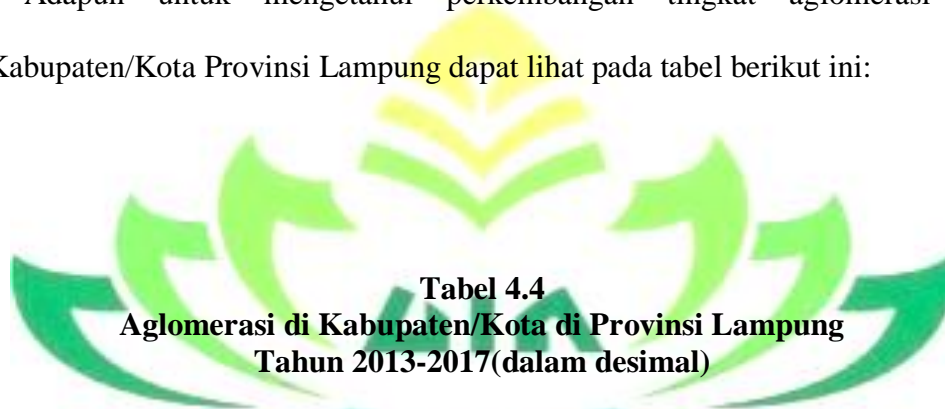
Meskipun dalam tingkat masing-masing pada setiap Kabupaten/Kota mengalami *trend* naik dan turun, namun jumlah total perkembangan realisasi investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung rata-rata mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Dan dalam hal ini *trend* naik turunnya investasi yang terjadi di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dapat menunjukkan adanya pengaruh investasi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

d. Aglomerasi

Aglomerasi di suatu wilayah timbul karena adanya pelaku ekonomi yang berusaha memperoleh penghematan aglomerasi baik karena penghematan urbanisasi maupun adanya penghematan lokalisasi dengan mengambil lokasi

yang saling berdekatan satu sama lain. Terjadinya aglomerasi memberikan dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari adanya aglomerasi yaitu berkembangnya industri-industri, terbentuknya industri baru, tersedianya jasa dan hiburan, maupun adanya perluasan jasa-jasa lokal dengan biaya per unit lebih rendah. Sedangkan dampak negatif dari rendahnya aglomerasi bagi wilayah/daerah yang bersangkutan yaitu membuat wilayah tersebut semakin terbelakang sehingga tidak ada lagi manfaat positif yang dapat diperoleh dari adanya aglomerasi.

Adapun untuk mengetahui perkembangan tingkat aglomerasi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.4
Agglomerasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Tahun 2013-2017(dalam desimal)

Nama Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017
1. Lampung Barat	0,0203	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204
2. Tanggamus	0,0441	0,0444	0,0446	0,0446	0,0446
3. Lampung Selatan	0,1224	0,1232	0,1235	0,1236	0,1239
4. Lampung Timur	0,1294	0,1267	0,1260	0,1249	0,1243
5. Lampung Tengah	0,1927	0,1938	0,1943	0,1951	0,1954
6. Lampung Utara	0,0668	0,0672	0,0674	0,0674	0,0674
7. Way Kanan	0,0389	0,0392	0,0392	0,0392	0,0392
8. Tulang Bawang	0,0639	0,0642	0,0642	0,0643	0,0645
9. Pesawaran	0,0467	0,0469	0,0469	0,0469	0,0468
10. Pringsewu	0,0316	0,0318	0,0318	0,0318	0,0317
11. Mesuji	0,0284	0,0286	0,0286	0,0286	0,0286

12. Tulang Bawang Barat	0,0317	0,0318	0,0319	0,0319	0,0321
13. Pesisir Barat	0,0126	0,0126	0,0126	0,0126	0,0126
14. Bandar Lampung	0,1501	0,1529	0,1547	0,1566	0,1582
15. Metro	0,0170	0,0171	0,0173	0,0174	0,0175

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.4, tingkat aglomerasi tertinggi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung terjadi pada tahun 2017 yaitu di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 0,1954 dan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 0,0126. Provinsi Lampung yang sebagian Kabupaten/Kotanya digunakan untuk sektor industri juga akan diuntungkan dengan adanya aglomerasi. Industri-industri yang berada di wilayah Provinsi Lampung yang terletak sebagian besar di Kabupaten/Kota Bandar Lampung, Lampung selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tanggamus, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur dan Tulang Bawang diuntungkan dengan adanya aglomerasi, karena membuat terkonsentrasinya kegiatan perekonomian pada Kabupaten/Kota tersebut dan akan menghemat biaya produksi, sehingga akan lebih menguntungkan bagi industri-industri yang terkait.

Aglomerasi ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan akan mendorong pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Di sisi lain dampak negatif terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi atau aglomerasi yang cukup tinggi pada Kabupaten/Kota tertentu di Provinsi Lampung jelas akan mempengaruhi

ketimpangan pembangunan wilayah. Dimana Kabupaten/Kota yang memiliki kekuatan Sebaliknya, bagi Kabupaten/Kota yang aglomerasinya relatif rendah akan mendorong munculnya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, adanya aglomerasi cenderung meningkatkan ketimpangan antarwilayah.

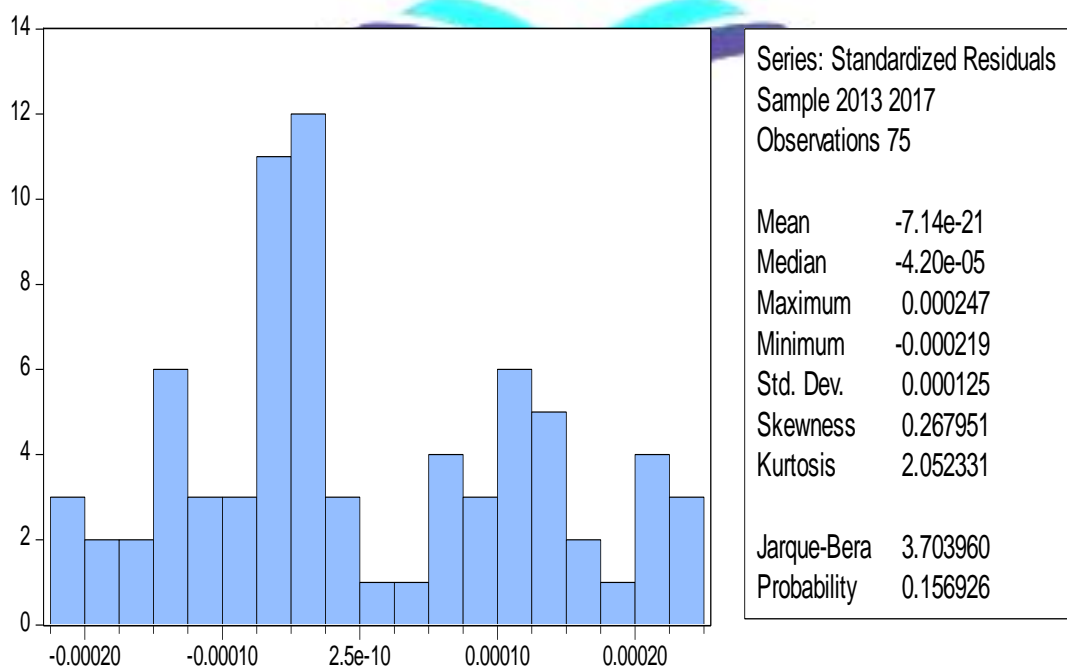
B. Hasil Analisis

1. Analisis Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak maka dilakukan uji *Jarque-Bera*. Hasil uji J-B test disajikan pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1
Hasil Uji Jarque-Bera



Sumber: Output Eviews 9, (Data sekunder diolah tahun 2019)

Berdasarkan gambar 4.1 hasil olahan data menggunakan program *Eviews 9*, diperoleh hasil bahwa nilai Jb (*Jarque-Bera*) sebesar 3,703960 >5%, sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan dalam suatu variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Adapun hasil dari pengolahan data adalah sebagai berikut:



Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

	PDRB_PERKAPITA	INVESTASI	AGLOMERASI
PDRB_PERKAPITA	1.000000	0.660841	0.661651
INVESTASI	0.660841	1.000000	0.686368
AGLOMERASI	0.661651	0.686368	1.000000

Sumber: Output Eviews 9, (Data sekunder diolah tahun 2019)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai *correlation matrix* (<0,8) yang berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas. Dengan terpenuhinya uji multikolinearitas

maka model regresi tidak ditemukannya korelasi linier yang sempurna antar variabel-variabel bebas.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu waktu atau ruang sebelumnya. Jika data tidak memiliki masalah autokorelasi maka persamaan tersebut baik atau layak. Dan jika $\text{Obs} \times \text{R-squared} < 0,05$ maka asumsi ditolak, tapi jika $\text{Obs} \times \text{R-squared} > 0,05$ maka asumsi diterima dan tidak ada autokorelasi. Hasil dari pengolahan data ditampilkan pada tabel berikut:



Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	95.01600
Obs*R-squared	55.02177

Sumber: Output Eviews 9, (Data sekunder diolah tahun 2019)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, Jika $\text{Obs} \times \text{R-squared} < 0,05$ maka asumsi ditolak, karena $\text{Obs} \times \text{R-squared} = 55,02177 > 0,05$ maka asumsi

diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* dalam pengamatan antara suatu periode ke periode yang lain. Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan uji *park* hasilnya pada tabel berikut ini:



Tabel 4.7
Hasil Uji *Park*

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 03/15/19 Time: 08:30

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 75

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	4.910683	3.518497	1.395676	0.1682
PDRB_PERKAPITA	0.000170	0.000299	0.567761	0.5724
INVESTASI	-0.001827	0.004289	-0.426036	0.6717
AGLOMERASI	-0.005622	0.004281	-1.313192	0.1944

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.039271	Mean dependent var	0.585081
Adjusted R-squared	-0.247262	S.D. dependent var	0.276511
S.E. of regression	0.308810	Akaike info criterion	0.693384
Sum squared resid	5.435734	Schwarz criterion	1.249581
Log likelihood	-8.001883	Hannan-Quinn criter.	0.915467
F-statistic	0.137055	Durbin-Watson stat	2.109507
Prob(F-statistic)	0.999977		

Sumber: Output Eviews 9, (Data sekunder diolah tahun 2019)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, hasil perhitungan dengan Eviews 9 yaitu uji *park* terlihat bahwa nilai dari probabilitas variabel independen (PDRB perkapita= 0,5724>0,05), (Investasi= 0,6717>0,05), dan (Aglomerasi= 0,1944>0,05) sehingga dapat disimpulkan tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik (probability >0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa lolos uji *park* dan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

2. Analisis Data Panel

Metode analisis data panel digunakan untuk menjelaskan dua macam informasi yaitu informasi *cross section* pada perbedaan antar subjek, dan informasi *time series* yang merefleksikan perubahan pada waktu. Model

regresi panel data dalam penelitian ini yaitu panel data dengan menggunakan *Fixed Effect Model*. Hasil Estimasi panel data dengan menggunakan *Fixed Effect Model* disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Prob.
C	0.002757	0.0942
PDRB_PERKAPITA	-0.021488	0.0000
INVESTASI	-0.009879	0.6183
AGLOMERASI	0.048176	0.0176
R-squared	0.844162	

Sumber: Output Eviews 9, (Data sekunder diolah tahun 2019)

Dari tabel 4.8 diatas yang dimana menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)* didapatkan hasil persamaan dalam penelitian ini sebagai berikut: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$

$$Y = 0.002757 - 0.021488X_1 - 0.009879X_2 + 0.048176X_3 + e$$

Dimana:

Y : Ketimpangan Pembangunan Wilayah

a : Konstanta

X1: PDRB per kapita

X2: Investasi

X3: Aglomerasi

e : *error term*

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jika variabel-variabel independen dianggap konstan atau bernilai nol, maka besarnya tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung secara keseluruhan adalah sebesar 0,27%.
- b. Nilai koefisien regresi variabel PDRB per kapita sebesar (-0.021488) yang berarti setiap terjadi peningkatan PDRB per kapita sebesar 1% maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sebesar 2,14%.
- c. Nilai koefisien regresi variabel investasi sebesar (-0.009879) yang berarti setiap terjadi peningkatan investasi sebesar 1% maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sebesar 0,98%.
- d. Nilai koefisien regresi variabel aglomerasi sebesar 0.048176 yang berarti setiap terjadi peningkatan aglomerasi sebesar 1% maka akan menaikkan tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sebesar 4,81%.

3. Analisis Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t-statistik menunjukkan pengaruh variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain adalah konstan. Pengaruh PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji t-Statistik

Variable	Coefficient	t-Statistic
C	0.002757	1.702220
PDRB_PERKAPIT		
A	-0.021488	-15.61556
INVESTASI	-0.009879	-0.500968
AGLOMERASI	0.048176	2.445440
R-squared 0.844162		

Sumber: Output Eviews 9, (Data sekunder diolah tahun 2019)

Berdasarkan tabel 4.9 maka sebelum menyimpulkan hipotesis mana yang diterima atau ditolak, terlebih dahulu menentukan t-tabel dengan signifikansi 5% berdasarkan uji 2 sisi dan derajat kebebasan (df) $n-1$.¹⁹⁷ (df) $n-1$ atau $75-1=74$. Dengan pengujian 2 sisi tersebut hasil yang diperoleh untuk t-tabel adalah 1,99254. Dari hasil t-statistik pada variabel PDRB per kapita menghasilkan nilai t-hitung sebesar (-15,61556) artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ($-15,61556 > 1,99254$). Dari hasil tersebut berarti bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga dengan hasil uji ini maka dapat dinyatakan bahwa PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomian antar wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017.

¹⁹⁷Mansuri, *Modul Pratikum Eviews 9*...., h. 32.

Pada hasil t-statistik pada variabel investasi menghasilkan nilai t-hitung sebesar (-0,500968) artinya t-hitung lebih kecil dari t-tabel (-0.500968 < 1,99254). Dari hasil tersebut berarti bahwa H1 ditolak dan Ho1 diterima sehingga dengan hasil uji ini dapat dinyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017.

Sedangkan variabel aglomerasi menghasilkan nilai t-hitung sebesar 2,445440 artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel (2,445440 > 1,99254). Dari hasil tersebut berarti bahwa H1 diterima dan Ho1 ditolak sehingga dengan hasil uji ini dapat dinyatakan bahwa aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017.

b. Uji F (Simultan)

Uji F (Simultan) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu PDRB per kapita (X1), investasi (X2), aglomerasi (X3) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan pembangunan wilayah (Y).

Dengan menentukan pengujian terlebih dahulu Ftabel berdasarkan signifikansi 5% (0,05) dimana rumusnya:¹⁹⁸

$$1) \text{ df1 (N1)} = k - 1$$

$$N1 = 4 - 1 = 3$$

¹⁹⁸Mansuri, *Modul Pratikum EvIEWS 9*...., h. 33.

$$2) \text{ df2 (N2)} = n - k$$

$$N2 = 75 - 4 = 71$$

Jadi nilai $N1=3$ dan $N2=71$, maka hasil yang diperoleh untuk F-tabel sebesar 2,73. Dari hasil regresi tersebut pengaruh PDRB per kapita, investasi, dan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017 diperoleh F-statistik pada tabel 4.6 sebesar 95,01600 yang artinya F_{hitung} lebih besar dari F-tabel ($95,01600 > 2,73$), maka H_2 diterima dan H_{02} ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB per kapita, investasi, dan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Berdasarkan tabel 4.9 hasil regresi menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 0,05 variabel PDRB per kapita (X_1), Investasi (X_2), dan Aglomerasi (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017. Hasil nilai Adjusted R -squared sebesar 0,844162 menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung mampu dijelaskan oleh tiga variabel independen PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi sebesar

84,41% sedangkan sisanya sebesar 15,59% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

4. Pembahasan

a. Pengaruh Secara Parsial PDRB Per Kapita, Investasi, dan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017

Pengaruh secara parsial merupakan pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen, yaitu untuk melihat pengaruh variabel PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah tahun 2013-2017, maka akan diuraikan penjelasan tersebut sebagai berikut:

1) Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi menunjukan bahwa hasil output *Eviews 9* nilai t-statistik pada variabel PDRB per kapita menghasilkan t-hitung sebesar (-15,61556) sedangkan hasil perhitungan t-tabel sebesar 1,99254. Asumsinya adalah t-hitung lebih besardari t-tabel ($-15,61556 > 1,99254$) dari hasil tersebut berarti bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. Maka hasil uji disimpulkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpanganpembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017. Hasil regresi tersebut tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang menduga tidak

terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB per Kapita dengan ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017.

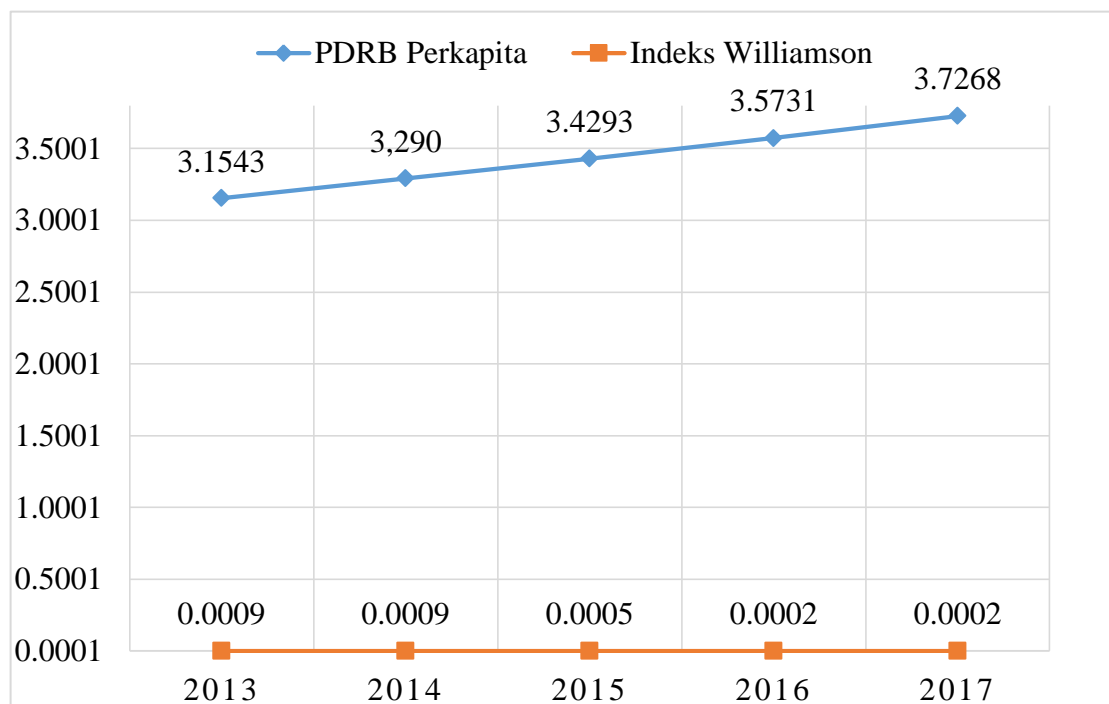
Sedangkan pada nilai koefisien regresi variabel PDRB per kapita sebesar (-0.021488) yang berarti setiap terjadi peningkatan PDRB per kapita sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sebesar 2,14%. Dimana dalam setiap peningkatan 1% PDRB per kapita tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan ketimpangan di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Dengan demikian hasil ini sejalan dengan penelitian Ferry Kurniawan Lubis yang menyatakan bahwa PDRB perkapita secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta tahun 1995-2008. Dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiantoro Hartono yang menyatakan bahwa secara parsial alokasi bantuan dana pembangunan daerah perkapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah 1981-2005.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Hipotesa Neo-Klasik yang terbukti benar di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017. Dimana Hipotesa Neo-Klasik mengatakan pada permulaan proses pembangunan suatu wilayah, ketimpangan pembangunan antarwilayah akan lebih cenderung meningkat. Kemudian, bila proses pembangunan terus berlanjut

maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan wilayah tersebut akan menurun. Kenaikan pada PDRB per kapita yang berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung di gambarkan pada grafik berikut ini:

Gambar 4.2
Rata-Rata PDRB per kapita dan Indeks Williamsom
di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017



Sumber: Data BPS diolah (2019)

Berdasarkan analisa grafik pada gambar 4.1, menunjukan bahwa pada tahun 2013 hasil perhitungan indeks williamson menggambarkan ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sebesar 0,0009 dan rata-rata PDRB per kapita sebesar 3,1543. Kemudian, perkembangan terus terjadi pada indeks williamsom yang mengalami *trend* penurunan sedangkan rata-rata PDRB per kapita pada tahun-tahun selanjutnya menunjukan adanya *trend* kenaikan.

Namun, meskipun hasil dalam penelitian ini menunjukkan indikasi adanya kenaikan PDRB perkapita berpengaruh dalam menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Akan tetapi fakta di lapangan PDRB per kapita masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Lampung menunjukkan distribusi yang tidak merata yang menyebabkan ketimpangan antar Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, misalnya PDRB per kapita di Kota Bandar Lampung tergolong dalam PDRB per kapita yang sangat tinggi sedangkan PDRB per kapita di Kabupaten Pesisir Barat tergolong ke dalam PDRB per kapita yang sangat rendah dibandingkan PDRB per kapita di Kota Bandar Lampung maupun Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung. Artinya indikasi dari adanya ketimpangan PDRB per kapita yang tidak merata di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Lampung akan menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi dan semakin meningkatnya pula kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Menurut Todaro, PDRB per kapita merupakan salah satu gambaran untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Dimana adanya laju pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memperburuk distribusi pendapatan dengan upaya melakukan pendekatan untuk memilih sektor-sektor mana saja yang mendapatkan prioritas, sehingga sumber daya yang tersedia di masing-masing wilayah terkelola secara optimal serta perlunya menyusun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan tersebut dan lain sebagainya.

Melihat kondisi perekonomian di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tersebut, dapat dikatakan pemerintah telah melakukan upaya dalam mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan wilayah yaitu dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan melalui Perpres No. 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019. Diharapkan adanya Perpres No. 131 tahun 2015 tersebut maka perhatian pemerintah Provinsi Lampung dalam pembangunan ekonomi wilayah berfokus pada Kabupaten/Kota yang tertinggal atau terbelakang di Provinsi Lampung. Sehingga pembangunan ekonomi wilayah yang telah dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tersebut bisa menurunkan tingkat ketimpangan antarwilayah Provinsi Lampung 2013-2017. Namun, Dalam hal ini justru pembangunan ekonomi wilayah terfokus pada wilayah bagian tengah Provinsi Lampung misalnya Kota Bandar Lampung dan sebagainya dimana yang sebagian besar Kabupaten/Kota tersebut merupakan wilayah maju, sehingga kebijakan tersebut belum terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuandikeluarkannya kebijakan tersebut yaitu melakukan pembangunan di wilayah-wilayah yang tertinggal.

2) Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi menunjukan bahwa hasil output *Eviews 9* nilai t-statistik pada variabel investasi menghasilkan nilai t-hitung sebesar (-0,500968) artinya t-hitung lebih kecil dari t-tabel $(-0.500968 < 1,99254)$. Dari hasil tersebut berarti bahwa H_1 ditolak dan

Ho1 diterima maka dengan hasil uji ini dapat dinyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017. Hasil regresi tersebut sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang menduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi dengan ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017.

Sedangkan pada nilai koefisien regresi variabel independen investasi sebesar (-0.009879) yang berarti setiap terjadi peningkatan investasi sebesar 1% maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sebesar 0,98%. Namun, karena menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara investasi dengan ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung maka dalam setiap peningkatan investasi belum memberikan hasil yang maksimal terhadap pembangunan ekonomi wilayah di masing-masing Kabupaten/Kota tersebut.

Dengan demikian hasil ini sejalan dengan penelitian Nurhayani, Siti Hodijah, dan Adi Bhakti yang menyatakan bahwa variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pembangunan di Provinsi Jambi tahun 2002-2014. Dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika Dorcas, Erfit dan Edi Bhaktiar yang menyatakan bahwa variabel investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatera tahun 2011-2015.

Hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa pengaruh yang tidak signifikan menunjukkan investasi PMA dan PMDN belum memberikan hasil

yang maksimal di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sesuai dengan teori Myrdal. Dalam teori Myrdal mengemukakan bahwa adanya perpindahan modal dan motif laba yang cenderung meningkat maka akan meningkatkan pula ketimpangan antarwilayah tersebut dan terbukti di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017. Menurut Myrdal adanya motif laba yang dapat mendorong berkembangnya suatu pembangunan di masing-masing wilayah yang hanya terjadi pada wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba atau keuntungan dalam investasi yang tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar dan semakin terbelakang.

Fakta di lapangan bahwa lambatnya perkembangan investasi PMA dan PMDN di kabupaten/Kota Provinsi Lampung disebabkan karena keunggulan-keunggulan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung belum didukung dengan adanya peningkatan kearifan budaya lokal di setiap wilayah Kabupaten/Kota provinsi Lampung itu sendiri. Adapun ciri dari kearifan lokal dapat berupa pertahanan terhadap budaya luar yang masuk, mengakomodasi unsur-unsur budaya luar menjadi *trend* yang dapat melunturkan karakteristik budaya yang ada di wilayah tersebut. Hubungannya kearifan lokal dengan investasi adalah lebih menekankan pada karakteristik (ciri khas) yang ada pada masing-masing wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung misalnya dalam hal hasil-hasil produksi lokal yang mencirikan budaya dari Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tertentu bisa menarik investor dalam berinvestasi di wilayah tersebut.

Faktor lain yang menyebabkan investasi PMA dan PMDN di kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017 berkembang lambat yaitu kurangnya jaminan kepastian hukum dan tingkat kriminalitas membuat investor ragu akan keamanan jika ingin melakukan pengembangan usaha barunya di wilayah tersebut.

3) Pengaruh Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi menunjukan bahwa hasil output *Eviews 9* nilai t-statistik pada variabel aglomerasi menghasilkan nilai t-hitung sebesar 2,445440 artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ($2,445440 > 1,99254$). Dari hasil tersebut berarti bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga dengan hasil uji ini dapat dinyatakan bahwa aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017. Hasil regresi tersebut tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang menduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara aglomerasi dengan ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017.

Sedangkan pada nilai koefisien regresi variabel aglomerasi sebesar 0.048176 yang berarti setiap terjadi peningkatan aglomerasi sebesar 1% maka akan menaikkan tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sebesar 4,81%. Dimana dalam setiap peningkatan 1% aglomerasi tersebut memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap peningkatan ketimpangan di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika Dorcas, Erfit dan Edi Bhaktiar yang menyatakan bahwa variabel aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatera tahun 2011-2015. Dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liolyta Damayanti yang menemukan bahwa variabel aglomerasi berpengaruh negatif dan signifikan dimana peningkatan aglomerasi industri mampu memperbaiki ketimpangan regional di Pulau Jawa (*spred effect*) tahun 2009-2013.

Hal ini sejalan dengan teori Neo Klasik yang mengatakan bahwa aglomerasi bisa terjadi di suatu wilayah dikarenakan adanya pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki motif untuk mendapatkan keuntungan dalam kegiatan ekonomi yaitu keuntungan lokalisasi dan keuntungan urbanisasi. Keuntungan lokalisasi itu didapat dalam bentuk keseluruhan biaya produksi yang timbul akibat berlokasi secara terkonsentrasi dengan wilayah terkait lainnya dalam sebuah pusat pertumbuhan. Sedangkan keuntungan urbanisasi yaitu didapat dari keuntungan penggunaan fasilitas dalam sebuah pusat pertumbuhan secara bersamaan yang bisa menunjang kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Munculnya aglomerasi di daerah atau wilayah akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut karena terciptanya efisiensi produksi. Sehingga penghematan aglomerasi sebagai bentuk penghematan

karena adanya lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) dimana diasosiasikan dengan pengelompokan perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen secara spasial untuk meminimisasi biaya-biaya seperti biaya transportasi, informasi dan komunikasi. Keuntungan lain dari aglomerasi yang muncul yaitu adanya penggunaan fasilitas secara bersama dalam kegiatan ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi antarlain listrik, pergudangan, telepon, air minum, dan utilitas lainnya yang menunjang kegiatan operasi perusahaan.

Hal tersebut yang telah menyebabkan munculnya aglomerasi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017 yang ditandai dengan adanya penggunaan fasilitas secara bersamaan (memanfaatkan keuntungan lokalisasi) yang akan dapat menurunkan tingkat biaya yang dapat ditanggung secara bersamaan pula. Dan juga aglomerasi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017 bisa terjadi disebabkan karena terkonsentrasinya kegiatan produksi yang cukup tinggi yang mendorong pertumbuhan di setiap masing-masing Kabupaten/Kota yang cenderung lebih cepat. Sedangkan bagi Kabupaten/Kota lain yang memiliki konsentrasi kegiatan produksi rendah akan mendorong pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, aglomerasi mendorong semakin tingginya ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Maka dapat disimpulkan bahwa suatu industri dapat mengakibatkan terkumpulnya faktor-faktor pendukung industri tersebut dan terkonsentrasinya kegiatan industri pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

tertentu saja sehingga hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan.

b. Pengaruh Secara Simultan PDRB Per Kapita, Investasi, dan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017

Berdasarkan hasil regresi diperoleh F-statistik sebesar 95,01600 yang artinya Fhitung lebih besar dari F-tabel ($95,01600 > 2,73$), maka H_2 diterima dan H_{02} ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB per kapita (X_1), investasi (X_2), dan aglomerasi (X_3) terhadap ketimpangan pembangunan wilayah (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017.

Sedangkan berdasarkan uji koefisien determinasi (R^2) nilai Adjusted R-squared sebesar 0,844162 menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017 mampu dijelaskan oleh tiga variabel independen PDRB per kapita (X_1), investasi (X_2) dan aglomerasi (X_3) sebesar 84,41% sedangkan sisanya sebesar 15,59% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Kemudian hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika Dorcas Andini, Erfit, dan Edi Bhaktiar Kartika yang menemukan bahwa analisis berdasarkan hasil regresi data panel diketahui secara simultan investasi, belanja pemerintah, aglomerasi, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di wilayah Sumatera 2011-2015. Sedangkan penelitian serupa juga dilakukan oleh Ferry Kurniawan Lubis yang

juga menemukan bahwa variabel PDRB per kapita, aglomerasi, investasi, dan *dummy* desentralisasifiskal secara simultan berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara 1990-2013.

Jadi dapat disimpulkan bahwa 15,59% variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini dimana yang mampu menjelaskan tingkat ketimpangan pembangunan wilayah, dijelaskan oleh variabel seperti variabel belanja pemerintah, tenaga kerja, dan *dummy* desentralisasifiskal.

Sedangkan hasil penelitian ini juga sejalan dengan Syafrizal yang mengemukakan ketimpangan yang terjadi antarwilayah disebabkan oleh perbedaan kandungan Sumber Daya Alam(SDA), ekonomi konsentrasi kegiatan wilayah (aglomerasi), alokasi dana pada masing-masing wilayah dalam bentuk investasi swasta maupun pemerintah, sehingga kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Perbedaan kekayaan daerah ini yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan pembangunan wilayah.

c. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Ketimpangan Pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017

Di zaman modern seperti sekarang ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat Islam adalah bagaimana membangun perekonomian yang selaras dengan aturan-aturan syariah yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadits. Dimana masyarakatnya akan menderita jika wilayahnya terkena dampak ketimpangan pembangunan wilayah, maka hal ini juga yang dialami oleh Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian ketimpangan

pembangunan wilayah tidak hanya dilihat dari sudut pandang Ekonomi Konvensional saja namun juga Ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian maka analisis pandangan Ekonomi Islam terhadap ketimpangan pembangunan wilayah yang dipengaruhi oleh variabel PDRB per kapita, investasi, aglomerasi dijelaskan sebagai berikut:

1) PDRB Perkapita dalam Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial setiap terjadi peningkatan PDRB per kapita maka akan mengalami penurunan pada ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017. Namun, faktanya kenaikan PDRB per kapita tidak menjamin tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi. Dapat digaris bawahi bahwa standar hidup rata-rata penduduk di kabupaten/Kota Provinsi Lampung masih rendah, bahkan realitas yang memprihatinkan adalah adanya pembangunan ekonomi dan eksploitasi sumber daya ekonomi hanya bisa dinikmati oleh sekelompok tertentu saja dari masyarakatnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan konsentrasi ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang timpang atau tidak merata.

Suatu pembangunan ekonomi dalam konsep Ekonomi Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama demi memelihara lima maslahat pokok dalam hal kesejahteraan masyarakat, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap individu berhak dan layak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, agar dapat mempertahankan eksistensi hidup dan menjalankan peran utamanya sebagai

khalifah Allah SWT di bumi. Di sisi lain, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, dalam hal ini bertindak sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan ekonomi itu sendiri.

Kesimpulannya pembangunan dalam Islam berfokus pada inti utama yaitu pembangunan manusia itu sendiri yang termasuk pada aspek sosial dan budayanya. Ini berarti Islam menganggap diri manusia sendirilah yang merupakan tempat sebenarnya adanya aktivitas pembangunan itu terjadi. Pemikiran ini berawal dari pandangan Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah SWT untuk mengelola bumi sesuai dengan kehendak-Nya (aturan syariah) yang dikemudian hari nanti (di akhirat) akan dimintai suatu pertanggungjawaban atas pembangunan (amalan yang dilakukan) yang telah dilakukannya. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT (Q.S Ad-Dzariyat:19):



Artinya: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*¹⁹⁹

Ayat diatas menjelaskan pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk menanggulangi ketimpangan yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Islam menganjurkan tentang kegiatan ekonomi bukan hanya untuk mengakumulasi modal saja, tetapi hal ini semata-mata untuk

¹⁹⁹Departemen Agama RI, *Al-Haramain (Al-Quran dan Terjemahannya)*, Semarang:CV Toha Putra, 2007, h. 880.

kesejahteraan hidup manusia secara menyeluruh. Karena kemiskinan akan membuat individu tidak dapat menjalankan kewajiban pribadi, sosial dan moralnya, maka dari itu setiap manusia dianjurkan untuk selalu berdoa untuk dihindarkan dari kemiskinan, kekurangan dan kehinaan serta diiringi dengan usaha dalam kegiatan ekonomi yang sesuai syariat Islam. Bahkan yang dikhawatirkan dalam Islam kemiskinan akan mengantarkan manusia kepada kekufuran pada diri manusia tersebut.

2) Investasi Dalam Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial setiap terjadi peningkatan investasi PMA dan PMDN maka akan mengalami penurunan pada ketimpangan pembangunan wilayah, akan tetapi karena hasil analisis regresi menunjukkan pengaruh yang negatif yang artinya investasi PMA dan belum memberikan hasil yang maksimal di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017. Maka dari itu perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menarik minat para investor agar berinvestasi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, sehingga kenaikan investasi yang secara optimal dan merata bisa mengurangi tingkat ketimpangan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Ekonomi Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Dalam memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, hal ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin pada diri orang tersebut. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan tersebut yaitu

dengan melakukan kegiatan investasi. Konsep Ekonomi Islam juga mengajarkan setiap investasi yang dilakukan tidak hanya semata-mata untuk kepuasan batin yang bersifat material namun juga harus bernilai ibadah sehingga bisa mendatangkan keberkahan di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Lukman: 34):

كَسِبُ مَاذَا نَفْسُ تَدْرِي وَمَا الْأَرْضُ حَامِي مَا وَيَعْلَمُ الْغَيْثُ وَيُنْزِلُ السَّاعَةَ عِلْمُ عِنْدَهُ وَاللَّهُ إِنَّ
خَبِيرٌ عَلِيمٌ إِنَّ تَمُوتُ أَرْضُ يَأْيِ نَفْسُ تَدْرِي وَمَا غَدَاتُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”²⁰⁰

Ayat diatas menjelaskan, Allah SWT secara tegas menyatakan bahwa didunia ini tidak seorangpun yang dapat mengetahui apa saja yang akan terjadi di kemudian hari, baik itu apa yang akan di perbuat oleh kita sebagai manusia maupun sesuatu hal yang akan diusahakan kedepannya. Maka dari itu ketidaktahuan tersebut Allah SWT memerintahkan manusia untuk berusaha, yaitu salah satunya dengan cara berinvestasi sebagai bekal menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Dan mengenai hasil yang kita usahakan itu adalah hak prerogatif Allah SWT, namun dalam hal

²⁰⁰Departemen Agama RI, *Al-Haramain (Al-Quran dan Terjemahannya)*, Semarang:CV Toha Putra, 2007, h. 501.

ini yang paling penting adalah kita sebagai umatnya mengikuti apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya sesuai syariat Islam dalam kegiatan apapun termasuk investasi.

3) Aglomerasi Dalam Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial setiap terjadi peningkatan aglomerasi maka akan mengalami peningkatan pada ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017. Hal tersebut disebabkan oleh adanya konsentrasi kegiatan produksi yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tertentu saja sehingga Kabupaten/Kota yang konsentrasi kegiatan produksi rendah menjadi semakin terbelakang.

Dalam konsep Ekonomi Islam, manusia diperintahkan oleh Allah SWT agar segala kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat membawa masalah baik untuk dirinya maupun orang lain. Begitu juga di dalam industri, proses kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dapat menciptakan manfaat (*utility*) dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Dan tujuan dari produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum bagi konsumen (masyarakat). Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat (Al-Baqarah ayat 22):

قَالَ الثَّمَرَاتِ مِنْ بِيِهِ فَأَخْرَجَ مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ أَنْزَلْ بِنَاءَ وَالسَّمَاءِ فَرِشًا لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَنْدَادُ اللَّهِ فَجَعَلُوا فَلَاحُكُمْ رَز

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.”*²⁰¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai seorang khalifah di muka bumi ini yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT berupa kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah untuk dapat dipergunakan sebagai modal berproduksi dan dapat diolah untuk kemaslahatan bersama. Aglomerasi itu sendiri adalah pemusatan berbagai industri ke dalam suatu tempat tertentu sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi baru pada tempat tersebut, dan kemudian pada gilirannya wilayah-wilayah dalam pusat pertumbuhan akan mempengaruhi wilayah-wilayah yang perkembangannya lambat. Hal tersebut yang tercermin dari keadaan aglomerasi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017 yang kebanyakan Kabupaten/Kotanya termasuk kedalam keadaan aglomerasi atau sering diartikan dengan terpusatnya industri-industri dalam suatu wilayah.

4) Ketimpangan Pembangunan Wilayah Dalam Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian ini, ketimpangan pembangunan wilayah menyebabkan kesengsaraan masyarakat di wilayah yang terkena dampak adanya ketimpangan tersebut. Sehingga ketika ketimpangan pembangunan

²⁰¹Departemen Agama RI, *Al-Haramain (Al-Quran dan Terjemahannya)*, Semarang:CV Toha Putra, 2007, h. 7.

meningkat maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat menurun, akibatnya meningkatkan pula tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017.

Sejalan dengan teori menurut Ibnu Khaldun dimana pertumbuhan ekonomi didasarkan atas dasar beberapa aspek yaitu meliputi semua aspek pembangunan manusia sehingga masing-masing variabel memperkaya variabel lain seperti Pemerintah (G), Syariah (S), Masyarakat (N), Kekayaan (W), Keadilan (j) sehingga bisa terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

Maka dari itu dalam konsep Ekonomi Islam menurut teori Yusuf Qardhawi yaitu sistem ekonomi yang berbasis Islam menghandaki bahwadalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendikebebasan dan keadilan kepemilikan. Ekonomi islam melarang adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah, dimana sistem Ekonomi Islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak.²⁰²Dalam Al-Qur'an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, sadaqaah, hibah, wasiat dan

²⁰²Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika...*, h. 7.

sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan baik. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat dalam (Q.S Al-Hasyr: 7):

وَابْنِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْفَرَىٰ أَهْلٍ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَفَاءَ مَا
لَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْكُمْ وَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ أَتَانَكُمْ وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءٌ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ السَّبِيلِ
الْعِقَابِ شَدِيدٌ إِنَّ اللَّهَ تَقْوَاهُ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.²⁰³

Ayat diatas menjelaskan bahwa harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orangkaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraanmasyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, dalam sistem Ekonomi Islam penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepadamasyarakat yang lemah agar kesejahteraan masyarakatpun terpenuhi.

²⁰³Departemen Agama RI, *Al-Haramain (Al-Quran dan Terjemahannya)*, Semarang:CV Toha Putra, 2007, h. 1072.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara parsial dari hasil pengujian dua sisi pada uji signifikan (uji t) bahwa:
 - a) Variabel PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017 dengan nilai signifikan t-hitung lebih besar dari t-tabel ($-15,61556 > 1,99254$).
 - b) Variabel investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi

Lampung tahun 2013-2017 dengan nilai signifikan t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($-0,500968 < 1,99254$).

c) Variabel aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017 dengan nilai signifikan t-hitung lebih besar dari t-tabel ($2,445440 > 1,99254$).

2. Secara simultan dari hasil pengujian uji signifikan (uji F), bahwa variabel PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017 dengan nilai signifikansi F-hitung lebih besar dari F-tabel ($95,01600 > 2,73$). Sedangkan berdasarkan uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan besarnya variabel independen PDRB per kapita (X_1), investasi (X_2), dan aglomerasi (X_3) untuk menerangkan variabel dependen ketimpangan pembangunan wilayah (Y) sebesar 0,844162 artinya menunjukkan bahwa besarnya kemampuan independen dalam penelitian untuk menerangkan variabel dependen adalah sebesar 84,41% sedangkan sisanya sebesar 15,59% dijelaskan oleh variabel lain seperti variabel belanja pemerintah, tenaga kerja, dan *dummy* desentralisasi fiskal.

3. Pandangan dalam sistem Ekonomi Islam, yaitu buruknya pendistribusian kekayaan atau harta di tengah masyarakat menyebabkan adanya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat dan hal ini pun sejalan dengan teori Yusuf Al-qardhawi. Maka dari itu Ekonomi Islam melarang adanya

ketimpangan pembangunan wilayah. Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan bahwa pendistribusian ekonomi Islam yaitu untuk mewujudkan keadilan distributif serta mekanisme distribusi yang baik dalam Islam (berlandaskan sistem syariat Islam) sebagai solusi menuju keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu adanya kebebasan dan keadilan.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil secara parsial :
 - a. Dalam PDRB perkapita, maka pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan agar benar-benar terealisasi dengan baik. Intervensi pemerintah pada prinsipnya dapat menyentuh langsung faktor-faktor penentu utama distribusi pendapatan, misalnya seperti dengan upaya perbaikan tingkat upah pekerja, melaksanakan program redistribusi pendapatan dengan cara pemberian subsidi pupuk kepada petani dan sebagainya.
 - b. Dalam investasi, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten/Kota

Provinsi Lampung misalnya seperti meningkatkan kearifan lokal dengan menyediakan wadah masyarakat untuk promosi produk lokal, memberikan keringanan pajak dan juga memberikan kepastian hukum sehingga bagi investor yang baru mengembangkan usahanya bisa tertarik dan nyaman untuk berusaha di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

- c. Dalam aglomerasi, maka pemerintah harus melakukan kebijakan yang diperlukan dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. Sehingga keberadaan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut dapat memberikan dampak menyebar dan menghindari terpusatnya kegiatan ekonomi pada beberapa wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

2. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan, karena ketiga variabel independen berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017 maka kepada pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung harus bekerja lebih maksimal lagi karena upaya-upaya untuk mengurangi tingkat ketimpangan masih belum optimal. Misalnya dengan melakukan pengawasan yang ketat sehingga kebijakan atau peraturan yang telah dibuat bisa terealisasi dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

3. Berdasarkan hasil penelitian tentang pandangan ekonomian terhadap ketimpangan pembangunan yaitu ketimpangan terjadi dikarenakan

terjadinya pendistribusian yang tidak merata di masyarakat. Maka, Bagi publik diharapkan juga dalam hal konsumsi masyarakat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Juga diharapkan sebagian materinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan konsums yang sifatnya konsumtif saja namun juga digunakan sebagian materinya untuk kegiatan berinvestasi sehingga keadaan ekonomi masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung cenderung stabil dan meningkat kemudian selanjutnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Aziz. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).
- Abdul Ghofur Noor, Ruslan. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Ahmad, Hamzah dan Nanda Santoso, *Kamus Pintar Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 1996).
- A. Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Amin Suma, Muhammad. *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: AMRAH, 2015).
- Angelia, Yuki. *Analisis ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008*, Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomi, (Universitas Diponegoro: Semarang 2010).
- Arsyad, Lincolin. *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah edisi kesatu*, (BPFE Yogyakarta : 1999).
- Aslam Haneef, Mohamed. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pt. Rajawali Pers, 2010).
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Beik, Irfan Syauqi, Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. edisi revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Boediono. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No 4: Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta : 1990).
- Bonet, Jaime. *Fiscal Income Desentralization and Regional Income Disparities- Evidence From the Columbian*, Jurnal Internasional, The Annals Of Regional Science: Vol 40, 2006.
- Chalid, Pheni. *Teori dan Isu Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: CIDES, 2013).
- Damayanti, Liolyta. *Analisis Dampak Aglomerasi terhadap Ketimpangan regional Pulau Jawa tahun 2009-2013*, Jurnal, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Vol. 5. No. 2, 2016.

Departemen Agama RI, *Al-Haramain (Al-Quran dan Terjemahannya)*, Semarang:CV Toha Putra, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-empat*, (Jakarta:Gramedia, 2011).

D.K, Harjono. *Hukum Penanaman Modal*, (PT.Raja Grafindo persada: Jakarta,2007).

Doddy Ariefianto, Moch. *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan E-Views*. (Jakarta: Gramedia, 2012).

Dorcas Andhiani, Kartika, Erfit, Adi Bhaktiar. *Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Wilayah Sumatera 2011-2015*, e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 7. No.1, Januari – April 2018.

Eddy Nugroho, Rosalendo. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten*, Journal of Industrial Engineering and Management Systems Vol. 10, No. 1, February 2017.

Fauzy, Akhmad. *ekonomi industry* (Jakarta: pt. raja grafindo persada, 2013).

Febri Astuti, Dewi. *Analisis Faktot-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Jawa*, Jurnal Ekonomi, Vol.1, No. 03, 2013.

Febriani, Hesty. *Analisis Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan dan Keterbukaan Perdagangan Pasca Krisis Ekonomi (Kerangka Berpikir Kurva Kuznets Keterbukaan)*, Skripsi, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta:2016.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002).

Hanafiah, Omy Firliany. *Pengaruh Variabel-Variabel Dalam Model Dinamika Ibnu Khaldun Terhadap Tingkat Kemiskinan di Beberapa negara Muslim Tahun 200-2004*, Tesis, Program Pascasarjana UI, 2009.

Hariwijayadan Triton, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008).

Hartono, Budiantoro. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jateng tahun 1981-2005*, Tesis, Megister Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan, 2008.

Iswanto, Denny. *Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ekonomi, Signifikan Vol. 4 No. 1 April 2015.

Kurniawan Lubis, Ferry. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1990 – 2013*, Tesis, Ekonomi Pembangunan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2016.

Mansuri, *Modul Pratikum Eviews 9*, (Jakarta: Universitas Borobudur, 2016).

Meliana Sari, Resti, Janthy Trilusianty Hidayat, M.Yogie. *Analisis Ketimpangan wilayah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung*, Jurnal Ekonomi, Vol.01.No.4, 2017.

ML, Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2010).

Munthe, Marabon. *Konsep Distribusi Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah STEI Annisa Pekanbaru, (2014) Vol. 2, No. 1.

Nurhayani, Siti Hodijah, Adi Bhakti, *Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi dan Investasi di Jambi tahun 2002-2014*. Jurnal, Paradigma Ekonomika. Vol. 10. No. 2. Oktober 2015.

Nurhuda, Rama, M. R. Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo. *Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No.4, 2012.

Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2015 Tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019 pasal (1) dan (2).

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Praditya, Maninggar. *Analisis Usaha Industri Gula Jawa Skala Rumah Tangga Di Kabupaten Wonogiri*, Skripsi, (Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, 2010).

Prabundu Tika, Moh. *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006).

Purwaningsih. *Tren Konsentrasi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aglomerasi Industri Manufaktur Besar Sedang Di Jawa Barat*, Tesis, (Program Studi Ilmu Ekonomi Di Sekolah Pascasarjana Institute Pertanian Bogor, Bogor, 2011).

Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikroekonomi & Makroekonomi Edisi Ketiga*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008).

Rahardjo, Adisasmita. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

-----, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 1982-2003*, Tesis. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Rahmawati, Anita. *Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, (2013).

Sakinah. *Investasi Dalam Islam*, Iqtishadia, Vol. 1 No. 2 (Desember 2014).

Sjafrizal, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. (Baduose: Media. Padang Sumatera Barat, 2008).

-----, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan Edisi kedua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Sodik, Jamzan dan Dedi Iskandar. *Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional Di Indonesia*, jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007.

Sudarmono, Mulyadi. *Analisis Transformasi Struktural, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antardaerah di Wilayah Pembangunan 1 Jateng*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro : 2006.

Suindyah, Sayekti. *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerjasama Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur*, Jurnal Ekonomi, Vol. 15 No. 4, Desember 2011.

- Sujarweni, Wiratna.
Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Buana Press, 2015).
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan, Edisi 2*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Suryanto, Tulus, Femei Purnamasari, Mohamad Kurniawan, *Tax Revenue and Disparity: How to Improvement Income Inequality in Islamic Perspectiv*, Asian Journal of Social Sciences and Management Studies, Vol. 5, No. 2, 65-71, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta: 2016).
- Suryabrata, Sumdi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Suparmoko, Irawan. *Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta : BPFE, 2002).
- Sutarnodan Mudrajad Kuncoro. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang, 2003.
- Syahrullah, Dio. *Analisis Pengaruh (PDRB), Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten tahun 2009-2012*, Skripsi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2014.
- Tambunan, Khairina. *Analisis Pengaruh Investasi, Operasi Moneter dan ZIS Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, At-Tawassuth, Vol. 1, No.1 (2016: 73-94).
- Tarigan, Robinson. *Ekonomi Regional*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015).
- Teguh, Muhammad. *Ekonomi Industri*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Todaro, Michael, Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Pearson Education Limited. United Kingdom : 2006).
- Umar, Husein.
Metode Riset Bisnis panduan mahasiswa untuk melakukan riset dilengkapi dengan proposal dan hasil riset bidang manajemen dan akuntansi Cetakan ke II, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian,.

Yeniwati. *Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi Di Sumatera*, Jurnal Kajian Ekonomi, Juli 2013, Vol. II, No.03.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007).

Online:

Badan Pusat Statistik, *Publikasi Lampung Dalam Angka 2017* (On-line), tersedia di: <http://www.bps.go.id.html> (diakses pada 5 maret 2019).

Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Lampung, 2018*, h. 12 (On-line) tersedia di: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/2018.html> (31 januari 2019).

Katalog BPS, *Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Produk 2017*, h. 10. (On-line) tersedia di: <http://lampung.bps.go.id/publication/2018.html> (15 januari 2019).



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MELA APRIANI DAMAYANTI**
NPM : **1551010232**
Jurusan/Prodi : **Ekonomi Syaria'h**
Fakultas : **FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)**

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 April 2019
Penulis,

Mela Apriani Damayanti
1551010232

Lampiran 1. Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Kabupaten	y_i	f_i	N	$y_i - y$	$(y_i - y)^2$	f_i/N	$(y_i - y)^2$	$\sqrt{(y_i - y)^2}$
	PDRB Perkapita	Penduduk kab/kota	Penduduk Provinsi					
Barat	12.786.752	287.588	7.932.132	-302.725.763	9,1642	0,0362	3.317,44	289,8
is	14.233.991	560.322	7.932.132	-301.278.524	9,0768	0,0706	6.408,22	
Selatan	23.256.915	950.844	7.932.132	-292.255.600	8,5413	0,1198	10.232,47	
Timur	23.655.372	988.277	7.932.132	-291.857.143	8,5180	0,1245	10.604,91	
Tengah	28.661.554	1.214.720	7.932.132	-286.850.961	8,2283	0,1531	12.597,52	
Utara	20.146.032	598.924	7.932.132	-295.366.483	8,7241	0,0755	6.586,69	
an	16.637.730	423.125	7.932.132	-298.874.785	8,9326	0,0533	4.761,07	
wang	27.667.957	417.782	7.932.132	-287.844.558	8,2854	0,0526	4.358,12	
n	20.288.814	416.354	7.932.132	-295.223.701	8,7157	0,0524	4.567,02	
t	15.065.901	379.213	7.932.132	-300.446.614	9,0268	0,0478	4.314,81	
	26.664.675	192.843	7.932.132	-288.847.840	8,3433	0,0243	2.027,42	
wang Barat	22.072.136	259.731	7.932.132	-293.440.379	8,6107	0,0327	2.815,69	
rat	15.557.275	124.786	7.932.132	-299.955.240	8,9973	0,0157	1.412,57	
mpung	28.792.776	942.039	7.932.132	-286.719.739	8,2208	0,1187	9.758,08	
	20.024.635	153.517	7.932.132	-295.487.880	8,7313	0,0193	1.685,14	
	315.512.515						84.034,60	

Tahun 2013

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah 2019

Lampiran 2. Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Tahun 2014

Nama Kabupaten	y_i	f_i	N	$(y_i - y)$	$(y_i - y)^2$	f_i/N	$(y_i - y) \cdot f_i/N$
	PDRB Perkapita	Penduduk kab/kota	Penduduk Provinsi				
1. Lampung Barat	13.367.936	290.388	8.026.191	-315.897.543	9,9791	0,0361	-31,5897
2. Tanggamus	14.891.386	567.172	8.026.191	-314.374.093	9,8831	0,0706	-31,4374
3. Lampung Selatan	24.323.366	961.897	8.026.191	-304.942.113	9,2989	0,1198	-30,4942
4. Lampung Timur	24.080.118	998.720	8.026.191	-305.185.361	9,3138	0,1244	-30,5185
5. Lampung Tengah	29.982.739	1.227.185	8.026.191	-299.282.740	8,9570	0,1528	-29,9282
6. Lampung Utara	21.179.537	602.727	8.026.191	-308.085.942	9,4916	0,075	-30,8085
7. Way Kanan	17.379.527	428.097	8.026.191	-311.885.952	9,7272	0,0533	-31,1885
8. Tulang Bawang	28.791.296	423.710	8.026.191	-300.474.183	9,0284	0,0527	-30,0474
9. Pesawaran	21.162.797	421.497	8.026.191	-308.102.682	9,4927	0,0525	-30,8102
10. Pringsewu	15.769.758	383.101	8.026.191	-313.495.721	9,8279	0,0477	-31,3495
11. Mesuji	27.960.681	194.282	8.026.191	-301.304.798	9,0784	0,0242	-30,1304
12. Tulang Bawang Barat	23.051.128	262.316	8.026.191	-306.214.351	9,3767	0,0326	-30,6214
13. Pesisir Barat	16.186.787	135.992	8.026.191	-313.078.692	9,8018	0,0169	-31,3078
14. Bandar Lampung	30.224.132	960.695	8.026.191	-299.041.347	8,9425	0,1196	-29,9041
15. Metro	20.914.291	155.992	8.026.191	-308.351.188	9,5080	0,0194	-30,8351
y	329.265.479						

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah 2019

Lampiran 3. Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Tahun 2015

Kabupaten	y_i	f_i	N	$(y_i - y)$	$(y_i - y)^2$	f_i/N	$(y_i - y)^2 \cdot (f_i/N)$	$\sqrt{(y_i - y)^2 \cdot (f_i/N)}$
	PDRB Perkapita	Penduduk kab/kota	Penduduk Provinsi					
Lampung Barat	13.948.733	293.105	8.177.268	-329.052.245	1,0827	0,0358	387,60	201,2
Lampung Selatan	15.525.671	573.904	8.177.268	-327.475.307	1,0724	0,0701	751,75	
Lampung Timur	25.349.795	972.579	8.177.268	-317.651.183	1,009	0,1189	1.199,70	
Lampung Tengah	24.932.145	1.008.797	8.177.268	-318.068.833	1,0116	0,1233	1.247,30	
Lampung Utara	31.292.006	1.239.096	8.177.268	-311.708.972	9,7162	0,1515	14.720,04	
	22.205.934	606.092	8.177.268	-320.795.044	1,0290	0,0741	762,480	

n	18.092.261	432.914	8.177.268	-324.908.717	1,0556	0,0529	558,41
wang	29.827.876	429.515	8.177.268	-313.173.102	9,8077	0,0525	5.149,04
a	21.971.872	426.389	8.177.268	-321.029.106	1,0305	0,0521	536,89
	16.430.958	386.891	8.177.268	-326.570.020	1,0664	0,0473	504,40
	29.211.811	195.682	8.177.268	-313.789.167	9,8463	0,0239	2.353,26
wang Barat	24.063.892	264.712	8.177.268	-318.937.086	1,0172	0,0323	328,55
rat	16.818.258	149.415	8.177.268	-326.182.720	1,0639	0,0182	193,62
mpung	31.526.570	979.287	8.177.268	-311.474.408	9,7016	0,1197	11.612,81
	21.803.196	158.415	8.177.268	-321.197.782	1,0316	0,0193	199,09
	343.000.978						40.504,94

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah 2019

Lampiran 4. Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Kabupaten	y_i	f_i	N	$(y_i - y)$	$(y_i - y)^2$	f_i/N	$(y_i - y)^2 * (f_i/N)$	$\sqrt{(y_i - y)}$
	PDRB Perkapita	Penduduk kab/kota	Penduduk Provinsi					
g Barat	14.519.118	295.689	8.205.141	-342.897.836	1,1757	0,036	423,25	104,8
us	16.147.904	580.383	8.205.141	-341.269.050	1,1646	0,0707	823,37	
g Selatan	26.394.450	982.885	8.205.141	-331.022.504	1,0957	0,1197	1.311,55	
g Timur	25.739.960	1.018.424	8.205.141	-331.676.994	1,1001	0,1241	1.365,22	
g Tengah	32.746.767	1.250.486	8.205.141	-324.670.187	1,0541	0,1524	1.606,44	
g Utara	23.216.181	609.304	8.205.141	-334.200.773	1,1169	0,0742	828,73	
nan	18.818.793	437.530	8.205.141	-338.598.161	1,1464	0,0533	611,03	
Bawang	31.037.980	435.125	8.205.141	-326.378.974	1,0652	0,0530	564,55	
an	22.828.152	431.198	8.205.141	-334.588.802	1,1194	0,0525	587,68	
vu	17.099.713	390.486	8.205.141	-340.317.241	1,1581	0,0475	550,09	
	30.510.945	196.913	8.205.141	-326.906.009	1,0686	0,0239	255,39	
Bawang Barat	25.117.294	266.973	8.205.141	-332.299.660	1,1042	0,0325	358,86	
arat	17.547.863	151.288	8.205.141	-339.869.091	1,1551	0,0184	212,53	
ampung	32.933.858	997.728	8.205.141	-324.483.096	1,0528	0,1215	1.279,15	
	22.757.976	160.729	8.205.141	-334.658.978	1,1199	0,0195	218,38	
y	357.416.954						10.996,22	

Tahun 2016

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah 2019

Lampiran 5. Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Tahun 2017

Kabupaten	y_i PDRB Perkapita	f_i Penduduk kab/kota	N Penduduk Provinsi	$(y_i - y)$	$(y_i - y)^2$	f_i/N	$(y_i - y)^2 * (f_i/N)$	$\sqrt{(y_i - y)^2}$
Lampung Barat	15.117.157	298.286	8.289.577	-357.658.524	1,2792	0,0359	459,23	109,37
Tanggulus	16.809.172	586.624	8.289.577	-355.966.509	1,2671	0,0707	895,83	
Lampung Selatan	27.558.977	992.763	8.289.577	-345.216.704	1,1917	0,1197	1.426,46	
Lampung Timur	26.696.153	1.027.476	8.289.577	-346.079.528	1,1977	0,1239	1.483,95	
Lampung Tengah	34.179.403	1.261.498	8.289.577	-338.596.278	1,1464	0,1521	1.743,67	
Lampung Utara	24.314.993	612.100	8.289.577	-348.460.688	1,2142	0,0738	896,07	
Way Kanan	19.584.443	441.922	8.289.577	-353.191.238	1,2474	0,0533	664,86	
Tulang Bawang	32.330.700	440.511	8.289.577	-340.444.981	1,1590	0,0531	615,42	
Pesawaran	23.737.220	435.827	8.289.577	-349.038.461	1,2182	0,0525	639,55	
Pringsewu	17.798.308	393.901	8.289.577	-354.977.373	1,2609	0,0475	598,92	
	31.907.614	198.092	8.289.577	-340.868.067	1,1619	0,0238	276,53	
Tulang Bawang Barat	26.317.246	269.162	8.289.577	-346.458.435	1,2003	0,0324	388,89	
Pesisir Barat	18.335.358	152.529	8.289.577	-354.440.323	1,2562	0,0184	231,14	
Bandar Lampung	34.375.167	1.015.910	8.289.577	-338.400.514	1,1451	0,1225	1.402,74	
	23.713.770	162.976	8.289.577	-349.061.911	1,2184	0,0196	238,80	
y	372.775.681						11.962,06	

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah 2019

Lampiran 6. Perhitungan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (dalam desimal)

Kabupaten/Kota	2013			2014			2015			
1	2			3			4			
1. Lampung Barat	12.786.752	100.000.000	0,1278	13.367.936	100.000.000	0,1336	13.948.733	100.000.000	0,1394	14.5
2. Tanggamus	14.233.991	100.000.000	0,1423	14.891.386	100.000.000	0,1489	15.525.671	100.000.000	0,1552	16.1
3. Lampung Selatan	23.256.915	100.000.000	0,2325	24.323.366	100.000.000	0,2432	25.349.795	100.000.000	0,2534	26.3
4. Lampung Timur	23.655.372	100.000.000	0,2365	24.080.118	100.000.000	0,2408	24.932.145	100.000.000	0,2493	25.7
5. Lampung Tengah	28.661.554	100.000.000	0,2866	29.982.739	100.000.000	0,2998	31.292.006	100.000.000	0,3129	32.7
6. Lampung Utara	20.146.032	100.000.000	0,2014	21.179.537	100.000.000	0,2117	22.205.934	100.000.000	0,222	23.2
7. Way Kanan	16.637.730	100.000.000	0,1663	17.379.527	100.000.000	0,1737	18.092.261	100.000.000	0,1809	18.8
8. Tulang Bawang	27.667.957	100.000.000	0,2766	28.791.296	100.000.000	0,2879	29.827.876	100.000.000	0,2982	31.0
9. Pesawaran	20.288.814	100.000.000	0,2028	21.162.797	100.000.000	0,2116	21.971.872	100.000.000	0,2197	22.8
10. Pringsewu	15.065.901	100.000.000	0,1506	15.769.758	100.000.000	0,1576	16.430.958	100.000.000	0,1643	17.0
11. Mesuji	26.664.675	100.000.000	0,2666	27.960.681	100.000.000	0,2796	29.211.811	100.000.000	0,2921	30.5
12. Tulang Bawang Barat	22.072.136	100.000.000	0,2207	23.051.128	100.000.000	0,2305	24.063.892	100.000.000	0,2406	25.1
13. Pesisir Barat	15.557.275	100.000.000	0,1555	16.186.787	100.000.000	0,1618	16.818.258	100.000.000	0,1681	17.5
14. Bandar Lampung	28.792.776	100.000.000	0,2879	30.224.132	100.000.000	0,3022	31.526.570	100.000.000	0,3152	32.9
15. Kota	22.824.625	100.000.000	0,2282	23.814.201	100.000.000	0,2381	24.822.106	100.000.000	0,2482	25.8

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah 2019

Catatan: Nilai PDRB per kapita diubah ke bentuk desimal, berguna untuk menyamakan nilai Ketimpangan Pembangunan Wilayah (IW) sehingga bisa digunakan untuk meregresikan data, maka PDRB perkapita dibagi 100.000.000

Lampiran 7. Perhitungan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013 (dalam desimal)

Kabupaten/Kota	PMA	PMDN	Total Investasi	(Pembagi)
Kabupaten Barat	19.156.876.908,11	7.702.751.012,01	26.859.627.920,12	1.000.000.000.000
Kabupaten Nus	30.003.453.116,21	11.118.107.202,04	41.121.560.318,25	1.000.000.000.000
Kabupaten Selatan	67.100.560.134,01	14.333.108.107,27	81.433.668.241,28	1.000.000.000.000
Kabupaten Timur	68.004.773.204,22	15.511.431.980,15	83.516.205.184,37	1.000.000.000.000
Kabupaten Tengah	96.333.103.001,04	18.228.011.760,11	114.561.114.761,15	1.000.000.000.000
Kabupaten Utara	45.650.331.987,01	13.708.096.344,17	59.358.428.331,18	1.000.000.000.000
Kabupaten	29.111.000.347,37	10.101.200.404,04	39.212.200.751,41	1.000.000.000.000
Kabupaten Bawang	37.006.237.237,08	12.122.770.011,08	49.129.007.248,16	1.000.000.000.000
Kabupaten	34.170.041.997,13	11.459.409.202,04	45.629.451.199,17	1.000.000.000.000
Kabupaten	22.569.451.560,21	7.181.831.479,16	29.751.283.039,37	1.000.000.000.000
Kabupaten	23.000.011.032,45	8.115.117.711,04	31.115.128.743,49	1.000.000.000.000
Kabupaten Bawang Barat	25.709.170.770,12	9.235.090.067,15	34.944.260.837,27	1.000.000.000.000
Kabupaten	11.267.001.000,01	3.120.005.679,01	14.387.006.679,02	1.000.000.000.000
Kabupaten Lampung	94.500.077.610,71	17.328.000.003,07	111.828.077.613,78	1.000.000.000.000
Kabupaten	15.236.209.001,34	5.003.278.981,08	20.239.487.982,42	1.000.000.000.000

Sumber: BPMD Provinsi Lampung, diolah 2019

Catatan: Nilai Investasi diubah ke bentuk desimal, berguna untuk menyamakan nilai Ketimpangan Pembangunan Wilayah

(IW) sehingga bisa digunakan untuk meregresikan data, maka Investasi dibagi 100.000.000.000

**Lampiran 8. Perhitungan Realisasi Investasi PMA dan PMDN
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014 (dalam**

Kabupaten/Kota	PMA	PMDN	Total Investasi	Pembagi
Kabupaten Barat	19.227.000.121,08	7.717.269.118,04	26.944.269.239,12	1.000.000.000.000
Kabupaten Nus	30.123.311.980,07	11.198.000.770,05	41.321.312.750,12	1.000.000.000.000
Kabupaten Selatan	67.178.670.136,11	14.376.100.348,14	81.554.770.484,25	1.000.000.000.000
Kabupaten Timur	68.577.888.003,13	15.523.501.002,45	84.101.389.005,58	1.000.000.000.000
Kabupaten Tengah	96.455.118.563,02	18.230.114.117,08	114.685.232.680,10	1.000.000.000.000
Kabupaten Utara	45.553.001.567,17	13.772.110.717,17	59.325.112.284,34	1.000.000.000.000
Kabupaten nan	29.313.110.010,21	10.240.294.459,12	39.553.404.469,33	1.000.000.000.000
Kabupaten Bawang	37.206.005.468,16	12.124.650.119,16	49.330.655.587,32	1.000.000.000.000
Kabupaten an	34.261.199.404,11	11.400.444.067,07	45.661.643.471,18	1.000.000.000.000
Kabupaten vu	22.676.601.008,13	7.182.292.904,04	29.858.893.912,17	1.000.000.000.000
	23.125.013.112,09	8.100.203.567,07	31.225.216.679,16	1.000.000.000.000
Kabupaten Bawang Barat	25.711.111.000,76	9.256.006.617,61	34.967.117.618,37	1.000.000.000.000
Kabupaten Barat	11.268.113.234,04	3.120.110.245,18	14.388.223.479,22	1.000.000.000.000
Kabupaten Lampung	94.511.000.541,14	17.328.375.112,17	111.839.375.653,31	1.000.000.000.000
	15.457.222.761,18	5.118.182.208,27	20.575.404.969,45	1.000.000.000.000

desimal)

Sumber: BPMD Provinsi Lampung, diolah 2019

Catatan: Nilai Investasi diubah ke bentuk desimal, berguna untuk menyamakan nilai Ketimpangan Pembangunan Wilayah (IW) sehingga bisa digunakan untuk meregresikan data, maka Investasi dibagi 100.000.000.000

Lampiran 9. Perhitungan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015 (dalam desimal)

Kabupaten/Kota	PMA	PMDN	Total Investasi	Pembagi	Investasi
1. Lampung Barat	19.097.071.000,17	7.789.302.300,17	26.886.373.300,34	1.000.000.000.000	0,0268
2. Tanggamus	30.457.177.088,27	11.167.450.114,08	41.624.627.202,35	1.000.000.000.000	0,0416
3. Lampung Selatan	67.000.567.108,11	14.560.409.551,08	81.560.976.659,19	1.000.000.000.000	0,0815
4. Lampung Timur	68.557.889.342,07	15.520.200.164,04	84.078.089.506,11	1.000.000.000.000	0,0840
5. Lampung Tengah	96.509.004.873,34	18.230.438.000,11	114.739.442.873,45	1.000.000.000.000	0,1147
6. Lampung Utara	45.667.990.007,14	13.774.301.008,14	59.442.291.015,28	1.000.000.000.000	0,0594
7. Way Kanan	29.319.990.000,65	10.242.003.731,34	39.561.993.731,99	1.000.000.000.000	0,0395
8. Tulang Bawang	37.313.268.117,15	12.200.203.486,14	49.513.471.603,29	1.000.000.000.000	0,0495
9. Pesawaran	34.261.207.444,14	11.440.478.932,23	45.701.686.376,37	1.000.000.000.000	0,0457
10. Pringsewu	22.687.999.012,17	7.183.292.682,01	29.871.291.694,18	1.000.000.000.000	0,0298
11. Mesuji	23.100.890.047,26	8.112.176.329,37	31.213.066.376,63	1.000.000.000.000	0,0312
12. Tulang Bawang Barat	25.800.660.010,11	9.288.057.123,47	35.088.717.133,58	1.000.000.000.000	0,0350
13. Pesisir Barat	11.269.115.996,04	3.122.167.340,19	14.391.283.336,23	1.000.000.000.000	0,0143
14. Bandar Lampung	94.511.674.555,03	17.440.177.931,06	111.951.852.486,09	1.000.000.000.000	0,1119
15. Metro	15.455.222.760,18	5.201.090.081,31	20.656.312.841,49	1.000.000.000.000	0,0206

Sumber: BPMD Provinsi Lampung, diolah 2019

Catatan: Nilai Investasi diubah ke bentuk desimal, berguna untuk menyamakan nilai Ketimpangan Pembangunan Wilayah (IW) sehingga bisa digunakan untuk meregresikan data, maka Investasi dibagi 100.000.000.000

Lampiran 10. Perhitungan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2016
(dalam desimal)

Kabupaten/Kota	PMA	PMDN	Total Investasi	Pembagi	Investasi
1. Lampung Barat	19.080.059.001,19	7.810.100.108,06	26.890.159.109,25	1.000.000.000.000	0,0268
2. Tanggamus	30.550.700.701,22	11.221.037.021,27	41.771.737.722,49	1.000.000.000.000	0,0417
3. Lampung Selatan	67.844.667.771,04	14.661.030.041,47	82.505.697.812,51	1.000.000.000.000	0,0825
4. Lampung Timur	69.016.895.007,21	15.457.710.366,18	84.474.605.373,39	1.000.000.000.000	0,0844
5. Lampung Tengah	96.509.004.987,18	18.432.345.120,10	114.941.350.107,28	1.000.000.000.000	0,1149
6. Lampung Utara	45.888.400.037,12	13.778.000.041,08	59.666.400.078,20	1.000.000.000.000	0,0596
7. Way Kanan	29.407.112.704,01	10.247.760.119,07	39.654.872.823,08	1.000.000.000.000	0,0396
8. Tulang Bawang	37.342.300.002,15	12.217.177.034,01	49.559.477.036,16	1.000.000.000.000	0,0495
9. Pesawaran	34.579.116.002,14	11.457.609.581,18	46.036.725.583,32	1.000.000.000.000	0,0460
10. Pringsewu	22.687.999.124,10	7.192.290.034,15	29.880.289.158,25	1.000.000.000.000	0,0298
11. Mesuji	23.347.891.010,12	8.207.200.402,09	31.555.091.412,21	1.000.000.000.000	0,0315
12. Tulang Bawang Barat	25.810.112.131,01	9.298.667.456,08	35.108.779.587,09	1.000.000.000.000	0,0351
13. Pesisir Barat	11.345.000.110,12	3.124.407.441,01	14.469.407.551,13	1.000.000.000.000	0,0144
14. Bandar Lampung	94.622.765.001,01	17.471.521.109,51	112.094.286.110,52	1.000.000.000.000	0,1120
15. Metro	15.651.003.779,04	5.227.508.508,12	20.878.512.287,16	1.000.000.000.000	0,0208

Sumber: BPMD Provinsi Lampung, diolah 2019

Catatan: Nilai Investasi diubah ke bentuk desimal, berguna untuk menyamakan nilai Ketimpangan Pembangunan Wilayah (IW) sehingga bisa digunakan untuk meregresikan data, maka Investasi dibagi 100.000.000.000

Lampiran 11. Perhitungan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017
(dalam desimal)

Kabupaten/Kota	PMA	PMDN	Total Investasi	Pembagi	Investasi
1. Lampung Barat	19.280.445.125,19	7.810.111.117,06	27.090.556.242,25	1.000.000.000.000	0,0270
2. Tanggamus	30.770.771.000,08	11.225.107.238,03	41.995.878.238,11	1.000.000.000.000	0,0419
3. Lampung Selatan	68.114.000.004,08	14.661.107.034,11	82.775.107.038,19	1.000.000.000.000	0,0827
4. Lampung Timur	69.156.669.101,21	15.458.455.550,71	84.615.124.651,92	1.000.000.000.000	0,0846
5. Lampung Tengah	96.775.934.021,11	18.433.010.044,14	115.208.944.065,25	1.000.000.000.000	0,1152
6. Lampung Utara	45.897.321.403,02	13.781.100.100,15	59.678.421.503,17	1.000.000.000.000	0,0596
7. Way Kanan	29.677.000.030,17	10.301.000.004,18	39.978.000.034,35	1.000.000.000.000	0,0399
8. Tulang Bawang	37.651.117.034,12	12.312.367.001,02	49.963.484.035,14	1.000.000.000.000	0,0499
9. Pesawaran	34.580.231.732,16	11.550.087.081,12	46.130.318.813,28	1.000.000.000.000	0,0461
10. Pringsewu	22.714.034.077,06	7.199.190.061,16	29.913.224.138,22	1.000.000.000.000	0,0299
11. Mesuji	23.440.040.700,06	8.260.119.194,27	31.700.159.894,33	1.000.000.000.000	0,0317
12. Tulang Bawang Barat	25.888.765.800,04	9.330.789.090,01	35.219.554.890,05	1.000.000.000.000	0,0352
13. Pesisir Barat	11.360.247.231,05	3.127.107.509,08	14.487.354.740,13	1.000.000.000.000	0,0144
14. Bandar Lampung	94.899.004.111,07	17.601.002.011,15	112.500.006.122,22	1.000.000.000.000	0,1125
15. Metro	15.356.267.980,81	5.458.987.110,13	20.815.255.090,94	1.000.000.000.000	0,0208

Sumber: BPMD Provinsi Lampung, diolah 2019

Catatan: Nilai Investasi diubah ke bentuk desimal, berguna untuk menyamakan nilai Ketimpangan Pembangunan Wilayah (IW) sehingga bisa digunakan untuk meregresikan data, maka Investasi dibagi 100.000.000.000

Lampiran 12. Perhitungan Nilai Aglomerasi (Ag) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 (dalam desimal)

Nama Kabupaten	2013			2014			2015			2016			2017		
	pdrb kab/kota	pdrb Lampung	Ag	pdrb kab/kota	pdrb Lampung	Ag	pdrb kab/kota	pdrb Lampung	Ag	pdrb kab/kota	pdrb Lampung	Ag	pdrb kab/kota	pdrb Lampung	Ag
Lampung Barat	3.677.316	180.620.008	0,0203	3.881.888	189.797.491	0,0204	4.088.443	199.536.917	0,0204	4.293.143	209.813.980	0,02	4.509.236	220.657.349	0,0204
Tanggamus	7.975.618	180.620.008	0,0441	8.445.977	189.797.491	0,0444	8.910.245	199.536.917	0,0446	9.371.969	209.813.980	0,045	9.860.664	220.657.349	0,0446
Lampung Selatan	22.113.698	180.620.008	0,1224	23.396.573	189.797.491	0,1232	24.654.678	199.536.917	0,1235	25.942.709	209.813.980	0,124	27.359.533	220.657.349	0,1239
Lampung Timur	23.378.060	180.620.008	0,1294	24.049.295	189.797.491	0,1267	25.151.473	199.536.917	0,126	26.214.193	209.813.980	0,125	27.429.656	220.657.349	0,1243
Lampung Tengah	34.815.762	180.620.008	0,1927	36.794.367	189.797.491	0,1938	38.773.799	199.536.917	0,1943	40.949.374	209.813.980	0,195	43.117.249	220.657.349	0,1954
Lampung Utara	12.065.942	180.620.008	0,0668	12.765.479	189.797.491	0,0672	13.458.839	199.536.917	0,0674	14.145.712	209.813.980	0,067	14.883.207	220.657.349	0,0674
Way Kanan	7.041.004	180.620.008	0,0389	7.440.123	189.797.491	0,0392	7.832.393	199.536.917	0,0392	8.233.786	209.813.980	0,039	8.654.796	220.657.349	0,0392
Tulang Bawang	11.559.174	180.620.008	0,0639	12.199.160	189.797.491	0,0642	12.811.520	199.536.917	0,0642	13.505.401	209.813.980	0,064	14.242.029	220.657.349	0,0645
Pesawaran	8.447.694	180.620.008	0,0467	8.920.055	189.797.491	0,0469	9.368.564	199.536.917	0,0469	9.843.453	209.813.980	0,047	10.345.321	220.657.349	0,0468
Pringsewu	5.712.839	180.620.008	0,0316	6.041.410	189.797.491	0,0318	6.356.990	199.536.917	0,0318	6.677.199	209.813.980	0,032	7.010.771	220.657.349	0,0317
Mesuji	5.139.856	180.620.008	0,0284	5.432.257	189.797.491	0,0286	5.716.226	199.536.917	0,0286	6.008.002	209.813.980	0,029	6.320.643	220.657.349	0,0286
Tulang Bawang Barat	5.731.560	180.620.008	0,0317	6.046.680	189.797.491	0,0318	6.370.001	199.536.917	0,0319	6.705.639	209.813.980	0,032	7.083.602	220.657.349	0,0321
Pesisir Barat	2.285.815	180.620.008	0,0126	2.402.314	189.797.491	0,0126	2.520.889	199.536.917	0,0126	2.654.781	209.813.980	0,013	2.796.674	220.657.349	0,0126
Bandar Lampung	27.123.918	180.620.008	0,1501	29.036.173	189.797.491	0,1529	30.873.560	199.536.917	0,1547	32.859.032	209.813.980	0,157	34.922.076	220.657.349	0,1582
Metro	3.074.122	180.620.008	0,017	3.262.462	189.797.491	0,0171	3.453.953	199.536.917	0,0173	3.657.867	209.813.980	0,017	3.864.775	220.657.349	0,0175

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah 2019

Lampiran 13. Data Penelitian

Tabel Data Penelitian Eviews 9

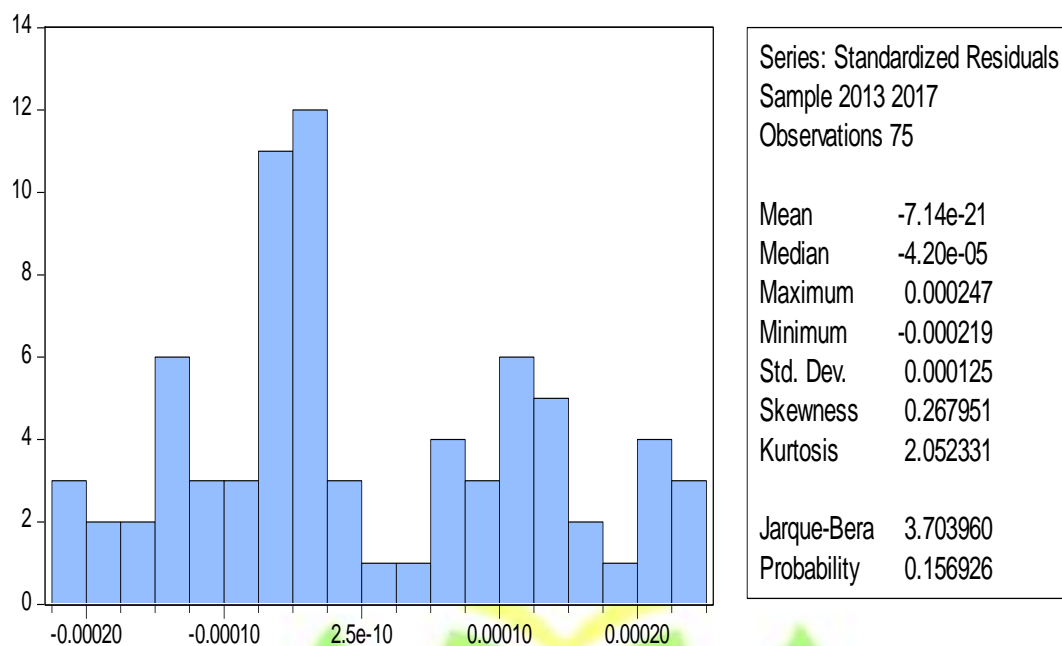
Kabupaten	Tahun	IW	PDRB per kapita	Investasi	Aglomerasi
Lampung Barat	2013	0.0009	0,1278	0,0268	0,0203
Lampung Barat	2014	0.0009	0,1336	0,0269	0,0204
Lampung Barat	2015	0.0005	0,1394	0,0268	0,0204
Lampung Barat	2016	0.0002	0,1451	0,0268	0,0204
Lampung Barat	2017	0.0002	0,1511	0,0270	0,0204
Tanggamus	2013	0.0009	0,1423	0,0411	0,0441
Tanggamus	2014	0.0009	0,1489	0,0413	0,0444
Tanggamus	2015	0.0005	0,1552	0,0416	0,0446
Tanggamus	2016	0.0002	0,1614	0,0417	0,0446
Tanggamus	2017	0.0002	0,1680	0,0419	0,0446
Lampung Selatan	2013	0.0009	0,2325	0,0814	0,1224
Lampung Selatan	2014	0.0009	0,2432	0,0815	0,1232
Lampung Selatan	2015	0.0005	0,2534	0,0815	0,1235
Lampung Selatan	2016	0.0002	0,2639	0,0825	0,1236
Lampung Selatan	2017	0.0002	0,2755	0,0827	0,1239
Lampung Timur	2013	0.0009	0,2365	0,0835	0,1294
Lampung Timur	2014	0.0009	0,2408	0,0841	0,1267
Lampung Timur	2015	0.0005	0,2493	0,0840	0,1260
Lampung Timur	2016	0.0002	0,2573	0,0844	0,1249
Lampung Timur	2017	0.0002	0,2669	0,0846	0,1243
Lampung Tengah	2013	0.0009	0,2866	0,1145	0,1927
Lampung Tengah	2014	0.0009	0,2998	0,1146	0,1938
Lampung Tengah	2015	0.0005	0,3129	0,1147	0,1943
Lampung Tengah	2016	0.0002	0,3274	0,1149	0,1951
Lampung Tengah	2017	0.0002	0,3417	0,1152	0,1954
Lampung Utara	2013	0.0009	0,2014	0,0593	0,0668
Lampung Utara	2014	0.0009	0,2117	0,0593	0,0672
Lampung Utara	2015	0.0005	0,2220	0,0594	0,0674
Lampung Utara	2016	0.0002	0,2321	0,0596	0,0674
Lampung Utara	2017	0.0002	0,2431	0,0596	0,0674
Way Kanan	2013	0.0009	0,1663	0,0392	0,0389
Way Kanan	2014	0.0009	0,1737	0,0395	0,0392
Way Kanan	2015	0.0005	0,1809	0,0395	0,0392
Way Kanan	2016	0.0002	0,1881	0,0396	0,0392
Way Kanan	2017	0.0002	0,1958	0,0399	0,0392
Tulang Bawang	2013	0.0009	0,2766	0,0491	0,0639
Tulang Bawang	2014	0.0009	0,2879	0,0493	0,0642

Tulang Bawang	2015	0.0005	0,2982	0,0495	0,0642
Tulang Bawang	2016	0.0002	0,3103	0,0495	0,0643
Tulang Bawang	2017	0.0002	0,3233	0,0499	0,0645
Pesawaran	2013	0.0009	0,2028	0,0456	0,0467
Pesawaran	2014	0.0009	0,2116	0,0456	0,0469
Pesawaran	2015	0.0005	0,2197	0,0457	0,0469
Pesawaran	2016	0.0002	0,2282	0,0460	0,0469
Pesawaran	2017	0.0002	0,2373	0,0461	0,0468
Pringsewu	2013	0.0009	0,1506	0,0297	0,0316
Pringsewu	2014	0.0009	0,1576	0,0298	0,0318
Pringsewu	2015	0.0005	0,1643	0,0298	0,0318
Pringsewu	2016	0.0002	0,1709	0,0298	0,0318
Pringsewu	2017	0.0002	0,1779	0,0299	0,0317
Mesuji	2013	0.0009	0,2666	0,0311	0,0284
Mesuji	2014	0.0009	0,2796	0,0231	0,0286
Mesuji	2015	0.0005	0,2921	0,0312	0,0286
Mesuji	2016	0.0002	0,3051	0,0315	0,0286
Mesuji	2017	0.0002	0,3190	0,0317	0,0286
Tulang Bawang Barat	2013	0.0009	0,2207	0,0349	0,0317
Tulang Bawang Barat	2014	0.0009	0,2305	0,0349	0,0318
Tulang Bawang Barat	2015	0.0005	0,2406	0,0350	0,0319
Tulang Bawang Barat	2016	0.0002	0,2511	0,0351	0,0319
Tulang Bawang Barat	2017	0.0002	0,2631	0,0352	0,0321
Pesisir Barat	2013	0.0009	0,1555	0,0143	0,0126
Pesisir Barat	2014	0.0009	0,1618	0,0143	0,0126
Pesisir Barat	2015	0.0005	0,1681	0,0143	0,0126
Pesisir Barat	2016	0.0002	0,1754	0,0144	0,0126
Pesisir Barat	2017	0.0002	0,1833	0,0144	0,0126
Bandar Lampung	2013	0.0009	0,2879	0,1118	0,1501
Bandar Lampung	2014	0.0009	0,3022	0,1118	0,1529
Bandar Lampung	2015	0.0005	0,3152	0,1119	0,1547
Bandar Lampung	2016	0.0002	0,3293	0,1120	0,1566
Bandar Lampung	2017	0.0002	0,3437	0,1125	0,1582
Metro	2013	0.0009	0,2002	0,0202	0,0170
Metro	2014	0.0009	0,2091	0,0205	0,0171
Metro	2015	0.0005	0,2180	0,0206	0,0173
Metro	2016	0.0002	0,2275	0,0208	0,0174
Metro	2017	0.0002	0,2371	0,0208	0,0175

Sumber: BPS dan BPMD Provinsi Lampung, diolah 2019

Lampiran 14. Hasil Reggesion

Jarque Bera



Multikolinieriritas

	PDRB_PERKAPITA	INVESTASI	AGLOMERASI
PDRB_PERKAPITA	1.000000	0.660841	0.661651
INVESTASI	0.660841	1.000000	0.686368
AGLOMERASI	0.661651	0.686368	1.000000

Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	95.01600
Obs*R-squared	55.02177

Uji Park

Method: Panel Least Squares

Date: 03/15/19 Time: 08:30

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 75

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.910683	3.518497	1.395676	0.1682
PDRB_PERKAPITA	0.000170	0.000299	0.567761	0.5724
INVESTASI	-0.001827	0.004289	-0.426036	0.6717
AGLOMERASI	-0.005622	0.004281	-1.313192	0.1944

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.039271	Mean dependent var	0.585081
Adjusted R-squared	-0.247262	S.D. dependent var	0.276511
S.E. of regression	0.308810	Akaike info criterion	0.693384
Sum squared resid	5.435734	Schwarz criterion	1.249581
Log likelihood	-8.001883	Hannan-Quinn criter.	0.915467
F-statistic	0.137055	Durbin-Watson stat	2.109507
Prob(F-statistic)	0.999977		

Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Prob.
C	0.002757	0.0942
PDRB_PERKAPITA	-0.021488	0.0000
INVESTASI	-0.009879	0.6183
AGLOMERASI	0.048176	0.0176
R-squared	0.844162	

Uji t-Statistik

Variable	Coefficient	t-Statistic
C	0.002757	1.702220
PDRB_PERKAPITA	-0.021488	-15.61556
INVESTASI	-0.009879	-0.500968
AGLOMERASI	0.048176	2.445440
R-squared	0.844162	



Lampiran 15. Tabel t-tabel

Tabel Titik Persentase Distribusi t-tabel (df = 61 – 80)

Pr/df	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001
	0,50	0,20	0,10	0,050	0,02	0,010	0,002
61	0,67853	1,29558	1,67022	1,99962	2,38905	2,65886	3,22930
62	0,67847	1,29536	1,66980	1,99897	2,38801	2,65748	3,22696
63	0,67840	1,29513	1,66940	1,99834	2,38701	2,65615	3,22471
64	0,67834	1,29492	1,66901	1,99773	2,38604	2,65485	3,22253
65	0,67828	1,29471	1,66864	1,99714	2,38510	2,65360	3,22041
66	0,67823	1,29451	1,66827	1,99656	2,38419	2,65239	3,21837
67	0,67817	1,2.432	1,66792	1,99601	2,38330	2,65122	3,21639
68	0,67811	1,2.413	1,66757	1,99547	2,38245	2,65008	3,21446
69	0,67806	1,2.394	1,66724	1,99495	2,38161	2,64898	3,21260
70	0,67801	1,29376	1,66691	1,99444	2,38081	2,64790	3,21079
71	0,67796	1,29359	1,66660	1,99394	2,38002	2,64686	3,20903
72	0,67791	1,29342	1,66629	1,99346	2,37926	2,64585	3,20733
73	0,67787	1,29326	1,66600	1,99300	2,37852	2,64487	3,20567
74	0,67782	1,29310	1,66571	1,99254	2,37780	2,64391	3,20406
75	0,67778	1,29294	1,66543	1,99210	2,37710	2,64298	3,20249
76	0,67773	1,29279	1,66515	1,99167	2,37642	2,64208	3,20096
77	0,67769	1,29264	1,66488	1,99125	2,37576	2,64120	3,19948
78	0,67765	1,29250	1,66462	1,99085	2,37511	2,64034	3,19804
79	0,67761	1,29236	1,66437	1,99045	2,37448	2,63950	3,19663
80	0,67757	1,29222	1,66412	1,99006	2,37387	2,63869	3,19526

Sumber: Mansuri, Modul Pratikum EvIEWS 9, 2016.

Catatan: (df) $n-1 = 75-1$

$= 74$ (dengan $\alpha = 5\%$, pengujian dua sisi $\alpha/2 = 0,025$)

Lampiran 16. Tabel F-tabel

Tabel Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	4,00	3,15	2,76	2,52	2,37	2,25	2,16	2,09	2,04	1,99	1,95	1,91	1,88	1,86	1,83
62	4,00	3,15	2,75	2,52	2,36	2,25	2,16	2,09	2,03	1,99	1,95	1,91	1,88	1,85	1,83
63	3,99	3,14	2,75	2,52	2,36	2,25	2,16	2,09	2,03	1,98	1,94	1,91	1,88	1,85	1,83
64	3,99	3,14	2,75	2,52	2,36	2,24	2,16	2,09	2,03	1,98	1,94	1,91	1,88	1,85	1,83
65	3,99	3,14	2,75	2,51	2,36	2,24	2,15	2,08	2,03	1,98	1,94	1,90	1,87	1,85	1,82
66	3,99	3,14	2,74	2,51	2,35	2,24	2,15	2,08	2,03	1,98	1,94	1,90	1,87	1,84	1,82
67	3,98	3,13	2,74	2,51	2,35	2,24	2,15	2,08	2,02	1,98	1,93	1,90	1,87	1,84	1,82
68	3,98	3,13	2,74	2,51	2,35	2,24	2,15	2,08	2,02	1,97	1,93	1,90	1,87	1,84	1,82
69	3,98	3,13	2,74	2,50	2,35	2,23	2,15	2,08	2,02	1,97	1,93	1,90	1,86	1,84	1,81
70	3,98	3,13	2,74	2,50	2,35	2,23	2,14	2,07	2,02	1,97	1,93	1,89	1,86	1,84	1,81
71	3,98	3,13	2,73	2,50	2,34	2,23	2,14	2,07	2,01	1,97	1,93	1,89	1,86	1,83	1,81
72	3,97	3,12	2,73	2,50	2,34	2,23	2,14	2,07	2,01	1,96	1,92	1,89	1,86	1,83	1,81
73	3,97	3,12	2,73	2,50	2,34	2,23	2,14	2,07	2,01	1,96	1,92	1,89	1,86	1,83	1,81
74	3,97	3,12	2,73	2,50	2,34	2,22	2,14	2,07	2,01	1,96	1,92	1,89	1,85	1,83	1,80
75	3,97	3,12	2,73	2,49	2,34	2,22	2,13	2,06	2,01	1,96	1,92	1,88	1,85	1,83	1,80
76	3,97	3,12	2,72	2,49	2,33	2,22	2,13	2,06	2,01	1,96	1,92	1,88	1,85	1,82	1,80
77	3,97	3,12	2,72	2,49	2,33	2,22	2,13	2,06	2,00	1,96	1,92	1,88	1,85	1,82	1,80
78	3,96	3,11	2,72	2,49	2,33	2,22	2,13	2,06	2,00	1,95	1,91	1,88	1,85	1,82	1,80
79	3,96	3,11	2,72	2,49	2,33	2,22	2,13	2,06	2,00	1,95	1,91	1,88	1,85	1,82	1,79
80	3,96	3,11	2,72	2,49	2,33	2,21	2,13	2,06	2,00	1,95	1,91	1,88	1,84	1,82	1,79

Sumber: Mansuri, Modul Pratikum EvIEWS 9, 2016.

- Catatan:**
- a) $df_1 (N1) = k - 1$
 $N1 = 4 - 1 = 3$
 - b) $df_2 (N2) = n - k$
 $N2 = 75 - 4 = 71$